

SEJARAH
LENGKAP
DAN
TERPERCAYA

★★★★★

KERAJAAN ISLAM INDONESIA

DARI
SABANG
SAMPAI
MERAUKE



DARI MASA KE MASA

Latar Belakang • Pendiri • Daftar Penguasa dan Tahun Kekuasaan
Prestasi • Sebab Kemunduran • Sejarah Lengkap dan Terpercaya



17 KERAJAAN ISLAM
UTAMA DI INDONESIA



258 DAFTAR PENGUSAHA
DAN TAHUN KEKUASAAN



PRESTASI DAN WARISAN
SEJARAH YANG GEMILANG



ANALISIS SEBAB
KEMUNDURAN DINASTI



KASMUI

KERAJAAN ISLAM INDONESIA DARI MASA KE MASA

*Sejarah Kronologis Kesultanan dan Kerajaan Islam
Nusantara*

Dari Pembentukan Negara, Daftar Penguasa, Prestasi, hingga Kemunduran
dan Warisan

KASMUI

AGUSTUS 2026

KATA PENGANTAR

Buku Kerajaan Islam Indonesia dari Masa ke Masa disusun untuk menghadirkan sejarah politik Islam Nusantara secara kronologis, komparatif, dan kritis. Fokus utamanya bukan hanya menyebut nama kerajaan dan tokoh, melainkan memperlihatkan bagaimana pusat-pusat kekuasaan terbentuk, bagaimana para penguasa memperoleh legitimasi, bagaimana perdagangan dan agama membentuk institusi, serta mengapa suatu dinasti berkembang, mengalami krisis, berubah, atau kehilangan kedaulatan politik. Penyusunan seperti ini diperlukan karena sejarah kerajaan Islam di wilayah Indonesia tidak berkembang sebagai satu garis tunggal. Ia merupakan jaringan banyak pusat yang saling berdagang, berperang, bersekutu, menikah, bertukar ulama, serta berhadapan dengan Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan pemerintahan kolonial Belanda pada masa yang berbeda.

Istilah kerajaan Islam dalam buku ini dipakai secara operasional untuk pusat politik yang penguasa atau institusi pemerintahannya mengadopsi Islam sebagai unsur penting legitimasi dan tata sosial. Penggunaan istilah tersebut tidak berarti seluruh penduduk, hukum, atau kebudayaan di wilayah bersangkutan menjadi homogen. Di banyak tempat, adat, struktur kekerabatan, gelar lokal, praktik perdagangan, dan norma Islam berkembang beriringan. Karena itu pembaca akan menemukan istilah sultan, susuhunan, panembahan, karaeng, arung, datu, raja, serta gelar-gelar lain yang dipertahankan sesuai konteks sejarahnya.

Salah satu masalah terbesar dalam menulis sejarah dinasti Nusantara adalah kronologi. Tanggal pendirian, masa pemerintahan, dan urutan penguasa tidak selalu sama antara kronik lokal, silsilah, prasasti, batu nisan, catatan Portugis, arsip VOC, laporan kolonial, dan penelitian modern. Buku ini tidak menyembunyikan keadaan tersebut. Jika dua tarikh sama-sama mempunyai dukungan, keduanya ditampilkan melalui tanda garis miring, rentang, atau catatan varian. Jika daftar lengkap belum dapat direkonstruksi secara aman, bagian tersebut menyatakan keterbatasannya alih-alih mengisi kekosongan dengan nama atau tahun yang tidak terverifikasi.

Sumber yang digunakan meliputi karya sintesis yang telah menjadi rujukan penting, seperti M.C. Ricklefs mengenai sejarah Indonesia modern awal dan kolonial, Anthony Reid mengenai ekonomi dan masyarakat Asia Tenggara zaman perdagangan, Leonard Y. Andaya mengenai Maluku dan Sulawesi, H.J. de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud mengenai negara-negara Islam di Jawa, Peter Carey mengenai Jawa abad XVIII-XIX, Denys Lombard mengenai Aceh dan Jawa, serta penelitian Uka Tjandrasasmita tentang arkeologi Islam Nusantara. Karya-karya tersebut dibaca bersama sumber primer atau edisi sumber seperti Suma Oriental, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Bustan al-Salatin, Sajarah Banten, Babad Tanah Jawi, Tuhfat al-Nafis, Hikayat Banjar, kronik Makassar-Bugis, dan dokumen arsip kolonial.

Penekanan pada kronologi tidak dimaksudkan menjadikan sejarah sebagai hafalan tahun. Tabel penguasa dan timeline berfungsi sebagai kerangka untuk memahami perubahan struktur. Pembaca diajak menghubungkan pergantian raja dengan kondisi fiskal, perubahan harga komoditas, teknologi perang, perpindahan pusat dagang, persaingan elite, perkembangan ulama dan institusi keagamaan, serta perubahan strategi kekuatan Eropa. Dengan demikian satu tahun di dalam tabel selalu harus dibaca bersama proses yang lebih panjang sebelum dan sesudahnya.

Buku ini juga berusaha menghindari dua ekstrem. Pertama, glorifikasi yang menggambarkan setiap kesultanan sebagai negara besar tanpa konflik internal. Kedua, narasi kolonial lama yang seolah-olah menjadikan kerajaan lokal hanya objek pasif. Pusat-pusat politik Nusantara memiliki agensi: mereka bernegosiasi, membentuk koalisi, memanfaatkan persaingan Eropa, memperbarui administrasi, dan terkadang mengambil keputusan yang justru memperdalam krisis. Analisis sebab kemunduran karena itu selalu bersifat multikausal dan memperhatikan interaksi faktor internal dengan tekanan eksternal.

Untuk kepentingan pembelajaran, setiap kasus utama dilengkapi tabel daftar penguasa, pembahasan latar belakang, Islamisasi, pendiri dan suksesi, administrasi, ekonomi, diplomasi, prestasi, krisis, warisan, serta kritik sumber. Pada bagian akhir disediakan sintesis lintas kerajaan, latihan dua puluh soal dengan pembahasan, soal pengembangan, glosarium A-Z, dan daftar pustaka. Struktur tersebut memungkinkan buku dipakai sebagai bahan kuliah, bacaan mandiri, maupun titik awal penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih patut diberikan kepada para filolog, arkeolog, sejarawan, pengelola arsip, museum, perpustakaan, dan komunitas pelestari warisan yang memungkinkan bahan sejarah Nusantara terus tersedia untuk dikaji. Banyak pertanyaan masih terbuka. Setiap temuan baru—prasasti, naskah, arsip, data arkeologi, atau edisi kritis—dapat mengoreksi kronologi yang saat ini dianggap paling masuk akal. Karena itu buku ini hendaknya dibaca sebagai sintesis berbasis bukti yang terbuka terhadap pembaruan, bukan sebagai daftar final yang kebal kritik.

Semoga buku ini membantu pembaca melihat sejarah kerajaan Islam Indonesia sebagai mozaik yang kaya: berbeda bahasa dan struktur, tetapi terhubung oleh laut, sungai, perdagangan, jaringan pengetahuan, dan pengalaman menghadapi perubahan global. Ketelitian terhadap sumber diharapkan berjalan bersama penghargaan terhadap warisan sejarah, sehingga kebanggaan tidak bergantung pada legenda yang dipaksakan menjadi fakta, melainkan pada kemampuan masyarakat memahami masa lalunya secara jernih dan bertanggung jawab.

CATATAN KRONOLOGI DAN KRITIK SUMBER

Kronologi kerajaan Islam Nusantara bersifat tidak seragam. Tanggal yang berasal dari batu nisan bertarih, kontrak, surat resmi, atau arsip kontemporer umumnya memperoleh bobot berbeda dari angka yang hanya muncul dalam kronik yang disalin jauh kemudian. Namun sumber primer pun tidak bebas masalah: kalender dapat berbeda, nama gelar dapat berubah, seorang tokoh dapat memiliki beberapa nama, dan arsip kolonial mencatat peristiwa dari sudut kepentingan lembaga pembuatnya.

Dalam tabel buku ini, tanda c. berarti circa atau sekitar; garis miring menunjukkan dua tarikh yang umum dipakai; titik koma pada kolom tahun menunjukkan pemerintahan terputus atau dipulihkan; dan catatan 'rival/paralel' berarti terdapat klaim takhta yang tumpang tindih. Untuk kasus yang belum stabil, buku menggunakan frasa rekonstruksi selektif dan tidak mengklaim daftar linear lengkap.

Peureulak/Perlak menjadi contoh penting. Tradisi modern sering mengajukan tahun 840 M dan silsilah yang sangat panjang, tetapi bukti kontemporer yang dapat mengunci seluruh daftar itu masih diperdebatkan dalam historiografi. Karena buku ini mengutamakan keterlacakan, Perlak dibahas sebagai tradisi kerajaan awal dan masalah historiografi, bukan sebagai alasan untuk mengarang tabel penguasa yang tampak presisi.

Istilah akhir kerajaan juga dibedakan. Penghapusan kolonial berarti institusi politik dicabut oleh kekuasaan kolonial; kekalahan perang berarti pusat kehilangan kapasitas politik karena konflik; integrasi berarti dinasti atau daerah memilih/menjalani perubahan status dalam Republik Indonesia. Ketiga proses tersebut tidak boleh disamakan dengan satu kata 'runtuh'.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Buku disusun mengikuti alur regional dan kronologis. Bab I membahas sumber dan proses Islamisasi; Bab II-IX mengulas kasus kerajaan menurut kawasan; Bab X memperbandingkan pola-pola lintas wilayah. Tabel penguasa ditempatkan sedekat mungkin dengan pembahasan kerajaan agar pembaca dapat menelusuri transisi tanpa berpindah jauh.

Gambar dalam buku terutama berupa diagram kronologi yang dibuat dari data tabel. Diagram tersebut berfungsi sebagai alat bantu visual, bukan bukti primer. Bila diagram hanya menampilkan delapan belas penguasa pertama karena keterbatasan ruang, tabel tetap menjadi rujukan lengkap daftar yang disusun dalam buku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
CATATAN KRONOLOGI DAN KRITIK SUMBER	5
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU	6
DAFTAR ISI	7
BAB I - SUMBER, HISTORIOGRAFI, DAN PROSES ISLAMISASI NUSANTARA	18
1.1 Jenis Sumber dan Tingkat Kepastian	18
1.2 Islamisasi sebagai Proses	19
1.3 Perdagangan, Komoditas, dan Pembentukan Negara	19
1.4 Konsep Pendiri, Dinasti, dan Akhir Kerajaan.....	20
KESULTANAN PEUREULAK (PERLAK).....	20
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	20
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	20
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	21
BAB II - SUMATRA UTARA: PASAI, ACEH, DAN KESULTANAN PANTAI TIMUR.....	23
KESULTANAN SAMUDRA PASAI	23
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	25
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	25
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	26
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	27
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	27
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	28
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	28
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	29
Warisan, Situs, dan Memori Publik	29
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	30
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	30
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	36
KESULTANAN ACEH DARUSSALAM	37

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	39
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	40
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	40
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	41
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	42
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	42
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	43
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	43
Warisan, Situs, dan Memori Publik	44
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	44
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	45
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	55
KESULTANAN DELI.....	56
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	57
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	58
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	58
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	59
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	59
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	60
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	60
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	61
Warisan, Situs, dan Memori Publik	61
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	62
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	63
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	66
BAB III - SUMATRA TIMUR, RIAU, DAN SUMATRA SELATAN.....	67
KESULTANAN SIAK SRI INDRAPURA	67
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	68
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	69
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	70
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	70
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	71

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	72
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	72
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	73
Warisan, Situs, dan Memori Publik	73
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian	74
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan	74
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	78
KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM	78
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	79
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	80
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	81
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	81
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	82
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	82
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	83
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	84
Warisan, Situs, dan Memori Publik	84
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian	85
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan	85
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	88
KESULTANAN RIAU-LINGGA	89
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	90
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	91
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	91
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	92
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	92
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	93
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	94
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	94
Warisan, Situs, dan Memori Publik	95
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian	95
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan	96

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	97
BAB IV - JAWA PESISIR: DEMAK, PAJANG, CIREBON, DAN BANTEN..	99
KESULTANAN DEMAK	99
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	100
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	101
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	101
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	102
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	103
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	103
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	104
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	104
Warisan, Situs, dan Memori Publik	105
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	105
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	106
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	107
KESULTANAN BANTEN.....	108
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	109
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	110
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	111
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	111
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	112
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	113
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	113
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	114
Warisan, Situs, dan Memori Publik	114
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	115
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	115
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	121
KESULTANAN PAJANG.....	122
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	122
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	122
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	123

KESULTANAN CIREBON	123
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	123
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	124
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	124
BAB V - MATARAM ISLAM DAN NEGARA-NEGARA PENERUSNYA ..	125
KESULTANAN MATARAM ISLAM.....	125
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	126
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	127
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	128
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	128
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	129
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	129
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	130
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	130
Warisan, Situs, dan Memori Publik	131
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	131
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	132
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	135
KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT	136
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	136
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	137
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	138
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	138
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	139
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	140
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	140
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	141
Warisan, Situs, dan Memori Publik	141
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	142
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	142
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	145
KESULTANAN YOGYAKARTA.....	145

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	146
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	147
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	148
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	148
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	149
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	149
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	150
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	150
Warisan, Situs, dan Memori Publik	151
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	151
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	152
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	155
KADIPATEN MANGKUNEGARAN	155
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	155
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	156
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	156
KADIPATEN PAKUALAMAN	157
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	157
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	157
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	157
BAB VI - KALIMANTAN: KERAJAAN SUNGAI, PELABUHAN, DAN KESULTANAN.....	159
KESULTANAN BANJAR	159
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	161
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	162
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	162
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	163
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	164
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	164
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	165
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	165
Warisan, Situs, dan Memori Publik	166

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	166
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	167
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	173
KESULTANAN PONTIANAK.....	173
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	174
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	175
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	176
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	176
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	177
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	177
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	178
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	178
Warisan, Situs, dan Memori Publik	179
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian.....	179
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan.....	180
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	182
KESULTANAN SAMBAS	183
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	183
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	183
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	183
KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA	184
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	184
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	184
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	185
BAB VII - SULAWESI: GOWA-TALLO, BONE, BUTON, DAN JARINGAN BUGIS-MAKASSAR	186
KESULTANAN GOWA-TALLO	186
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	187
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	188
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	189
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	189
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	190

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	191
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	191
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	192
Warisan, Situs, dan Memori Publik	192
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian	193
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan	193
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti	197
KESULTANAN BONE	198
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi	198
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional	198
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	198
KESULTANAN BUTON	199
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi	199
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional	199
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	200
BAB VIII - MALUKU: TERNATE, TIDORE, DAN POLITIK REMPAH	201
KESULTANAN TERNATE	201
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan	203
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	204
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	204
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	205
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	206
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	206
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	207
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	207
Warisan, Situs, dan Memori Publik	208
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian	208
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan	209
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti	217
KESULTANAN TIDORE	218
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan	220
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	221

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	221
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	222
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	223
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	223
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	224
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	224
Warisan, Situs, dan Memori Publik	225
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian	225
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan	226
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	233
KESULTANAN BACAN DAN JAILOLO.....	234
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	234
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	234
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	235
BAB IX - NUSA TENGGARA: BIMA, SUMBAWA, DOMPU, DAN LOMBOK	236
KESULTANAN BIMA	236
Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan.....	237
Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi	238
Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi	239
Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial	239
Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal	240
Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri	241
Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya	241
Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan	242
Warisan, Situs, dan Memori Publik	242
Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian	243
Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan	243
Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti.....	247
KESULTANAN SUMBAWA	248
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	248
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	248

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	249
KESULTANAN DOMPU	249
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	249
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	250
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	250
KERAJAAN ISLAM LOMBOK DAN SELAPARANG.....	250
Latar Belakang dan Status Rekonstruksi.....	250
Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional.....	251
Prestasi, Kemunduran, dan Warisan	251
BAB X - SINTESIS KRONOLOGIS, POLA KEJAYAAN, KEMUNDURAN, DAN WARISAN	253
10.1 Pergeseran Pusat Politik dari Abad XIII hingga XX	254
10.2 Pola Pendiri dan Legitimasi	255
10.3 Ekonomi Politik dan Komoditas	255
10.4 Ulama, Naskah, dan Produksi Pengetahuan.....	256
10.5 Tipologi Kemunduran dan Transformasi	256
10.6 Warisan dan Agenda Historiografi.....	256
10.7 Timeline Kronologis Terpadu	259
LATIHAN, PERTANYAAN, DAN PEMBAHASAN.....	272
Petunjuk Latihan	272
LAMPIRAN - MATRIKS PENELITIAN DAN KONKORDANSI KRONOLOGI	282
A. Matriks Kerajaan dan Jenis Sumber Prioritas	282
B. Protokol Verifikasi Daftar Penguasa	284
C. Lembar Kerja Analisis 17 Kerajaan Utama.....	284
Kesultanan Samudra Pasai	284
Kesultanan Aceh Darussalam	285
Kesultanan Deli.....	285
Kesultanan Siak Sri Indrapura	286
Kesultanan Palembang Darussalam	286
Kesultanan Riau-Lingga.....	287
Kesultanan Demak	287
Kesultanan Banten	288

Kesultanan Mataram Islam	288
Kasunanan Surakarta Hadiningrat.....	289
Kesultanan Yogyakarta	290
Kesultanan Banjar	290
Kesultanan Pontianak.....	291
Kesultanan Gowa-Tallo	291
Kesultanan Ternate.....	292
Kesultanan Tidore	292
Kesultanan Bima	293
GLOSARIUM	294
DAFTAR PUSTAKA	305

BAB I - SUMBER, HISTORIOGRAFI, DAN PROSES ISLAMISASI NUSANTARA

Sejarah kerajaan Islam Indonesia perlu dimulai dari pertanyaan sumber. Sebelum abad modern, tidak ada satu arsip nasional yang mencatat semua kerajaan dengan sistem yang seragam. Informasi tersebar pada batu nisan, prasasti, mata uang, naskah istana, laporan perjalanan, kontrak dagang, surat diplomatik, arsip VOC, laporan kolonial, dan tradisi lisan. Perbedaan jenis sumber menyebabkan perbedaan tingkat kepastian kronologi.

Islamisasi Nusantara berlangsung melalui jaringan. Pelabuhan di Sumatra dan pesisir Jawa terhubung dengan Gujarat, Koromandel, Bengal, Arabia, dan kawasan Melayu; Maluku dihubungkan oleh komoditas rempah; Sulawesi menjadi simpul pelayaran; sungai-sungai Kalimantan dan Sumatra menghubungkan hinterland dengan pasar. Kehadiran Muslim mendahului pembentukan beberapa kesultanan, sementara di tempat lain konversi dinasti menjadi katalis perubahan institusional.

Negara Islam tidak menghapus struktur lokal. Gelar, hukum adat, pola kekerabatan, dan ritual lama terus dinegosiasikan. Dalam banyak kerajaan, Islam memberi bahasa legitimasi baru dan koneksi intelektual yang lebih luas, sedangkan bentuk pemerintahan tetap mengikuti ekologi politik setempat. Hal ini menjelaskan mengapa Aceh, Mataram, Gowa, Ternate, dan Banjar sama-sama kerajaan Islam tetapi memiliki struktur yang tidak identik.

1.1 Jenis Sumber dan Tingkat Kepastian

Sumber epigrafis seperti nisan dan prasasti memberi keuntungan karena sering dekat dengan masa peristiwa. Nama, gelar, tarikh wafat, dan formula agama dapat menjadi jangkar kronologi. Keterbatasannya ialah cakupan yang sempit: sebuah nisan tidak otomatis menjelaskan struktur pemerintahan atau seluruh silsilah.

Kronik dan hikayat memberi narasi jauh lebih kaya. Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Sajahat Banten, Babad Tanah Jawi, Tuhfat al-Nafis, Hikayat Banjar, dan kronik Sulawesi menyimpan nama, konflik, ritual, dan konsep legitimasi. Namun sebagian ditulis atau disalin setelah peristiwa, sehingga memerlukan kritik redaksi, perbandingan manuskrip, dan pemeriksaan dengan sumber eksternal.

Catatan asing seperti Tome Pires, Barbosa, Ibn Battuta, Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris memperluas sudut pandang. Mereka sering memberi tanggal serta informasi perdagangan yang tidak terdapat dalam kronik lokal, tetapi juga membawa bias bahasa, kepentingan komersial, dan salah dengar nama. Karena itu kedekatan waktu tidak sama dengan ketepatan mutlak.

Arsip VOC dan kolonial sangat besar untuk abad XVII-XIX. Kelebihannya ialah dokumentasi rutin mengenai kontrak, ekspedisi, utang, pajak, dan diplomasi. Kelemahannya ialah perspektif lembaga kolonial. Arsip perlu dibaca 'against the grain' dengan menanyakan siapa yang berbicara, untuk kepentingan apa laporan dibuat, dan suara siapa yang hilang.

1.2 Islamisasi sebagai Proses

Islamisasi perlu dipisahkan menjadi beberapa indikator: kehadiran komunitas Muslim, konversi penguasa, perubahan gelar, pendirian institusi agama, penyebaran pendidikan, serta perubahan praktik sosial. Indikator itu tidak selalu muncul bersamaan. Sebuah pelabuhan dapat mempunyai komunitas Muslim sebelum rajanya Muslim; sebaliknya konversi raja tidak berarti seluruh pedalaman langsung berubah.

Jaringan perdagangan memberi medium mobilitas, tetapi penjelasan 'Islam datang melalui pedagang' terlalu umum bila tidak menjelaskan pelaku, jalur, dan institusi. Ulama, sufi, keluarga sayyid, pedagang Gujarat, Koromandel, Arab, Melayu, Jawa, Bugis, dan kelompok lain muncul pada waktu serta tempat berbeda. Karena itu sejarah regional lebih akurat daripada model tunggal.

Negara memengaruhi islamisasi melalui patronase masjid, kadi, ulama, pendidikan, hukum, dan ritual. Namun otoritas agama tidak sepenuhnya berada di istana. Surau, pesantren, tarekat, komunitas haji, dan jaringan ulama transregional dapat menjadi sumber otoritas yang independen atau bahkan kritis terhadap raja.

1.3 Perdagangan, Komoditas, dan Pembentukan Negara

Pusat politik tumbuh di titik yang mampu menghubungkan produksi dan sirkulasi. Lada Aceh-Banten-Banjar, cengkih Maluku, timah Bangka, beras Jawa dan Sulawesi, emas serta hasil hutan Sumatra-Kalimantan, dan kuda Nusa Tenggara menciptakan peluang pendapatan. Tetapi keuntungan hanya menjadi kekuatan negara jika dapat dikonversi menjadi pajak, bea, kapal, pasukan, patronase, dan infrastruktur.

Kota pelabuhan bersifat kosmopolitan. Pedagang dari banyak komunitas hidup berdekatan dan memerlukan aturan transaksi, keamanan, gudang, penerjemah, syahbandar, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kompetisi antar-pelabuhan mendorong kebijakan terbuka, tetapi juga dapat mendorong monopoli ketika penguasa berusaha mengendalikan komoditas bernilai tinggi.

Ekspansi Eropa mengubah kompetisi tersebut secara bertahap. Portugis dan Spanyol membangun benteng; VOC menggabungkan perusahaan, diplomasi, dan kekuatan militer; negara kolonial abad XIX memiliki kapasitas teritorial lebih

besar. Pergeseran ini adalah proses berabad-abad, bukan peristiwa tunggal kedatangan Eropa.

1.4 Konsep Pendiri, Dinasti, dan Akhir Kerajaan

Istilah pendiri dapat menunjuk tokoh pertama yang memakai gelar baru, penguasa yang menyatukan wilayah, pembangun ibu kota, atau nenek moyang dinasti dalam tradisi. Buku selalu menjelaskan arti yang dipakai. Tanggal berdiri tidak boleh dicampur dengan tahun konversi Islam atau tahun pengakuan kedaulatan tanpa catatan.

Dinasti tidak selalu berarti suksesi ayah-anak. Saudara, paman, menantu, garis perempuan, bangsawan cabang, atau penguasa yang didukung faksi luar dapat naik takhta. Perubahan dinasti juga tidak selalu berarti negara lenyap. Karena itu tabel memasukkan rival dan pemerintahan berulang bila relevan.

Akhir kerajaan dapat berupa penaklukan, penghapusan kolonial, perjanjian, atau integrasi ke Republik. Yogyakarta misalnya tidak 'runtuh' pada 1945; ia mengubah status dan berintegrasi ke Republik. Perbedaan konseptual seperti ini penting agar kronologi tidak memaksakan satu pola ke semua kasus.

KESULTANAN PEUREULAK (PERLAK)

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Peureulak (Perlak) ditempatkan dalam konteks Aceh Timur. Tradisi menempatkan kerajaan Islam sangat awal; kronologi abad IX-XIII diperdebatkan dan tidak diperlakukan sebagai kepastian tanpa bukti sezaman.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Ricklefs; Tjandrasmita; Reid; sumber lokal Aceh. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Peureulak (Perlak) membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Peureulak (Perlak) dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh

pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Peureulak (Perlak) perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kesultanan Peureulak (Perlak) bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

Tabel 1. Hierarki praktis verifikasi sumber sejarah kerajaan

Jenis Sumber	Kekuatan Utama	Risiko Utama	Cara Verifikasi
Nisan/prasasti	Tarikh, nama, gelar dekat masa	Cakupan sempit	Paleografi, arkeologi, kalender, konteks situs
Kronik/hikayat	Narasi lokal dan legitimasi	Redaksi kemudian, simbolik	Bandingkan manuskrip dan sumber kontemporer
Catatan perjalanan	Observasi eksternal dan perdagangan	Bias pengamat, transliterasi	Bandingkan rute, kronologi, sumber lokal
Arsip VOC/kolonial	Tanggal, kontrak, korespondensi rinci	Bias institusional	Baca silang antararsip dan suara lokal
Tradisi lisan	Memori komunitas	Transformasi antargenerasi	Rekam varian dan uji dengan sumber material

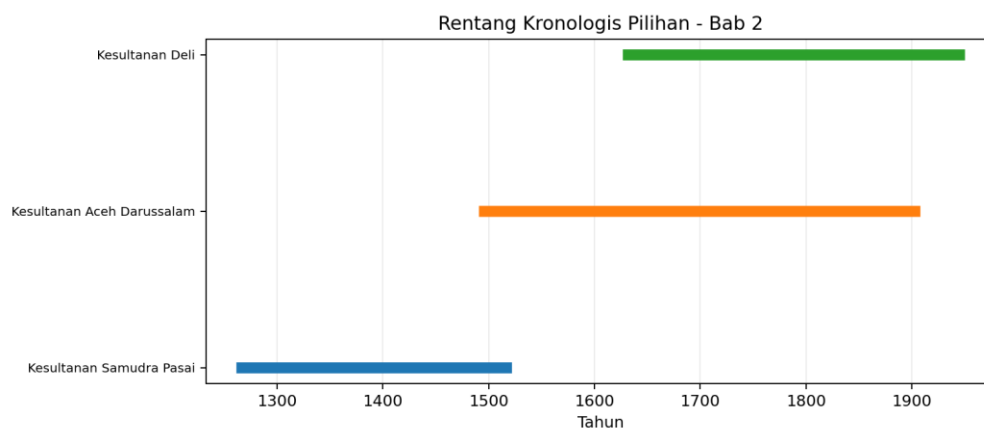
Jenis Sumber	Kekuatan Utama	Risiko Utama	Cara Verifikasi
Arkeologi/numismatik	Bukti material independen	Interpretasi konteks	Stratigrafi, tipologi, analisis bahan

BAB II - SUMATRA UTARA: PASAI, ACEH, DAN KESULTANAN PANTAI TIMUR

Sumatra utara merupakan salah satu ruang paling awal yang memperlihatkan pembentukan pusat politik Muslim yang kuat. Samudra Pasai memanfaatkan perdagangan Samudra Hindia; Aceh kemudian menggabungkan pelabuhan, lada, armada, dan diplomasi; sementara Deli mewakili transformasi politik pantai timur hingga ekonomi perkebunan kolonial.

Perbandingan ketiganya menunjukkan perubahan pusat gravitasi. Pasai penting pada abad XIII-XV, Aceh dominan pada abad XVI-XVII dan terus bertahan hingga Perang Aceh, sedangkan Deli memperoleh bentuk ekonomi-politik baru pada abad XIX. Ketiganya tidak dapat dinilai dengan ukuran wilayah semata.

Sumber kawasan ini mencakup nisan, catatan Ibn Battuta, hikayat, karya istana Aceh, catatan Portugis, arsip VOC, dan laporan kolonial. Perbedaan sifat sumber terutama memengaruhi rekonstruksi fase awal dan periode suksesi yang singkat.



Gambar 1. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 2

KESULTANAN SAMUDRA PASAI

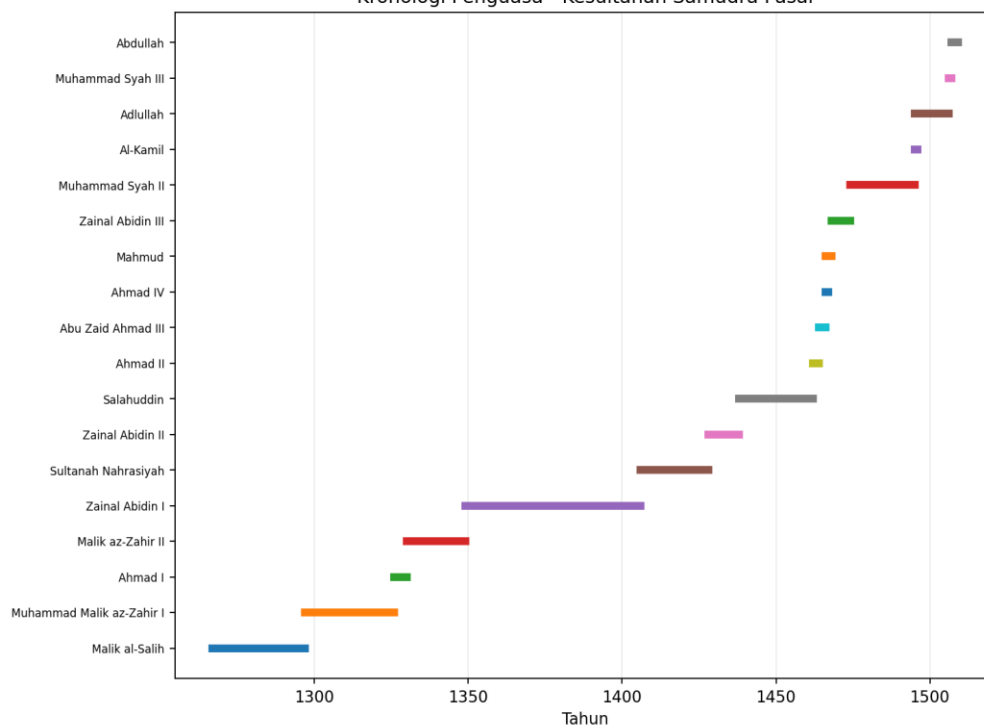
Kesultanan Samudra Pasai merupakan studi kasus utama Bab 2. Rentang yang digunakan adalah c.1267-awal abad XVI. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: relatif kuat; fase akhir mempunyai varian.

Tabel 2. Daftar penguasa Kesultanan Samudra Pasai

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Malik al-Salih	1267-1297	pendiri dalam kronologi utama
2	Muhammad Malik az-Zahir I	1297-1326	suksesi awal
3	Ahmad I	1326-c.1330-an	tarikh akhir bervariasi

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
4	Malik az-Zahir II	c.1330-an-1349	masa kunjungan Ibn Battuta
5	Zainal Abidin I	1349-1406	fase konsolidasi
6	Sultanah Nahrasiyah	1406-1428	penguasa perempuan; makam penting secara epigrafis
7	Zainal Abidin II	1428-1438	suksesi dinasti
8	Salahuddin	1438-1462	fase abad XV
9	Ahmad II	1462-1464	fase abad XV
10	Abu Zaid Ahmad III	1464-1466	fase abad XV
11	Ahmad IV	1466	masa singkat
12	Mahmud	1466-1468	suksesi
13	Zainal Abidin III	1468-1474	suksesi
14	Muhammad Syah II	1474-1495	fase akhir abad XV
15	Al-Kamil	1495	masa singkat
16	Adlullah	1495-1506	fase transisi
17	Muhammad Syah III	1506-1507	fase akhir
18	Abdullah	1507-1509	fase akhir
19	Ahmad V	1509-1514	fase akhir
20	Zainal Abidin IV	1514-1517	daftar utama; sebagian sumber memperpanjang fase akhir sekitar 1521

Kronologi Penguasa - Kesultanan Samudra Pasai



Gambar 2. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Samudra Pasai

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Samudra Pasai berkembang di pesisir utara Aceh, Sumatra dalam rentang c.1267-awal abad XVI. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Malik al-Salih (Meurah Silu dalam tradisi). Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Samudra Pasai dapat diringkas sebagai lada, perdagangan transit Samudra Hindia, pelabuhan, dan mata uang emas. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Samudra Pasai selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009 menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Samudra Pasai ditandai oleh gelar Islam, jaringan ulama-pedagang, dan hubungan Samudra Hindia. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada

satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Samudra Pasai, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Samudra Pasai merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Samudra Pasai adalah Malik al-Salih (Meurah Silu dalam tradisi). Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Samudra Pasai, catatan status kronologi adalah: relatif kuat; fase akhir mempunyai varian. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal';

yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Samudra Pasai berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Samudra Pasai sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Samudra Pasai ialah lada, perdagangan transit Samudra Hindia, pelabuhan, dan mata uang emas. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Samudra Pasai, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Samudra Pasai berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Samudra Pasai memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Samudra Pasai dapat diringkas sebagai pelabuhan Muslim internasional, mata uang, dan jaringan keilmuan pada abad XIII-XV. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu

pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Samudra Pasai berhubungan dengan persaingan regional, perubahan jalur dagang, tekanan luar, lalu penyerapan oleh Aceh. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Samudra Pasai, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Samudra Pasai tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Samudra Pasai karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Samudra Pasai meliputi Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: relatif kuat; fase akhir mempunyai varian. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Samudra Pasai menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Malik al-Salih (1267-1297). pendiri dalam kronologi utama. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Muhammad Malik az-Zahir I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Malik al-Salih sebaiknya memeriksa apakah perubahan

politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Muhammad Malik az-Zahir I (1297-1326). suksesi awal. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Malik al-Salih dan Ahmad I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Malik az-Zahir I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Ahmad I (1326-c.1330-an). tarikh akhir bervariasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Malik az-Zahir I dan Malik az-Zahir II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Malik az-Zahir II (c.1330-an-1349). masa kunjungan Ibn Battuta. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad I dan Zainal Abidin I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Malik az-Zahir II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan

cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Zainal Abidin I (1349-1406). fase konsolidasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Malik az-Zahir II dan Sultanah Nahrasiyah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Sultanah Nahrasiyah (1406-1428). penguasa perempuan; makam penting secara epigrafis. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zainal Abidin I dan Zainal Abidin II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultanah Nahrasiyah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Zainal Abidin II (1428-1438). suksesi dinasti. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultanah Nahrasiyah dan Salahuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Salahuddin (1438-1462). fase abad XV. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zainal Abidin II dan Ahmad II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai

kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Salahuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Ahmad II (1462-1464). fase abad XV. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Salahuddin dan Abu Zaid Ahmad III. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Abu Zaid Ahmad III (1464-1466). fase abad XV. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad II dan Ahmad IV. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu Zaid Ahmad III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Ahmad IV (1466). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu Zaid Ahmad III dan Mahmud. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad IV sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang

digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Mahmud (1466-1468). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad IV dan Zainal Abidin III. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mahmud sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

13. Zainal Abidin III (1468-1474). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mahmud dan Muhammad Syah II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

14. Muhammad Syah II (1474-1495). fase akhir abad XV. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zainal Abidin III dan Al-Kamil. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Syah II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

15. Al-Kamil (1495). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Syah II dan Adlullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka,

bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Al-Kamil sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

16. Adlullah (1495-1506). fase transisi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Al-Kamil dan Muhammad Syah III. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Adlullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

17. Muhammad Syah III (1506-1507). fase akhir. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Adlullah dan Abdullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Syah III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

18. Abdullah (1507-1509). fase akhir. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Syah III dan Ahmad V. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat

Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

19. Ahmad V (1509-1514). fase akhir. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdullah dan Zainal Abidin IV. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad V sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

20. Zainal Abidin IV (1514-1517). daftar utama; sebagian sumber memperpanjang fase akhir sekitar 1521. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad V dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin IV sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Samudra Pasai berangkat dari Malik al-Salih (Meurah Silu dalam tradisi) dan berkembang melalui basis lada, perdagangan transit Samudra Hindia, pelabuhan, dan mata uang emas. Islamisasi politiknya ditandai oleh gelar Islam, jaringan ulama-pedagang, dan hubungan Samudra Hindia. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah pelabuhan Muslim internasional, mata uang, dan jaringan keilmuan pada abad XIII-XV. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi

kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan persaingan regional, perubahan jalur dagang, tekanan luar, lalu penyerapan oleh Aceh. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Samudra Pasai tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

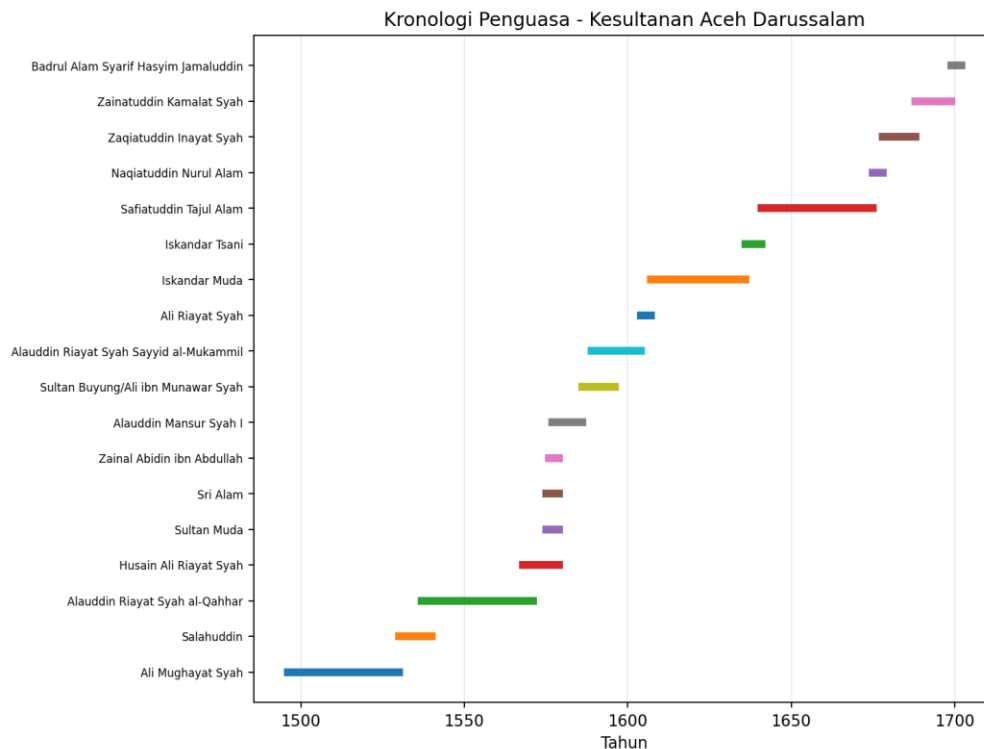
KESULTANAN ACEH DARUSSALAM

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan studi kasus utama Bab 2. Rentang yang digunakan adalah akhir abad XV/awal XVI-1903. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat; sejumlah tarikh awal dan masa krisis bervariasi.

Tabel 3. Daftar penguasa Kesultanan Aceh Darussalam

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Ali Mughayat Syah	1496/1514-1528/1530	awal kronologi berbeda antar sumber
2	Salahuddin	c.1530-1537/1540	suksesi awal
3	Alauddin Riayat Syah al-Qahhar	c.1537/1540-1568/1571	ekspansi dan diplomasi
4	Husain Ali Riayat Syah	1568/1571-1575/1579	varian tarikh
5	Sultan Muda	1575/1579	masa singkat
6	Sri Alam	1575-1576/1579	masa singkat
7	Zainal Abidin ibn Abdullah	1576-1577/1579	masa singkat
8	Alauddin Mansur Syah I	1577/1579-1586	fase akhir abad XVI
9	Sultan Buyung/Ali ibn Munawar Syah	1586/1589-1589/1596	varian kronologi
10	Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil	1589/1596-1604	konsolidasi
11	Ali Riayat Syah	1604-1607	menjelang Iskandar Muda
12	Iskandar Muda	1607-1636	puncak ekspansi dan administrasi
13	Iskandar Tsani	1636-1641	masa Nuruddin ar-Raniri
14	Safiatuddin Tajul Alam	1641-1675	sultanah pertama dari empat sultanah
15	Naqiatuddin Nurul Alam	1675-1678	sultanah

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
16	Zaqiatuddin Inayat Syah	1678-1688	sultanah
17	Zainatuddin Kamalat Syah	1688-1699	sultanah
18	Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin	1699-1702	fase dinasti berikutnya
19	Perkasa Alam Syarif Lamtui	1702-1703	masa singkat
20	Jamalul Alam Badrul Munir	1703-1726	awal abad XVIII
21	Jauharul Alam Amaddin	1726	masa singkat
22	Syamsul Alam	1726-1727	masa singkat
23	Alauddin Ahmad Syah	1727-1735	konsolidasi
24	Alauddin Johan Syah	1735-1760	abad XVIII
25	Alauddin Mahmud Syah I	1760-1764; 1765-1773; 1773-1781	beberapa kali dipulihkan
26	Badruddin Johan Syah	1764-1765	interupsi
27	Sulaiman Syah	1773	interupsi singkat
28	Alauddin Muhammad Syah	1781-1795	akhir abad XVIII
29	Alauddin Jauhar al-Alam	1795-1823	menghadapi rival
30	Syarif Saif al-Alam	1815-1820	rival dalam masa Jauhar al-Alam
31	Muhammad Syah	1823-1838	awal abad XIX
32	Sulaiman Ali Iskandar Syah	1838-1857	abad XIX
33	Mansur Syah	1857-1870	menjelang Perang Aceh
34	Mahmud Syah	1870-1874	awal Perang Aceh
35	Muhammad Daud Syah	1874-1903	sultan terakhir dalam perang melawan Belanda



Gambar 3. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Aceh Darussalam berkembang di Aceh dan Sumatra utara dalam rentang akhir abad XV/awal XVI-1903. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Ali Mughayat Syah. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Aceh Darussalam dapat diringkas sebagai lada, pelabuhan Aceh, perdagangan Samudra Hindia, dan jaringan fiskal-militer. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Aceh Darussalam selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Aceh Darussalam ditandai oleh ulama istana, karya tasawuf-fikih, diplomasi Muslim, dan jaringan Haramain. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Aceh Darussalam, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Aceh Darussalam adalah Ali Mughayat Syah. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan

memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Aceh Darussalam, catatan status kronologi adalah: kuat; sejumlah tarikh awal dan masa krisis bervariasi. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Aceh Darussalam berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Aceh Darussalam sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Aceh Darussalam ialah lada, pelabuhan Aceh, perdagangan Samudra Hindia, dan jaringan fiskal-militer. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Aceh Darussalam, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Aceh Darussalam berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah

Kesultanan Aceh Darussalam memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Aceh Darussalam dapat diringkas sebagai ekspansi dan konsolidasi pada masa Iskandar Muda serta tradisi intelektual abad XVII. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Aceh Darussalam berhubungan dengan fragmentasi elite, perubahan perdagangan, tekanan Belanda, dan Perang Aceh. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Aceh Darussalam, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Aceh Darussalam tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Aceh Darussalam karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Aceh Darussalam meliputi Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat; sejumlah tarikh awal dan masa krisis bervariasi. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi

nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Aceh Darussalam menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Ali Mughayat Syah (1496/1514-1528/1530). awal kronologi berbeda antar sumber. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Salahuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ali Mughayat Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Salahuddin (c.1530-1537/1540). suksesi awal. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ali Mughayat Syah dan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Salahuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (c.1537/1540-1568/1571). ekspansi dan diplomasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Salahuddin dan Husain Ali Riayat Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar sebaiknya memeriksa

apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Husain Ali Riayat Syah (1568/1571-1575/1579). varian tarikh. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Riayat Syah al-Qahhar dan Sultan Muda. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Husain Ali Riayat Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Sultan Muda (1575/1579). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Husain Ali Riayat Syah dan Sri Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Muda sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Sri Alam (1575-1576/1579). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Muda dan Zainal Abidin ibn Abdullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sri Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar

dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Zainal Abidin ibn Abdullah (1576-1577/1579). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sri Alam dan Alauddin Mansur Syah I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin ibn Abdullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Alauddin Mansur Syah I (1577/1579-1586). fase akhir abad XVI. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zainal Abidin ibn Abdullah dan Sultan Buyung/Ali ibn Munawar Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Mansur Syah I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Sultan Buyung/Ali ibn Munawar Syah (1586/1589-1589/1596). varian kronologi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Mansur Syah I dan Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Buyung/Ali ibn Munawar Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil (1589/1596-1604). konsolidasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Buyung/Ali ibn Munawar Syah dan Ali Riayat Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Ali Riayat Syah (1604-1607). menjelang Iskandar Muda. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil dan Iskandar Muda. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ali Riayat Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Iskandar Muda (1607-1636). puncak ekspansi dan administrasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ali Riayat Syah dan Iskandar Tsani. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Iskandar Muda sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

13. Iskandar Tsani (1636-1641). masa Nuruddin ar-Raniri. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Iskandar Muda dan Safiatuddin Tajul Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan

ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Iskandar Tsani sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

14. Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675). sultanah pertama dari empat sultanah. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Iskandar Tsani dan Naqiatuddin Nurul Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Safiatuddin Tajul Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

15. Naqiatuddin Nurul Alam (1675-1678). sultanah. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Safiatuddin Tajul Alam dan Zaqiatuddin Inayat Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Naqiatuddin Nurul Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

16. Zaqiatuddin Inayat Syah (1678-1688). sultanah. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Naqiatuddin Nurul Alam dan Zainatuddin Kamalat Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zaqiatuddin Inayat Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah

Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

17. Zainatuddin Kamalat Syah (1688-1699). sultanah. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zaqiatuddin Inayat Syah dan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainatuddin Kamalat Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

18. Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin (1699-1702). fase dinasti berikutnya. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zainatuddin Kamalat Syah dan Perkasa Alam Syarif Lamtui. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

19. Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin dan Jamalul Alam Badrul Munir. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Perkasa Alam Syarif Lamtui sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

20. Jamalul Alam Badrul Munir (1703-1726). awal abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Perkasa Alam Syarif Lamtui dan Jauharul Alam Amaddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Jamalul Alam Badrul Munir sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

21. Jauharul Alam Amaddin (1726). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Jamalul Alam Badrul Munir dan Syamsul Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Jauharul Alam Amaddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

22. Syamsul Alam (1726-1727). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Jauharul Alam Amaddin dan Alauddin Ahmad Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syamsul Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

23. Alauddin Ahmad Syah (1727-1735). konsolidasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syamsul Alam dan Alauddin Johan Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin

Ahmad Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

24. Alauddin Johan Syah (1735-1760). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Ahmad Syah dan Alauddin Mahmud Syah I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Johan Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

25. Alauddin Mahmud Syah I (1760-1764; 1765-1773; 1773-1781). beberapa kali dipulihkan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Johan Syah dan Badruddin Johan Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Mahmud Syah I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

26. Badruddin Johan Syah (1764-1765). interupsi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Mahmud Syah I dan Sulaiman Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Badruddin Johan Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006;

Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

27. Sulaiman Syah (1773). interupsi singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Badruddin Johan Syah dan Alauddin Muhammad Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sulaiman Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

28. Alauddin Muhammad Syah (1781-1795). akhir abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sulaiman Syah dan Alauddin Jauhar al-Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Muhammad Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

29. Alauddin Jauhar al-Alam (1795-1823). menghadapi rival. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Muhammad Syah dan Syarif Saif al-Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Jauhar al-Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

30. Syarif Saif al-Alam (1815-1820). rival dalam masa Jauhar al-Alam. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Jauhar al-Alam dan Muhammad Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Saif al-Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

31. Muhammad Syah (1823-1838). awal abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Saif al-Alam dan Sulaiman Ali Iskandar Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

32. Sulaiman Ali Iskandar Syah (1838-1857). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Syah dan Mansur Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sulaiman Ali Iskandar Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

33. Mansur Syah (1857-1870). menjelang Perang Aceh. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sulaiman Ali Iskandar Syah dan Mahmud Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mansur Syah

sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

34. Mahmud Syah (1870-1874). awal Perang Aceh. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mansur Syah dan Muhammad Daud Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mahmud Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

35. Muhammad Daud Syah (1874-1903). sultan terakhir dalam perang melawan Belanda. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mahmud Syah dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Daud Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Aceh Darussalam berangkat dari Ali Mughayat Syah dan berkembang melalui basis lada, pelabuhan Aceh, perdagangan Samudra Hindia, dan jaringan fiskal-militer. Islamisasi politiknya ditandai oleh ulama istana, karya tasawuf-fikih, diplomasi Muslim, dan jaringan Haramain. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah ekspansi dan konsolidasi pada masa Iskandar Muda serta tradisi intelektual abad XVII. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan fragmentasi elite, perubahan perdagangan, tekanan Belanda, dan Perang Aceh. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

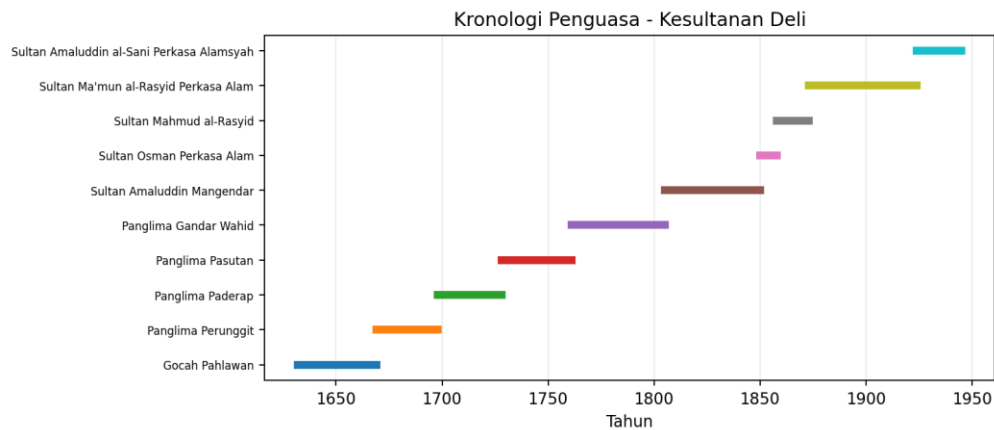
Warisan Kesultanan Aceh Darussalam tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN DELI

Kesultanan Deli merupakan studi kasus utama Bab 2. Rentang yang digunakan adalah abad XVII-1945. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: cukup kuat untuk fase XIX-XX; kronologi awal perlu kehati-hatian.

Tabel 4. Daftar penguasa Kesultanan Deli

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Gocah Pahlawan	c.1632-1669	pendiri politik Deli
2	Panglima Perunggit	1669-1698	suksesi awal
3	Panglima Paderap	1698-1728	konsolidasi
4	Panglima Pasutan	1728-1761	abad XVIII
5	Panglima Gandar Wahid	1761-1805	tarikh lokal bervariasi
6	Sultan Amaluddin Mangendar	1805-1850	gelar kesultanan makin mapan
7	Sultan Osman Perkasa Alam	1850-1858	abad XIX
8	Sultan Mahmud al-Rasyid	1858-1873	awal ekspansi perkebunan
9	Sultan Ma'mun al-Rasyid Perkasa Alam	1873-1924	arsitektur dan ekonomi perkebunan
10	Sultan Amaluddin al-Sani Perkasa Alamasyah	1924-1945	fase akhir kolonial



Gambar 4. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Deli

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Deli berkembang di Sumatra Timur dalam rentang abad XVII-1945. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Gocah Pahlawan dalam tradisi politik Deli. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Deli dapat diringkas sebagai perdagangan sungai; kemudian tembakau dan konsesi perkebunan abad XIX. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Deli selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan

dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Deli ditandai oleh dinasti Melayu-Islam, masjid, dan jaringan ulama Sumatra Timur. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Deli, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Deli merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Deli adalah Gocah Pahlawan dalam tradisi politik Deli. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Deli, catatan status kronologi adalah: cukup kuat

untuk fase XIX-XX; kronologi awal perlu kehati-hatian. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Deli berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Deli sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Deli ialah perdagangan sungai; kemudian tembakau dan konsesi perkebunan abad XIX. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Deli, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Deli berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Deli memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Deli dapat diringkas sebagai pertumbuhan ekonomi perkebunan dan pembangunan institusi-istana pada akhir XIX-awal XX. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini,

kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Deli berhubungan dengan ketergantungan kolonial, revolusi sosial Sumatra Timur, dan integrasi Republik. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Deli, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Deli tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi

sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Deli karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Deli meliputi Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: cukup kuat untuk fase XIX-XX; kronologi awal perlu kehati-hatian. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Deli menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Gocah Pahlawan (c.1632-1669). pendiri politik Deli. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Panglima Perunggit. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Gocah Pahlawan sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.
2. Panglima Perunggit (1669-1698). suksesi awal. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Gocah Pahlawan dan Panglima Paderap. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Panglima Perunggit sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.
3. Panglima Paderap (1698-1728). konsolidasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Panglima Perunggit dan Panglima Pasutan. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Panglima Paderap sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.
4. Panglima Pasutan (1728-1761). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Panglima Paderap dan Panglima Gandar Wahid. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan

varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Panglima Pasutan sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Panglima Gandar Wahid (1761-1805). tarikh lokal bervariasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Panglima Pasutan dan Sultan Amaluddin Mangendar. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Panglima Gandar Wahid sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Sultan Amaluddin Mangendar (1805-1850). gelar kesultanan makin mapan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Panglima Gandar Wahid dan Sultan Osman Perkasa Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Amaluddin Mangendar sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Sultan Osman Perkasa Alam (1850-1858). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Amaluddin Mangendar dan Sultan Mahmud al-Rasyid. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan

elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Sultan Mahmud al-Rasyid (1858-1873). awal ekspansi perkebunan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Osman Perkasa Alam dan Sultan Ma'mun al-Rasyid Perkasa Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Mahmud al-Rasyid sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Sultan Ma'mun al-Rasyid Perkasa Alam (1873-1924). arsitektur dan ekonomi perkebunan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Mahmud al-Rasyid dan Sultan Amaluddin al-Sani Perkasa Alamsyah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Ma'mun al-Rasyid Perkasa Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Sultan Amaluddin al-Sani Perkasa Alamsyah (1924-1945). fase akhir kolonial. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Ma'mun al-Rasyid Perkasa Alam dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Amaluddin al-Sani Perkasa Alamsyah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya. Dengan cara ini, daftar

dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Deli berangkat dari Gocah Pahlawan dalam tradisi politik Deli dan berkembang melalui basis perdagangan sungai; kemudian tembakau dan konsesi perkebunan abad XIX. Islamisasi politiknya ditandai oleh dinasti Melayu-Islam, masjid, dan jaringan ulama Sumatra Timur. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah pertumbuhan ekonomi perkebunan dan pembangunan institusi-istana pada akhir XIX-awal XX. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan ketergantungan kolonial, revolusi sosial Sumatra Timur, dan integrasi Republik. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

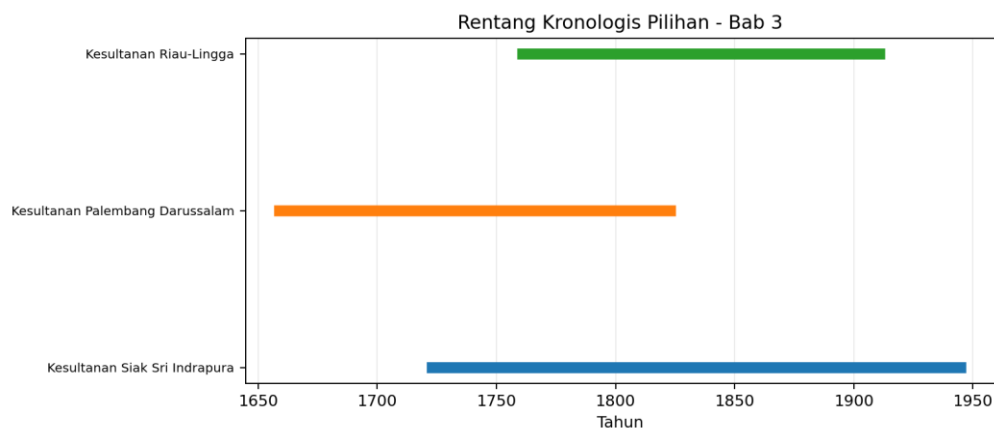
Warisan Kesultanan Deli tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

BAB III - SUMATRA TIMUR, RIAU, DAN SUMATRA SELATAN

Sumatra timur, Riau, dan Sumatra selatan membentuk jaringan sungai-laut yang sangat dinamis. Siak bertumpu pada Sungai Siak dan politik Riau daratan; Palembang menguasai akses Musi dan berhubungan dengan ekonomi timah Bangka; Riau-Lingga berkembang sebagai pusat politik dan intelektual Melayu setelah pembelahan dunia Johor-Riau.

Kawasan ini memperlihatkan pentingnya perjanjian kolonial. Inggris dan Belanda tidak hanya berperang, tetapi juga menggambar batas pengaruh dan mengakui atau menolak penguasa tertentu. Traktat London 1824 menjadi salah satu titik penting bagi pemisahan lingkungan politik Melayu yang sebelumnya saling terhubung.

Secara intelektual, Penyengat dan jaringan ulama Melayu menunjukkan bahwa prestasi kerajaan tidak selalu berupa ekspansi. Produksi bahasa, sastra, hukum, dan pengetahuan dapat menjadi warisan yang lebih tahan lama daripada wilayah politik.



Gambar 5. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 3

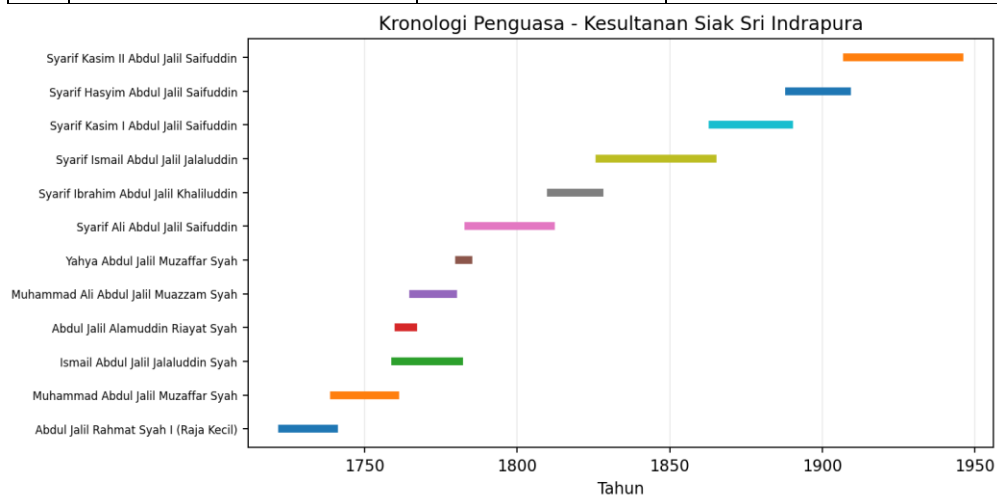
KESULTANAN SIAK SRI INDRAPURA

Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan studi kasus utama Bab 3. Rentang yang digunakan adalah 1723-1945. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat untuk urutan kesultanan.

Tabel 5. Daftar penguasa Kesultanan Siak Sri Indrapura

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Abdul Jalil Rahmat Syah I (Raja Kecil)	1723-1740	pendiri

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
2	Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah	1740-1760	suksesi
3	Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah	1760-1761; 1779-1781	dua masa pemerintahan
4	Abdul Jalil Alamuddin Riayat Syah	1761-1766	fase Senapelan/Pekanbaru
5	Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah	1766-1779	abad XVIII
6	Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah	1781-1784	masa singkat
7	Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin	1784-1811	peralihan dinasti Sayyid
8	Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin	1811-1827	abad XIX
9	Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin	1827-1864	abad XIX
10	Syarif Kasim I Abdul Jalil Saifuddin	1864-1889	abad XIX
11	Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin	1889-1908	pembangunan istana Siak
12	Syarif Kasim II Abdul Jalil Saifuddin	1908-1945	mendukung Republik Indonesia



Gambar 6. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Siak Sri Indrapura

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Siak Sri Indrapura berkembang di Riau, pesisir timur Sumatra dalam rentang 1723-1945. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite

menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Raja Kecil/Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Siak Sri Indrapura dapat diringkas sebagai sungai Siak, perdagangan, hasil hutan, timah regional, dan pelabuhan. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Siak Sri Indrapura selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Siak Sri Indrapura ditandai oleh legitimasi sultan, budaya Melayu-Islam, dan jaringan ulama. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Siak Sri Indrapura, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat

memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah Raja Kecil/Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Siak Sri Indrapura, catatan status kronologi adalah: kuat untuk urutan kesultanan. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Siak Sri Indrapura berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting;

dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Siak Sri Indrapura sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Siak Sri Indrapura ialah sungai Siak, perdagangan, hasil hutan, timah regional, dan pelabuhan. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Siak Sri Indrapura, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Siak Sri Indrapura berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Siak Sri Indrapura dapat diringkas sebagai konsolidasi Riau daratan dan kesinambungan dinasti Sayyid hingga Sultan Syarif Kasim II. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada

masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Siak Sri Indrapura berhubungan dengan kontrak kolonial mengurangi kedaulatan; berakhir melalui integrasi ke Republik Indonesia. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Siak Sri Indrapura, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Siak Sri Indrapura tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan

negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Siak Sri Indrapura karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Siak Sri Indrapura meliputi Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat untuk urutan kesultanan. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Siak Sri Indrapura menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Abdul Jalil Rahmat Syah I (Raja Kecil) (1723-1740). pendiri. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdul Jalil Rahmat Syah I (Raja Kecil) sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.
2. Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah (1740-1760). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdul Jalil Rahmat Syah I (Raja Kecil) dan

Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah (1760-1761; 1779-1781). dua masa pemerintahan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah dan Abdul Jalil Alamuddin Riayat Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Abdul Jalil Alamuddin Riayat Syah (1761-1766). fase Senapelan/Pekanbaru. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah dan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdul Jalil Alamuddin Riayat Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1766-1779). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdul Jalil Alamuddin Riayat Syah dan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah

sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah (1781-1784). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dan Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin (1784-1811). peralihan dinasti Sayyid. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah dan Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (1811-1827). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin dan Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003;

Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1827-1864). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin dan Syarif Kasim I Abdul Jalil Saifuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Syarif Kasim I Abdul Jalil Saifuddin (1864-1889). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin dan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Kasim I Abdul Jalil Saifuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin (1889-1908). pembangunan istana Siak. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Kasim I Abdul Jalil Saifuddin dan Syarif Kasim II Abdul Jalil Saifuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Syarif Kasim II Abdul Jalil Saifuddin (1908-1945). mendukung Republik Indonesia. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Hasyim Abdul Jalil

Saifuddin dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Kasim II Abdul Jalil Saifuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Siak Sri Indrapura berangkat dari Raja Kecil/Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dan berkembang melalui basis sungai Siak, perdagangan, hasil hutan, timah regional, dan pelabuhan. Islamisasi politiknya ditandai oleh legitimasi sultan, budaya Melayu-Islam, dan jaringan ulama. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah konsolidasi Riau daratan dan kesinambungan dinasti Sayyid hingga Sultan Syarif Kasim II. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan kontrak kolonial mengurangi kedaulatan; berakhir melalui integrasi ke Republik Indonesia. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

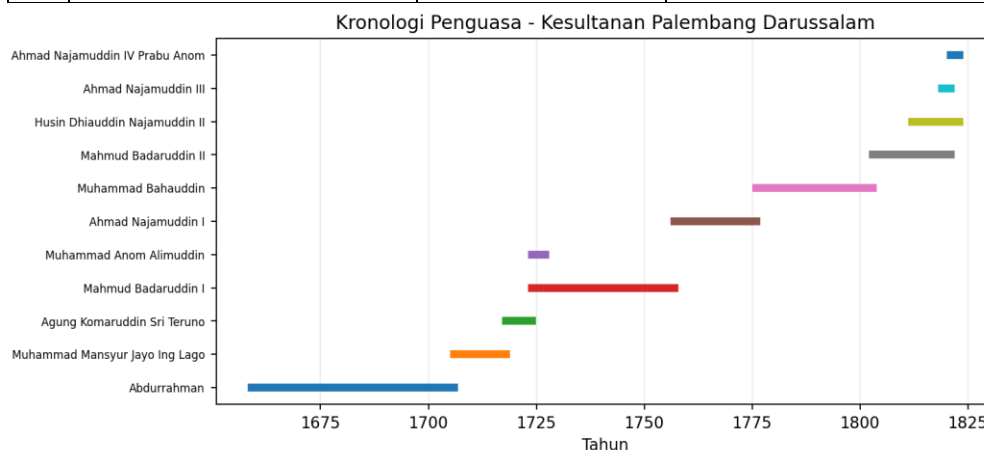
Warisan Kesultanan Siak Sri Indrapura tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan studi kasus utama Bab 3. Rentang yang digunakan adalah 1659-1823. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat; masa krisis memiliki pemerintahan paralel.

Tabel 6. Daftar penguasa Kesultanan Palembang Darussalam

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Abdurrahman	1659-1706	pendiri kesultanan
2	Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago	1706-1718	suksesi
3	Agung Komaruddin Sri Teruno	1718-1724	awal abad XVIII
4	Mahmud Badaruddin I	1724-1757	penguatan kesultanan
5	Muhammad Anom Alimuddin	1724-1727	pemerintahan paralel/rival dalam sebagian kronologi
6	Ahmad Najamuddin I	1757-1776	abad XVIII
7	Muhammad Bahauddin	1776-1803	akhir abad XVIII
8	Mahmud Badaruddin II	1803-1812; 1813; 1817-1821	perlawanan Inggris-Belanda
9	Husin Dhiauddin Najamuddin II	1812-1813; 1813-1817; 1821-1823	pemerintahan terputus
10	Ahmad Najamuddin III	1819-1821	fase konflik suksesi
11	Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom	1821-1823	fase akhir

**Gambar 7. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Palembang Darussalam**

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Palembang Darussalam berkembang di Sumatra Selatan dan DAS Musi dalam rentang 1659-1823. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Susuhunan Abdurrahman/Ki Mas Hindi. Penetapan itu tidak

selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Palembang Darussalam dapat diringkas sebagai timah Bangka, lada, hasil hutan, pelabuhan dan perdagangan Musi. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Palembang Darussalam selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Palembang Darussalam ditandai oleh istana Melayu-Islam, ulama, naskah, dan institusi keagamaan. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Palembang Darussalam merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Palembang Darussalam adalah Susuhunan Abdurrahman/Ki Mas Hindi. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Palembang Darussalam, catatan status kronologi adalah: kuat; masa krisis memiliki pemerintahan paralel. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Palembang Darussalam berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Palembang Darussalam sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Palembang Darussalam ialah timah Bangka, lada, hasil hutan, pelabuhan dan perdagangan Musi. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Palembang Darussalam, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Palembang Darussalam berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat

berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Palembang Darussalam dapat diringkas sebagai pengelolaan ekonomi sungai-timah dan perlawanan Mahmud Badaruddin II. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Palembang Darussalam berhubungan dengan intervensi Inggris-Belanda, konflik suksesi, perang, dan penghapusan 1823. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Palembang Darussalam, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Palembang Darussalam tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Palembang Darussalam

karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Palembang Darussalam meliputi Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat; masa krisis memiliki pemerintahan paralel. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Palembang Darussalam menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Abdurrahman (1659-1706). pendiri kesultanan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdurrahman sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.
2. Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1718). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdurrahman dan Agung Komaruddin Sri Teruno. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan

menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Agung Komaruddin Sri Teruno (1718-1724). awal abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago dan Mahmud Badaruddin I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Agung Komaruddin Sri Teruno sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Mahmud Badaruddin I (1724-1757). penguatan kesultanan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Agung Komaruddin Sri Teruno dan Muhammad Anom Alimuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mahmud Badaruddin I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Muhammad Anom Alimuddin (1724-1727). pemerintahan paralel/rival dalam sebagian kronologi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mahmud Badaruddin I dan Ahmad Najamuddin I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Anom Alimuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan,

perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Ahmad Najamuddin I (1757-1776). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Anom Alimuddin dan Muhammad Bahauddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad Najamuddin I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Muhammad Bahauddin (1776-1803). akhir abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad Najamuddin I dan Mahmud Badaruddin II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Bahauddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Mahmud Badaruddin II (1803-1812; 1813; 1817-1821). perlawanan Inggris-Belanda. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Bahauddin dan Husin Dhiauddin Najamuddin II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mahmud Badaruddin II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Husin Dhiauddin Najamuddin II (1812-1813; 1813-1817; 1821-1823). pemerintahan terputus. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mahmud Badaruddin II dan Ahmad Najamuddin III. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Husin Dhiauddin Najamuddin II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Ahmad Najamuddin III (1819-1821). fase konflik suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Husin Dhiauddin Najamuddin II dan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad Najamuddin III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom (1821-1823). fase akhir. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad Najamuddin III dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Palembang Darussalam berangkat dari Susuhunan Abdurrahman/Ki Mas Hindi dan berkembang melalui basis timah Bangka, lada,

hasil hutan, pelabuhan dan perdagangan Musi. Islamisasi politiknya ditandai oleh istana Melayu-Islam, ulama, naskah, dan institusi keagamaan. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah pengelolaan ekonomi sungai-timah dan perlawanan Mahmud Badaruddin II. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan intervensi Inggris-Belanda, konflik suksesi, perang, dan penghapusan 1823. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

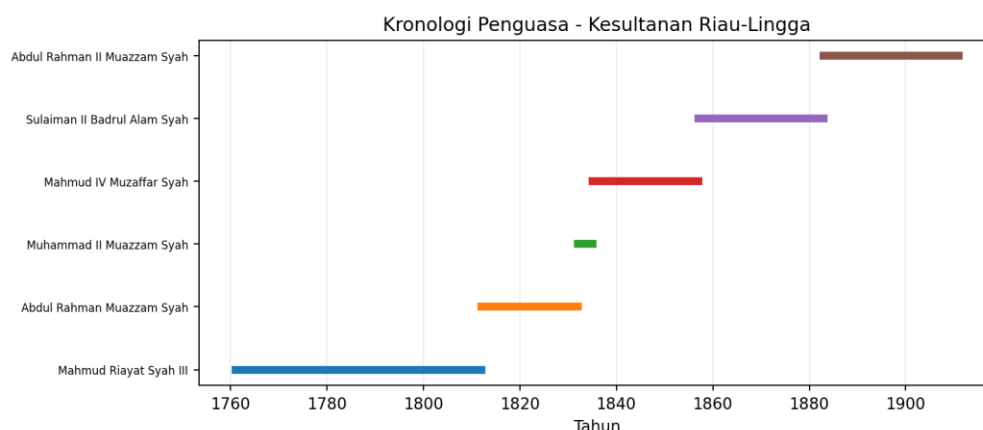
Warisan Kesultanan Palembang Darussalam tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN RIAU-LINGGA

Kesultanan Riau-Lingga merupakan studi kasus utama Bab 3. Rentang yang digunakan adalah 1812-1911, berakar pada Johor-Riau. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat untuk fase abad XIX.

Tabel 7. Daftar penguasa Kesultanan Riau-Lingga

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Mahmud Riayat Syah III	1761-1812	fase Johor-Riau sebelum Riau-Lingga tersendiri
2	Abdul Rahman Muazzam Syah	1812-1832	sultan Riau-Lingga awal
3	Muhammad II Muazzam Syah	1832-1835	suksesi
4	Mahmud IV Muzaffar Syah	1835-1857	dicopot Belanda
5	Sulaiman II Badrul Alam Syah	1857-1883	abad XIX
6	Abdul Rahman II Muazzam Syah	1883-1911	sultan terakhir; kesultanan dihapus



Gambar 8. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Riau-Lingga

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Riau-Lingga berkembang di Kepulauan Riau dan Lingga dalam rentang 1812-1911, berakar pada Johor-Riau. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah terbentuk sebagai konfigurasi tersendiri sesudah krisis Johor-Riau; pemisahan kolonial ditegaskan 1824. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Riau-Lingga dapat diringkas sebagai pelabuhan kepulauan, perdagangan Selat Malaka, dan jaringan Melayu-Bugis. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Riau-Lingga selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008 menempatkan kerajaan

Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Riau-Lingga ditandai oleh Penyengat sebagai pusat ulama, sastra, bahasa Melayu, dan karya Raja Ali Haji. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Riau-Lingga, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Riau-Lingga merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Riau-Lingga adalah terbentuk sebagai konfigurasi tersendiri sesudah krisis Johor-Riau; pemisahan kolonial ditegaskan 1824. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan

daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Riau-Lingga, catatan status kronologi adalah: kuat untuk fase abad XIX. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Riau-Lingga berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Riau-Lingga sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Riau-Lingga ialah pelabuhan kepulauan, perdagangan Selat Malaka, dan jaringan Melayu-Bugis. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing

menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Riau-Lingga, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Riau-Lingga berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Riau-Lingga memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Riau-Lingga dapat diringkas sebagai produksi intelektual Melayu-Islam dan jaringan politik Melayu-Bugis. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Riau-Lingga berhubungan dengan pembelahan Inggris-Belanda, kontrak kolonial, dan penghapusan kesultanan 1911. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Riau-Lingga, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi,

modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Riau-Lingga tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Riau-Lingga karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Riau-Lingga meliputi Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat untuk fase abad XIX. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu

menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Riau-Lingga menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Mahmud Riayat Syah III (1761-1812). fase Johor-Riau sebelum Riau-Lingga tersendiri. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Abdul Rahman Muazzam Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mahmud Riayat Syah III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Abdul Rahman Muazzam Syah (1812-1832). sultan Riau-Lingga awal. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mahmud Riayat Syah III dan Muhammad II Muazzam Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdul Rahman Muazzam Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Muhammad II Muazzam Syah (1832-1835). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdul Rahman Muazzam Syah dan Mahmud IV Muzaffar Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad II Muazzam Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Mahmud IV Muzaffar Syah (1835-1857). dicopot Belanda. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad II Muazzam Syah dan Sulaiman II Badrul Alam Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mahmud IV Muzaffar Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Sulaiman II Badrul Alam Syah (1857-1883). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mahmud IV Muzaffar Syah dan Abdul Rahman II Muazzam Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sulaiman II Badrul Alam Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Abdul Rahman II Muazzam Syah (1883-1911). sultan terakhir; kesultanan dihapus. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sulaiman II Badrul Alam Syah dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdul Rahman II Muazzam Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Riau-Lingga berangkat dari terbentuk sebagai konfigurasi tersendiri sesudah krisis Johor-Riau; pemisahan kolonial ditegaskan

1824 dan berkembang melalui basis pelabuhan kepulauan, perdagangan Selat Malaka, dan jaringan Melayu-Bugis. Islamisasi politiknya ditandai oleh Penyengat sebagai pusat ulama, sastra, bahasa Melayu, dan karya Raja Ali Haji. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah produksi intelektual Melayu-Islam dan jaringan politik Melayu-Bugis. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan pembelahan Inggris-Belanda, kontrak kolonial, dan penghapusan kesultanan 1911. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

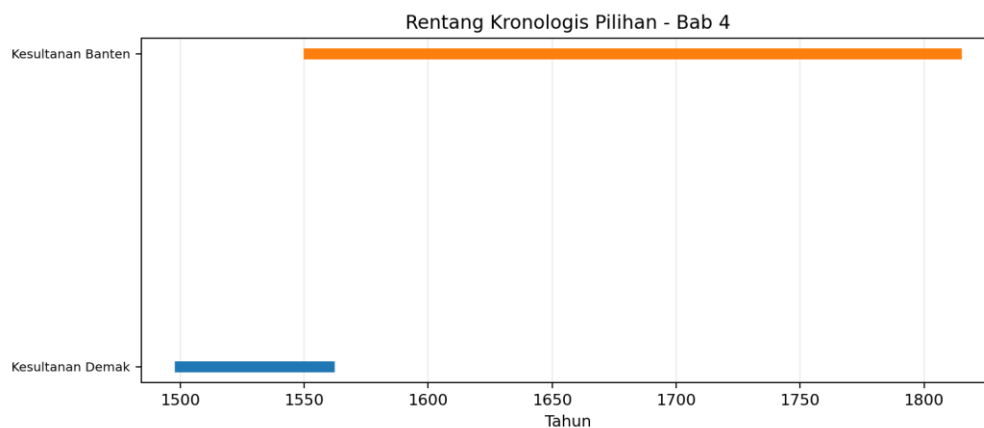
Warisan Kesultanan Riau-Lingga tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

BAB IV - JAWA PESISIR: DEMAK, PAJANG, CIREBON, DAN BANTEN

Pesisir utara dan barat Jawa menjadi arena penting Islamisasi serta pembentukan negara abad XV-XVI. Demak muncul di tengah melemahnya Majapahit dan berkembangnya kota-kota bandar. Pajang menjadi jembatan politik menuju Mataram. Cirebon menghubungkan pantai utara dengan tradisi Islam Jawa-Sunda, sedangkan Banten berkembang sebagai pelabuhan lada internasional.

Kronik Jawa dan Banten sangat kaya tetapi harus dibaca bersama sumber Portugis, Belanda, arkeologi, dan kronologi material. Tokoh yang sangat populer dalam tradisi dakwah dapat memiliki lapisan hagiografis. Kritik sumber bukan penolakan terhadap tradisi, melainkan cara menentukan fungsi sejarah dari setiap jenis cerita.

Pertumbuhan negara pesisir memperlihatkan hubungan erat antara pasar dan politik. Pelabuhan menyediakan bea, informasi, senjata, dan jaringan pedagang; tetapi juga menciptakan persaingan. Ketika VOC mulai menuntut monopoli dan mendukung salah satu faksi, konflik dinasti dapat berubah menjadi ketergantungan struktural.



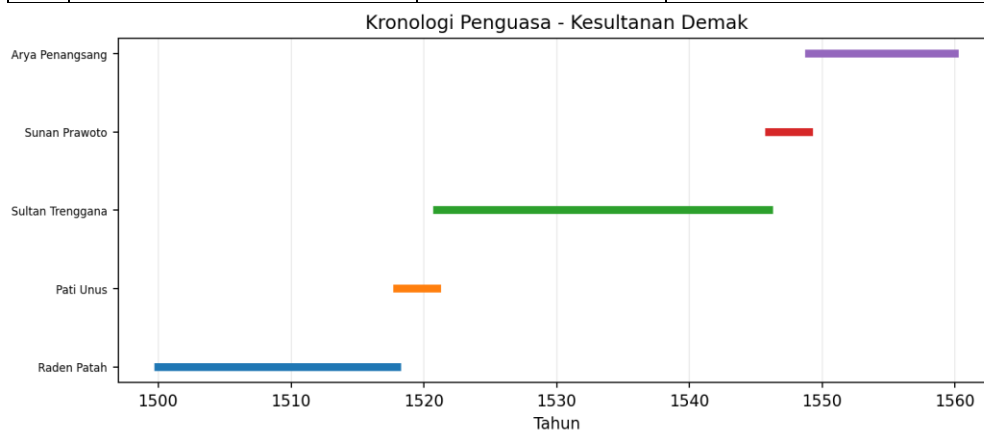
Gambar 9. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 4

KESULTANAN DEMAK

Kesultanan Demak merupakan studi kasus utama Bab 4. Rentang yang digunakan adalah akhir abad XV-pertengahan XVI. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: relatif kuat untuk urutan utama; tahun awal dan akhir bervariasi.

Tabel 8. Daftar penguasa Kesultanan Demak

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Raden Patah	c.1500-1518	tradisi 1478 sebagai awal diperdebatkan
2	Pati Unus	1518-1521	ekspedisi ke Malaka
3	Sultan Trenggana	1521-1546	ekspansi; detail awal pemerintahan bervariasi
4	Sunan Prawoto	1546-1549	krisis suksesi
5	Arya Penangsang	1549-c.1554/1560-an	klaim suksesi; bangkitnya Pajang

**Gambar 10. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Demak**

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Demak berkembang di pesisir utara Jawa Tengah dalam rentang akhir abad XV-pertengahan XVI. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Raden Patah dalam tradisi Jawa. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Demak dapat diringkas sebagai beras, bandar pesisir, pelayaran Laut Jawa-Malaka-Maluku. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—

pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Demak selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Demak ditandai oleh jejaring ulama pesisir dan tradisi Wali Songo dalam memori Islamisasi Jawa. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Demak, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Demak merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Demak adalah Raden Patah dalam tradisi Jawa. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus

memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Demak, catatan status kronologi adalah: relatif kuat untuk urutan utama; tahun awal dan akhir bervariasi. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Demak berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Demak sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Demak ialah beras, bandar pesisir, pelayaran Laut Jawa-Malaka-Maluku. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Demak, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Demak berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah

Kesultanan Demak memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Demak dapat diringkas sebagai ekspansi masa Trenggana dan peran Demak sebagai kekuatan Islam pesisir. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Demak berhubungan dengan krisis suksesi setelah Trenggana dan peralihan pusat ke Pajang. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Demak, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Demak tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Demak karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Demak meliputi de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: relatif kuat untuk urutan utama; tahun awal dan akhir bervariasi. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu

membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Demak menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Raden Patah (c.1500-1518). tradisi 1478 sebagai awal diperdebatkan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Pati Unus. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Raden Patah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Pati Unus (1518-1521). ekspedisi ke Malaka. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Raden Patah dan Sultan Trenggana. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pati Unus sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Sultan Trenggana (1521-1546). ekspansi; detail awal pemerintahan bervariasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pati Unus dan Sunan Prawoto. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Trenggana sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang

sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Sunan Prawoto (1546-1549). krisis suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Trenggana dan Arya Penangsang. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sunan Prawoto sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Arya Penangsang (1549-c.1554/1560-an). klaim suksesi; bangkitnya Pajang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sunan Prawoto dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Arya Penangsang sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Demak berangkat dari Raden Patah dalam tradisi Jawa dan berkembang melalui basis beras, bandar pesisir, pelayaran Laut Jawa-Malaka-Maluku. Islamisasi politiknya ditandai oleh jejaring ulama pesisir dan tradisi Wali Songo dalam memori Islamisasi Jawa. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah ekspansi masa Trenggana dan peran Demak sebagai kekuatan Islam pesisir. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan

membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan krisis suksesi setelah Trenggana dan peralihan pusat ke Pajang. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Demak tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

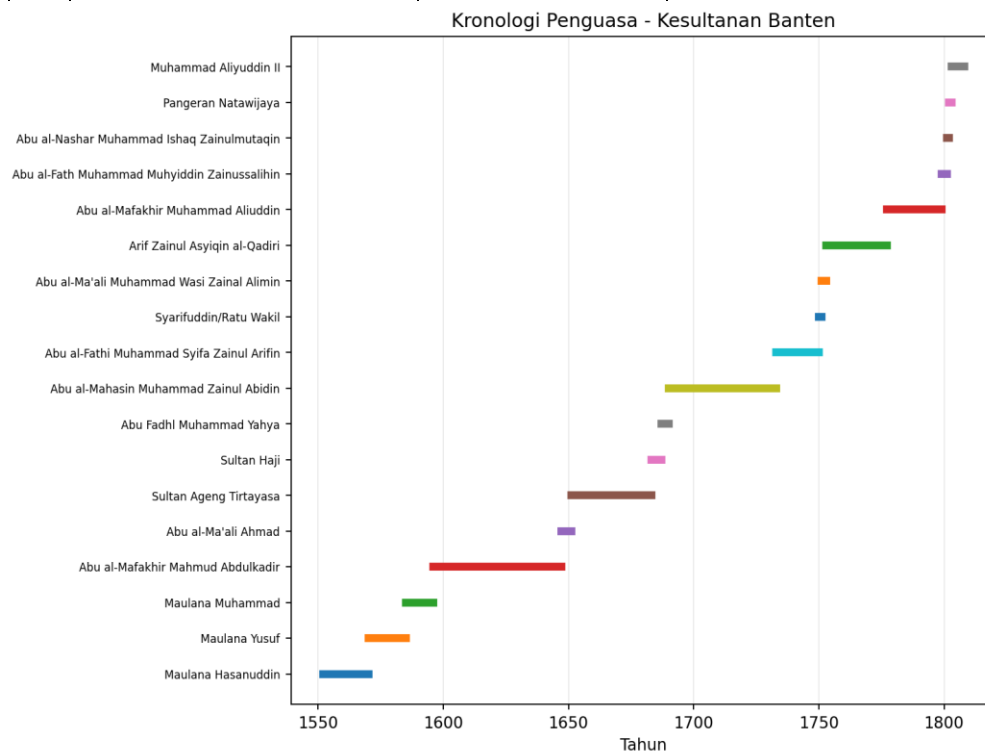
KESULTANAN BANTEN

Kesultanan Banten merupakan studi kasus utama Bab 4. Rentang yang digunakan adalah 1526/1552-1813/1816. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat; 1526 dan 1552 menunjuk fase pendirian yang berbeda.

Tabel 9. Daftar penguasa Kesultanan Banten

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Maulana Hasanuddin	1552-1570	fase berdaulat; fondasi politik sejak 1526
2	Maulana Yusuf	1570-1585	ekspansi ke Pajajaran
3	Maulana Muhammad	1585-1596	wafat dalam ekspedisi Palembang
4	Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir	1596-1647	gelar sultan dan diplomasi
5	Abu al-Ma'ali Ahmad	1647-1651	suksesi
6	Sultan Ageng Tirtayasa	1651-1683	puncak perdagangan dan konflik VOC
7	Sultan Haji	1683-1687	ketergantungan VOC meningkat
8	Abu Fadhl Muhammad Yahya	1687-1690	suksesi
9	Abu al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin	1690-1733	masa panjang
10	Abu al-Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin	1733-1750	abad XVIII
11	Syarifuddin/Ratu Wakil	1750-1751	interim
12	Abu al-Ma'ali Muhammad Wasi Zainal Alimin	1751-1753	suksesi

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
13	Arif Zainul Asyiqin al-Qadiri	1753-1777	abad XVIII
14	Abu al-Mafakhir Muhammad Aliuddin	1777-1799	akhir abad XVIII
15	Abu al-Fath Muhammad Muhyiddin Zainussalihin	1799-1801	masa singkat
16	Abu al-Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin	1801-1802	fase akhir
17	Pangeran Natawijaya	1802-1803	caretaker
18	Muhammad Aliyuddin II	1803-1808	fase akhir
19	Pangeran Suramenggala	1808-1809	caretaker
20	Muhammad ibn Muhammad Muhyiddin Zainussalihin	1809-1813	pemerintahan efektif terakhir



Gambar 11. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Banten

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Banten berkembang di ujung barat Jawa dalam rentang 1526/1552-1813/1816. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik

pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Maulana Hasanuddin; fondasi politik terkait Sunan Gunung Jati dan Demak. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Banten dapat diringkas sebagai lada Lampung-Banten, pelabuhan internasional, tekstil, dan perdagangan antarbenua. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Banten selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976 menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Banten ditandai oleh keraton, Masjid Agung, ulama, gelar sultan, dan jaringan haji. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Banten, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat

memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Banten merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Banten adalah Maulana Hasanuddin; fondasi politik terkait Sunan Gunung Jati dan Demak. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Banten, catatan status kronologi adalah: kuat; 1526 dan 1552 menunjuk fase pendirian yang berbeda. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Banten berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara

maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Banten sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Banten ialah lada Lampung-Banten, pelabuhan internasional, tekstil, dan perdagangan antarbenua. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Banten, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Banten berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Banten memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Banten dapat diringkas sebagai pelabuhan kosmopolitan dan kemandirian pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada

masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Banten berhubungan dengan konflik Ageng-Haji, intervensi VOC, kontrak tidak seimbang, lalu pembubaran kolonial. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Banten, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Banten tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan

negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Banten karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Banten meliputi Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat; 1526 dan 1552 menunjuk fase pendirian yang berbeda. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Banten menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Maulana Hasanuddin (1552-1570). fase berdaulat; fondasi politik sejak 1526. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Maulana Yusuf. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Maulana Hasanuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Maulana Yusuf (1570-1585). ekspansi ke Pajajaran. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Maulana Hasanuddin dan Maulana Muhammad. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Maulana Yusuf sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Maulana Muhammad (1585-1596). wafat dalam ekspedisi Palembang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Maulana Yusuf dan Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Maulana Muhammad sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir (1596-1647). gelar sultan dan diplomasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Maulana Muhammad dan Abu al-Ma'ali Ahmad. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Abu al-Ma'ali Ahmad (1647-1651). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir dan Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan

Abu al-Ma'ali Ahmad sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683). puncak perdagangan dan konflik VOC. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Ma'ali Ahmad dan Sultan Haji. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Sultan Haji (1683-1687). ketergantungan VOC meningkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Abu Fadhl Muhammad Yahya. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Haji sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Abu Fadhl Muhammad Yahya (1687-1690). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Haji dan Abu al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu Fadhl Muhammad Yahya sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs

2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Abu al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690-1733). masa panjang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu Fadhl Muhammad Yahya dan Abu al-Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Abu al-Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin (1733-1750). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin dan Syarifuddin/Ratu Wakil. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu al-Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Syarifuddin/Ratu Wakil (1750-1751). interim. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin dan Abu al-Ma'ali Muhammad Wasi Zainal Alimin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarifuddin/Ratu Wakil sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Abu al-Ma'ali Muhammad Wasi Zainal Alimin (1751-1753). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarifuddin/Ratu Wakil dan Arif Zainul Asyiqin al-Qadiri. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu al-Ma'ali Muhammad Wasi Zainal Alimin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

13. Arif Zainul Asyiqin al-Qadiri (1753-1777). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Ma'ali Muhammad Wasi Zainal Alimin dan Abu al-Mafakhir Muhammad Aliuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Arif Zainul Asyiqin al-Qadiri sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

14. Abu al-Mafakhir Muhammad Aliuddin (1777-1799). akhir abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Arif Zainul Asyiqin al-Qadiri dan Abu al-Fath Muhammad Muhyiddin Zainussalihin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu al-Mafakhir Muhammad Aliuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

15. Abu al-Fath Muhammad Muhyiddin Zainussalihin (1799-1801). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Mafakhir Muhammad Aliuddin

dan Abu al-Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu al-Fath Muhammad Muhyiddin Zainussalihin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

16. Abu al-Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin (1801-1802). fase akhir. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Fath Muhammad Muhyiddin Zainussalihin dan Pangeran Natawijaya. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu al-Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

17. Pangeran Natawijaya (1802-1803). caretaker. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu al-Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin dan Muhammad Aliyuddin II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pangeran Natawijaya sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

18. Muhammad Aliyuddin II (1803-1808). fase akhir. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pangeran Natawijaya dan Pangeran Suramenggala. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan

Muhammad Aliyuddin II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

19. Pangeran Suramenggala (1808-1809). caretaker. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Aliyuddin II dan Muhammad ibn Muhammad Muhyiddin Zainussalihin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pangeran Suramenggala sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

20. Muhammad ibn Muhammad Muhyiddin Zainussalihin (1809-1813). pemerintahan efektif terakhir. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pangeran Suramenggala dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad ibn Muhammad Muhyiddin Zainussalihin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Banten berangkat dari Maulana Hasanuddin; fondasi politik terkait Sunan Gunung Jati dan Demak dan berkembang melalui basis lada Lampung-Banten, pelabuhan internasional, tekstil, dan perdagangan antarbenua. Islamisasi politiknya ditandai oleh keraton, Masjid Agung, ulama, gelar sultan, dan jaringan haji. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah pelabuhan kosmopolitan dan kemandirian pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan konflik Ageng-Haji, intervensi VOC, kontrak tidak seimbang, lalu pembubaran kolonial. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Banten tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN PAJANG

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Pajang ditempatkan dalam konteks Jawa Tengah. Hadiwijaya/Jaka Tingkir c.1568-1582; Arya Pangiri c.1583-1586; Pangeran Benawa c.1586-1587/88. Pajang menjadi jembatan Demak-Mataram.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi de Graaf-Pigeaud; Ricklefs; Babad Tanah Jawi secara kritis. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Pajang membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Pajang dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Pajang perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kesultanan Pajang bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

KESULTANAN CIREBON

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Cirebon ditempatkan dalam konteks Jawa Barat. Syarif Hidayatullah c.1479-1568; Panembahan Ratu I c.1570-1649; Panembahan Girilaya 1649-1662; sesudah itu terpecah menjadi cabang keraton, sehingga tidak ada lagi satu daftar linear.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Ricklefs; de Graaf-Pigeaud; studi Cirebon. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Cirebon membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Cirebon dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Cirebon perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

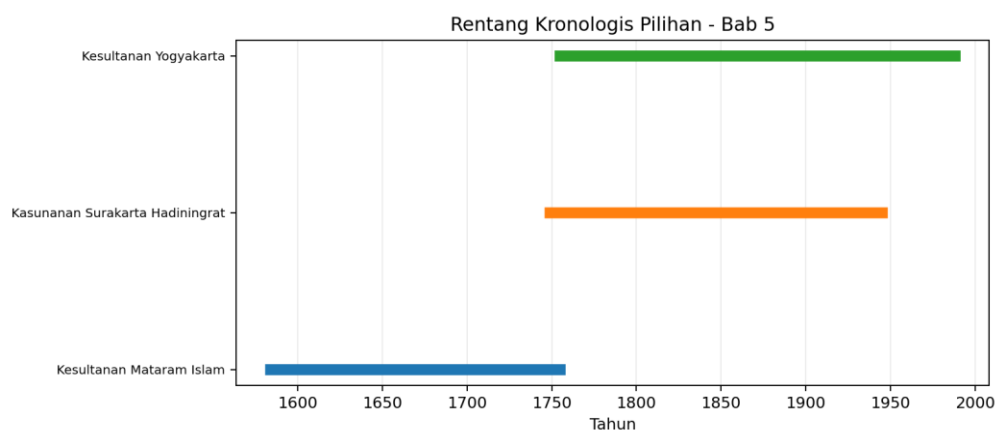
Warisan Kesultanan Cirebon bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

BAB V - MATARAM ISLAM DAN NEGARA-NEGARA PENERUSNYA

Mataram Islam memindahkan pusat gravitasi politik Jawa dari pesisir ke pedalaman agraris. Surplus beras, sistem penguasaan desa, mobilisasi pasukan, dan legitimasi keraton memungkinkan ekspansi luas pada masa Sultan Agung. Namun integrasi wilayah yang besar juga menciptakan masalah logistik dan suksesi.

Krisis abad XVII-XVIII—Trunajaya, perang suksesi Jawa, pemberontakan 1740-an, dan intervensi VOC—mengubah struktur Mataram. Perjanjian Giyanti 1755 tidak sekadar membagi wilayah; ia melahirkan konfigurasi politik baru yang kemudian berkembang menjadi Surakarta dan Yogyakarta, disusul Mangkunegaran dan Pakualaman.

Bab ini juga menekankan bahwa dinasti penerus tidak dapat dinilai hanya sebagai sisa kerajaan lama. Keraton menjadi pusat produksi sastra, seni, pengetahuan, dan ritual. Pada abad XX, Yogyakarta memainkan peran khusus dalam integrasi Republik, sedangkan Surakarta mengalami jalur politik berbeda.



Gambar 12. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 5

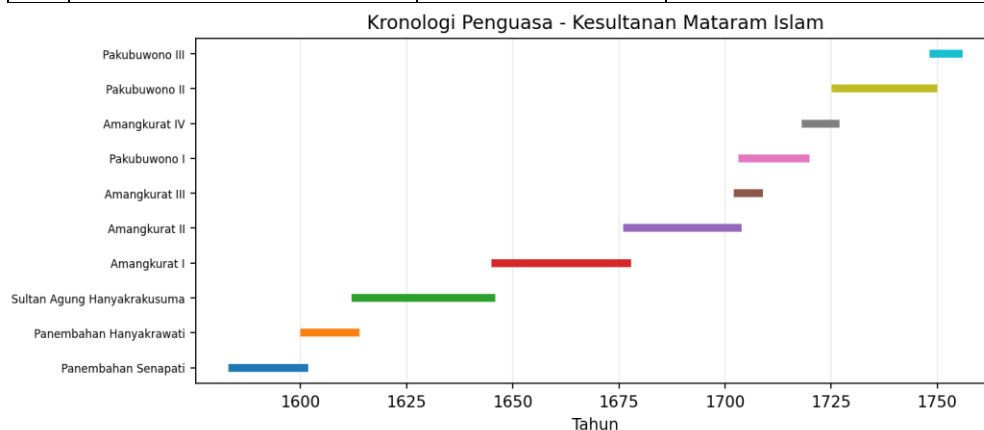
KESULTANAN MATARAM ISLAM

Kesultanan Mataram Islam merupakan studi kasus utama Bab 5. Rentang yang digunakan adalah c.1580-an-1755 sebagai kerajaan terpadu. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat dengan selisih kecil pada awal Senapati.

Tabel 10. Daftar penguasa Kesultanan Mataram Islam

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
-----	----------	-----------------	-------------------

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Panembahan Senapati	c.1584/1586-1601	pendiri Mataram
2	Panembahan Hanyakrawati	1601-1613	konsolidasi
3	Sultan Agung Hanyakrakusuma	1613-1645	puncak ekspansi
4	Amangkurat I	1646-1677	krisis dan pemberontakan Trunajaya
5	Amangkurat II	1677-1703	ketergantungan VOC meningkat
6	Amangkurat III	1703-1708	Perang Suksesi Jawa I
7	Pakubuwono I	1704-1719	rival lalu diakui VOC
8	Amangkurat IV	1719-1726	Perang Suksesi Jawa II
9	Pakubuwono II	1726-1749	krisis 1740-an dan pindah ke Surakarta
10	Pakubuwono III	1749-1755	Giyanti membagi Mataram



Gambar 13. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Mataram Islam

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Mataram Islam berkembang di pedalaman Jawa Tengah dan sebagian besar Jawa dalam rentang c.1580-an-1755 sebagai kerajaan terpadu. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Panembahan Senapati, berakar pada tanah Ki Ageng Pemanahan. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Mataram Islam dapat diringkas sebagai surplus agraria, pajak desa, pasar, serta kontrol pelabuhan pesisir. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Mataram Islam selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008 menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Mataram Islam ditandai oleh sintesis keraton Jawa-Islam, ulama, pesantren, ritual, dan kalender Jawa-Islam. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Mataram Islam, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan

Mataram Islam merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Mataram Islam adalah Panembahan Senapati, berakar pada tanah Ki Ageng Pemanahan. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Mataram Islam, catatan status kronologi adalah: kuat dengan selisih kecil pada awal Senapati. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Mataram Islam berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik.

Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Mataram Islam sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Mataram Islam ialah surplus agraria, pajak desa, pasar, serta kontrol pelabuhan pesisir. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Mataram Islam, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Mataram Islam berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Mataram Islam memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Mataram Islam dapat diringkas sebagai ekspansi Sultan Agung, reformasi kalender 1633, dan hegemoni Jawa. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Mataram Islam berhubungan dengan Trunajaya, perang suksesi, intervensi VOC, utang-kontrak, dan Giyanti 1755. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan

kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Mataram Islam, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Mataram Islam tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Mataram Islam karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Mataram Islam meliputi Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Setiap sumber mempunyai

bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat dengan selisih kecil pada awal Senapati. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Mataram Islam menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Panembahan Senapati (c.1584/1586-1601). pendiri Mataram. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Panembahan Hanyakrawati. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Panembahan Senapati sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Panembahan Hanyakrawati (1601-1613). konsolidasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Panembahan Senapati dan Sultan Agung Hanyakrakusuma. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Panembahan Hanyakrawati sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey

2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645). puncak ekspansi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Panembahan Hanyakrawati dan Amangkurat I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Amangkurat I (1646-1677). krisis dan pemberontakan Trunajaya. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Amangkurat II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Amangkurat I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Amangkurat II (1677-1703). ketergantungan VOC meningkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Amangkurat I dan Amangkurat III. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Amangkurat II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Amangkurat III (1703-1708). Perang Suksesi Jawa I. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Amangkurat II dan Pakubuwono I. Tahun pada tabel berfungsi

sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Amangkurat III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Pakubuwono I (1704-1719). rival lalu diakui VOC. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Amangkurat III dan Amangkurat IV. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Amangkurat IV (1719-1726). Perang Suksesi Jawa II. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono I dan Pakubuwono II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Amangkurat IV sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Pakubuwono II (1726-1749). krisis 1740-an dan pindah ke Surakarta. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Amangkurat IV dan Pakubuwono III. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama

karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Pakubuwono III (1749-1755). Giyanti membagi Mataram. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono II dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Mataram Islam berangkat dari Panembahan Senapati, berakar pada tanah Ki Ageng Pemanahan dan berkembang melalui basis surplus agraria, pajak desa, pasar, serta kontrol pelabuhan pesisir. Islamisasi politiknya ditandai oleh sintesis keraton Jawa-Islam, ulama, pesantren, ritual, dan kalender Jawa-Islam. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah ekspansi Sultan Agung, reformasi kalender 1633, dan hegemoni Jawa. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan Trunajaya, perang suksesi, intervensi VOC, utang-kontrak, dan Giyanti 1755. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Mataram Islam tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik

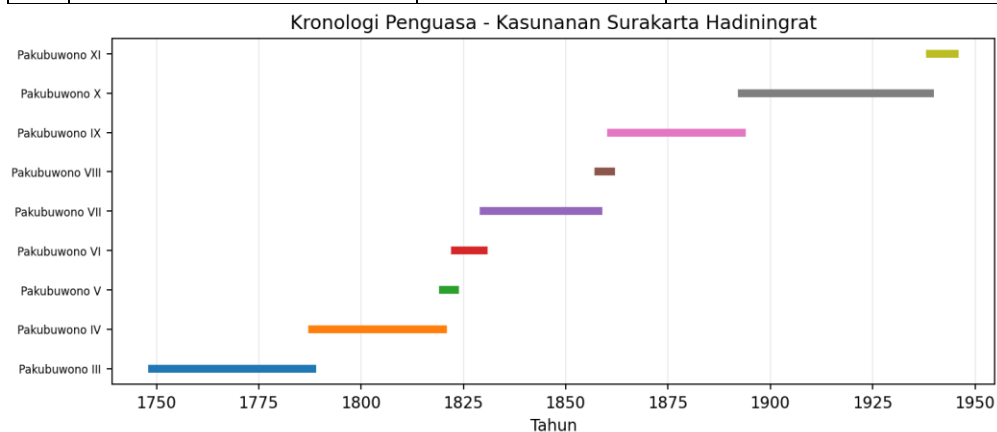
perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT

Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan studi kasus utama Bab 5. Rentang yang digunakan adalah 1745/1755-1945 sebagai kekuasaan politik tradisional. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat.

Tabel 11. Daftar penguasa Kasunanan Surakarta Hadiningrat

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Pakubuwono III	1749-1788	penguasa ketika Giyanti 1755
2	Pakubuwono IV	1788-1820	akhir XVIII-awal XIX
3	Pakubuwono V	1820-1823	masa singkat
4	Pakubuwono VI	1823-1830	era Perang Jawa; kemudian dibuang
5	Pakubuwono VII	1830-1858	pasca-Perang Jawa
6	Pakubuwono VIII	1858-1861	masa singkat
7	Pakubuwono IX	1861-1893	abad XIX
8	Pakubuwono X	1893-1939	modernisasi keraton
9	Pakubuwono XI	1939-1945	pendudukan Jepang dan awal revolusi



Gambar 14. Diagram kronologi penguasa Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kasunanan Surakarta Hadiningrat berkembang di Surakarta, Jawa Tengah dalam rentang 1745/1755-1945 sebagai kekuasaan politik tradisional. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk

memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Pakubuwono II memindahkan keraton 1745; garis pasca-Giyanti melalui Pakubuwono III. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kasunanan Surakarta Hadiningrat dapat diringkas sebagai agraria, tanah lungguh, pasar, dan ekonomi perkebunan Vorstenlanden. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kasunanan Surakarta Hadiningrat selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kasunanan Surakarta Hadiningrat ditandai oleh masjid agung, ulama istana, serat, suluk, dan budaya Jawa-Islam. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah

terus hidup. Pada Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Pakubuwono II memindahkan keraton 1745; garis pasca-Giyanti melalui Pakubuwono III. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kasunanan Surakarta Hadiningrat, catatan status kronologi adalah: kuat. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kasunanan Surakarta Hadiningrat berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah,

pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kasunanan Surakarta Hadiningrat sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kasunanan Surakarta Hadiningrat ialah agraria, tanah lungguh, pasar, dan ekonomi perkebunan Vorstenlanden. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kasunanan Surakarta Hadiningrat, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kasunanan Surakarta Hadiningrat berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kasunanan Surakarta Hadiningrat memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kasunanan Surakarta Hadiningrat dapat diringkas sebagai pengembangan kebudayaan, sastra, seni, dan modernisasi keraton. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada

masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kasunanan Surakarta Hadiningrat berhubungan dengan kedaulatan menyusut dalam kontrak kolonial; status politik khusus tidak bertahan sesudah revolusi. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kasunanan Surakarta Hadiningrat, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kasunanan Surakarta Hadiningrat karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kasunanan Surakarta Hadiningrat meliputi Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kasunanan Surakarta Hadiningrat menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Pakubuwono III (1749-1788). penguasa ketika Giyanti 1755. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Pakubuwono IV. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Pakubuwono IV (1788-1820). akhir XVIII-awal XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono III dan Pakubuwono V. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono IV sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Pakubuwono V (1820-1823). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono IV dan Pakubuwono VI. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono V sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Pakubuwono VI (1823-1830). era Perang Jawa; kemudian dibuang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono V dan Pakubuwono VII. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono VI sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Pakubuwono VII (1830-1858). pasca-Perang Jawa. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono VI dan Pakubuwono VIII. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono VII sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama

karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Pakubuwono VIII (1858-1861). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono VII dan Pakubuwono IX. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono VIII sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Pakubuwono IX (1861-1893). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono VIII dan Pakubuwono X. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono IX sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Pakubuwono X (1893-1939). modernisasi keraton. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono IX dan Pakubuwono XI. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono X sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Pakubuwono XI (1939-1945). pendudukan Jepang dan awal revolusi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pakubuwono X dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis.

Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pakubuwono XI sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kasunanan Surakarta Hadiningrat berangkat dari Pakubuwono II memindahkan keraton 1745; garis pasca-Giyanti melalui Pakubuwono III dan berkembang melalui basis agraria, tanah lungguh, pasar, dan ekonomi perkebunan Vorstenlanden. Islamisasi politiknya ditandai oleh masjid agung, ulama istana, serat, suluk, dan budaya Jawa-Islam. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah pengembangan kebudayaan, sastra, seni, dan modernisasi keraton. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan kedaulatan menyusut dalam kontrak kolonial; status politik khusus tidak bertahan sesudah revolusi. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

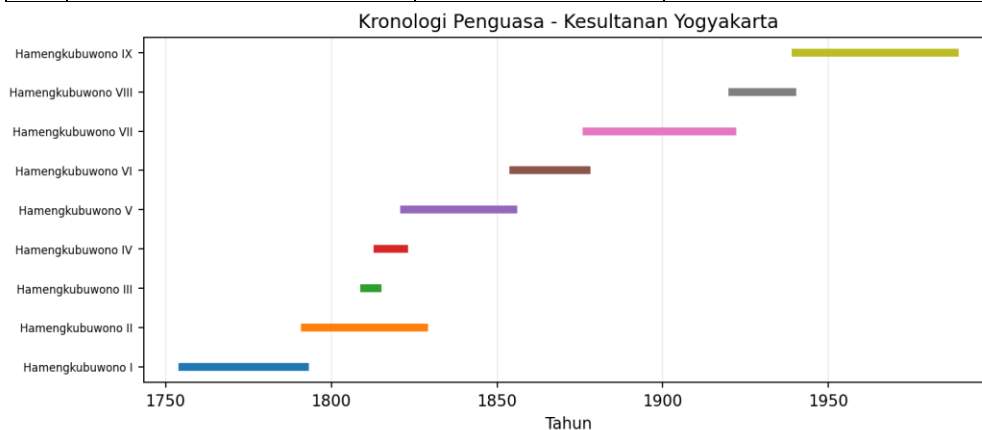
Warisan Kasunanan Surakarta Hadiningrat tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN YOGYAKARTA

Kesultanan Yogyakarta merupakan studi kasus utama Bab 5. Rentang yang digunakan adalah 1755-sekarang; fokus politik sampai integrasi Republik. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat.

Tabel 12. Daftar penguasa Kesultanan Yogyakarta

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Hamengkubuwono I	1755-1792	pendiri
2	Hamengkubuwono II	1792-1810; 1811-1812; 1826-1828	beberapa kali dipulihkan
3	Hamengkubuwono III	1810-1811; 1812-1814	pemerintahan terputus
4	Hamengkubuwono IV	1814-1822	awal abad XIX
5	Hamengkubuwono V	1822-1826; 1828-1855	terputus Perang Jawa
6	Hamengkubuwono VI	1855-1877	abad XIX
7	Hamengkubuwono VII	1877-1921	modernisasi ekonomi-sosial
8	Hamengkubuwono VIII	1921-1939	awal abad XX
9	Hamengkubuwono IX	1940-1988	dukungan Republik; fokus politik buku 1940-1949

**Gambar 15. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Yogyakarta**

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Yogyakarta berkembang di Yogyakarta dan Mataram bagian selatan dalam rentang 1755-sekarang; fokus politik sampai integrasi Republik. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Hamengkubuwono I/Pangeran Mangkubumi melalui Giyanti 1755. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Yogyakarta dapat diringkas sebagai agraria, pajak, kerajinan, pasar, dan ekonomi Vorstenlanden. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Yogyakarta selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Yogyakarta ditandai oleh keraton, Masjid Gedhe, ulama, pesantren, dan ritual Jawa-Islam. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Yogyakarta, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan

Yogyakarta merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Yogyakarta adalah Hamengkubuwono I/Pangeran Mangkubumi melalui Giyanti 1755. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Yogyakarta, catatan status kronologi adalah: kuat. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Yogyakarta berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik.

Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Yogyakarta sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Yogyakarta ialah agraria, pajak, kerajinan, pasar, dan ekonomi Vorstenlanden. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Yogyakarta, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Yogyakarta berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Yogyakarta memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Yogyakarta dapat diringkas sebagai pembentukan negara baru, kebudayaan keraton, dan dukungan HB IX kepada Republik. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Yogyakarta berhubungan dengan bukan runtuh; kedaulatan tradisional berubah dan berintegrasi ke Republik Indonesia. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut

pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Yogyakarta, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Yogyakarta tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Yogyakarta karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Yogyakarta meliputi Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan

perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Yogyakarta menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Hamengkubuwono I (1755-1792). pendiri. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Hamengkubuwono II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Hamengkubuwono II (1792-1810; 1811-1812; 1826-1828). beberapa kali dipulihkan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono I dan Hamengkubuwono III. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip

Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Hamengkubuwono III (1810-1811; 1812-1814). pemerintahan terputus. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono II dan Hamengkubuwono IV. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono III sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Hamengkubuwono IV (1814-1822). awal abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono III dan Hamengkubuwono V. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono IV sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Hamengkubuwono V (1822-1826; 1828-1855). terputus Perang Jawa. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono IV dan Hamengkubuwono VI. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono V sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Hamengkubuwono VI (1855-1877). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono V dan Hamengkubuwono VII. Tahun pada tabel

berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono VI sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Hamengkubuwono VII (1877-1921). modernisasi ekonomi-sosial. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono VI dan Hamengkubuwono VIII. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono VII sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Hamengkubuwono VIII (1921-1939). awal abad XX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono VII dan Hamengkubuwono IX. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono VIII sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Hamengkubuwono IX (1940-1988). dukungan Republik; fokus politik buku 1940-1949. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamengkubuwono VIII dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamengkubuwono IX sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada

kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Yogyakarta berangkat dari Hamengkubuwono I/Pangeran Mangkubumi melalui Giyanti 1755 dan berkembang melalui basis agraria, pajak, kerajinan, pasar, dan ekonomi Vorstenlanden. Islamisasi politiknya ditandai oleh keraton, Masjid Gedhe, ulama, pesantren, dan ritual Jawa-Islam. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah pembentukan negara baru, kebudayaan keraton, dan dukungan HB IX kepada Republik. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan bukan runtuh; kedaulatan tradisional berubah dan berintegrasi ke Republik Indonesia. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Yogyakarta tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KADIPATEN MANGKUNEGARAN

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kadipaten Mangkunegaran ditempatkan dalam konteks Surakarta. MN I 1757-1795; II 1796-1835; III 1835-1853; IV 1853-1881; V 1881-1896; VI 1896-1916; VII 1916-1944; VIII sejak 1944.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Ricklefs; studi Vorstenlanden dan Mangkunegaran. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman.

Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kadipaten Mangkunegaran membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kadipaten Mangkunegaran dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kadipaten Mangkunegaran perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kadipaten Mangkunegaran bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

KADIPATEN PAKUALAMAN

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kadipaten Pakualaman ditempatkan dalam konteks Yogyakarta. PA I 1813-1829; II 1829-1858; III 1858-1864; IV 1864-1878; V 1878-1900; VI 1901-1902; VII 1903-1938; VIII sejak 1937/38.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Carey; Ricklefs; arsip Yogyakarta. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kadipaten Pakualaman membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kadipaten Pakualaman dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kadipaten Pakualaman perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber

yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

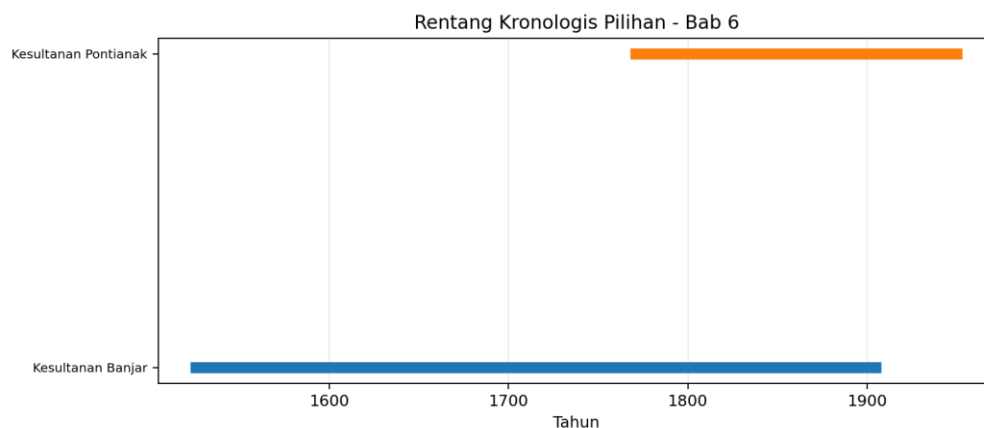
Warisan Kadipaten Pakualaman bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

BAB VI - KALIMANTAN: KERAJAAN SUNGAI, PELABUHAN, DAN KESULTANAN

Kalimantan memperlihatkan pola kerajaan yang sangat dipengaruhi sungai. Barito-Martapura, Kapuas, Mahakam, dan jaringan sungai lain berfungsi sebagai jalan utama dari pesisir menuju daerah produksi. Kesultanan mengendalikan titik strategis, tetapi kedaulatan terhadap pedalaman sering berbentuk jaringan upeti dan aliansi, bukan batas teritorial modern.

Banjar dan Pontianak menjadi studi utama karena keduanya mempunyai kronologi politik yang relatif dapat disusun. Sambas dan Kutai Kartanegara dibahas sebagai survei pelengkap dengan penekanan pada masalah kronologi dan perubahan institusional. Perdagangan lada, emas, hasil hutan, dan akses sungai menjadi variabel utama ekonomi politik.

Campur tangan kolonial berkembang melalui kontrak, penetapan sultan, penguasaan perdagangan, dan akhirnya administrasi teritorial. Perang Banjar menunjukkan bagaimana konflik suksesi dapat berubah menjadi perlawanan panjang ketika legitimasi lokal dan intervensi kolonial bertemu.



Gambar 16. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 6

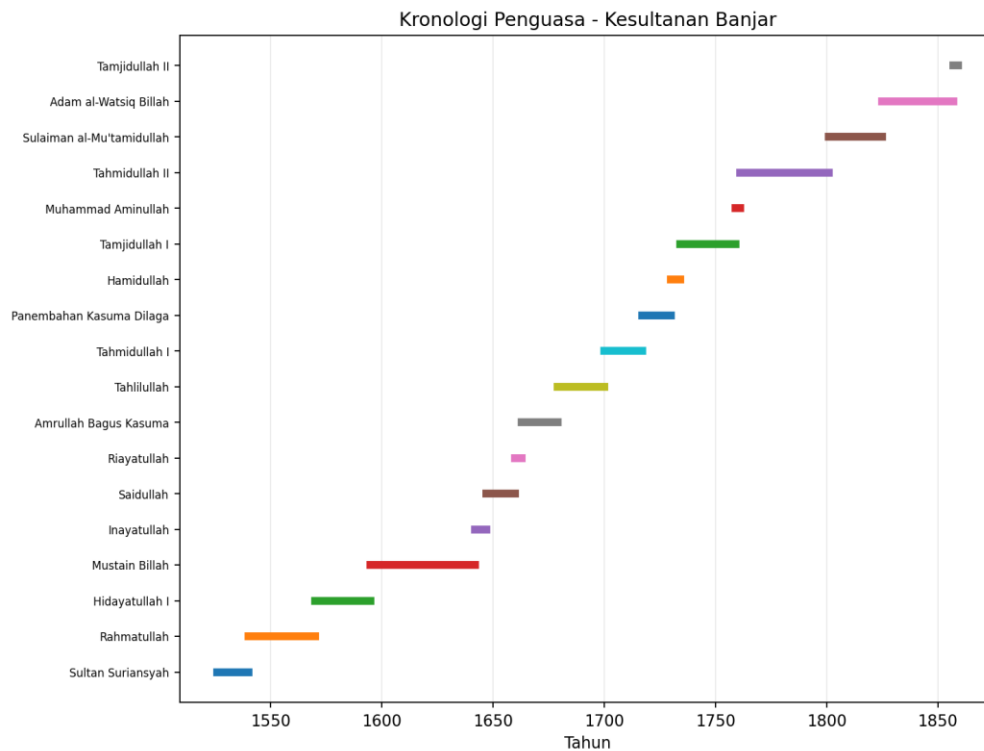
KESULTANAN BANJAR

Kesultanan Banjar merupakan studi kasus utama Bab 6. Rentang yang digunakan adalah c.1526-1860 resmi; perlawanan dinasti hingga 1905. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: cukup kuat; abad XVII-XVIII memiliki varian/tumpang tindih.

Tabel 13. Daftar penguasa Kesultanan Banjar

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
-----	----------	-----------------	-------------------

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Sultan Suriansyah	c.1526-1540	sultan pertama
2	Rahmatullah	1540-1570	suksesi
3	Hidayatullah I	1570-1595	akhir abad XVI
4	Mustain Billah	1595-1642	awal abad XVII
5	Inayatullah	1642-1647	abad XVII
6	Saidullah	1647-1660	abad XVII
7	Riayatullah	1660-1663	fase suksesi
8	Amrullah Bagus Kasuma	c.1663-1679	kronologi bertumpang tindih
9	Tahlilullah	1679-1700	akhir XVII
10	Tahmidullah I	c.1700-1717	varian lokal
11	Panembahan Kasuma Dilaga	c.1717-1730	fase transisi
12	Hamidullah	c.1730-1734	masa singkat
13	Tamjidullah I	1734-1759	abad XVIII
14	Muhammad Aminullah	1759-1761	masa singkat
15	Tahmidullah II	1761-1801	akhir XVIII
16	Sulaiman al-Mu'tamidullah	1801-1825	awal XIX
17	Adam al-Watsiq Billah	1825-1857	masa panjang
18	Tamjidullah II	1857-1859	krisis suksesi
19	Hidayatullah II	1859-1862	perlawanan; penghapusan resmi 1860
20	Pangeran Antasari	1862	diproklamasikan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin
21	Muhammad Seman	1862-1905	melanjutkan perlawanan dinasti



Gambar 17. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Banjar

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Banjar berkembang di Kalimantan Selatan dalam rentang c.1526-1860 resmi; perlawanan dinasti hingga 1905. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Sultan Suriansyah dalam tradisi Banjar. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Banjar dapat diringkas sebagai lada, hasil hutan, jalur Barito-Martapura, dan pasar Banjarmasin. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Banjar selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Banjar ditandai oleh konversi dinasti, masjid, ulama Banjar, dan tradisi al-Banjari. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Banjar, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Banjar merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Banjar adalah Sultan Suriansyah dalam tradisi Banjar. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau

kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Banjar, catatan status kronologi adalah: cukup kuat; abad XVII-XVIII memiliki varian/tumpang tindih. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Banjar berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Banjar sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Banjar ialah lada, hasil hutan, jalur Barito-Martapura, dan pasar Banjarmasin. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Banjar, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Banjar berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah

Kesultanan Banjar memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Banjar dapat diringkas sebagai integrasi sungai, perdagangan lada, perkembangan ulama, dan perlawanan kolonial. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Banjar berhubungan dengan konflik suksesi, perjanjian-intervensi Belanda, penghapusan 1860, dan Perang Banjar. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Banjar, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Banjar tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Banjar karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Banjar meliputi Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: cukup kuat; abad XVII-XVIII memiliki varian/tumpang tindih. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu

membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Banjar menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Sultan Suriansyah (c.1526-1540). sultan pertama. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Rahmatullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Suriansyah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Rahmatullah (1540-1570). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Suriansyah dan Hidayatullah I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Rahmatullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Hidayatullah I (1570-1595). akhir abad XVI. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Rahmatullah dan Mustain Billah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hidayatullah I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang,

perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Mustain Billah (1595-1642). awal abad XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hidayatullah I dan Inayatullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mustain Billah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Inayatullah (1642-1647). abad XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mustain Billah dan Saidullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Inayatullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Saidullah (1647-1660). abad XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Inayatullah dan Riayatullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Saidullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Riayatullah (1660-1663). fase suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Saidullah dan Amrullah Bagus Kasuma. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau

pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Riayatullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Amrullah Bagus Kasuma (c.1663-1679). kronologi bertumpang tindih. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Riayatullah dan Tahlilullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Amrullah Bagus Kasuma sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Tahlilullah (1679-1700). akhir XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Amrullah Bagus Kasuma dan Tahmidullah I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Tahlilullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Tahmidullah I (c.1700-1717). varian lokal. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Tahlilullah dan Panembahan Kasuma Dilaga. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Tahmidullah I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti

menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Panembahan Kasuma Dilaga (c.1717-1730). fase transisi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Tahmidullah I dan Hamidullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Panembahan Kasuma Dilaga sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Hamidullah (c.1730-1734). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Panembahan Kasuma Dilaga dan Tamjidullah I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamidullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

13. Tamjidullah I (1734-1759). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamidullah dan Muhammad Aminullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Tamjidullah I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

14. Muhammad Aminullah (1759-1761). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Tamjidullah I dan Tahmidullah II. Tahun pada tabel berfungsi

sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Aminullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

15. Tahmidullah II (1761-1801). akhir XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Aminullah dan Sulaiman al-Mu'tamidullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Tahmidullah II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

16. Sulaiman al-Mu'tamidullah (1801-1825). awal XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Tahmidullah II dan Adam al-Watsiq Billah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sulaiman al-Mu'tamidullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

17. Adam al-Watsiq Billah (1825-1857). masa panjang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sulaiman al-Mu'tamidullah dan Tamjidullah II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Adam al-Watsiq Billah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama

karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

18. Tamjidullah II (1857-1859). krisis suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Adam al-Watsiq Billah dan Hidayatullah II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Tamjidullah II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

19. Hidayatullah II (1859-1862). perlawanan; penghapusan resmi 1860. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Tamjidullah II dan Pangeran Antasari. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hidayatullah II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

20. Pangeran Antasari (1862). diproklamasikan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hidayatullah II dan Muhammad Seman. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Pangeran Antasari sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

21. Muhammad Seman (1862-1905). melanjutkan perlawanan dinasti. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Pangeran Antasari dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Seman sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Banjar berangkat dari Sultan Suriansyah dalam tradisi Banjar dan berkembang melalui basis lada, hasil hutan, jalur Barito-Martapura, dan pasar Banjarmasin. Islamisasi politiknya ditandai oleh konversi dinasti, masjid, ulama Banjar, dan tradisi al-Banjari. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah integrasi sungai, perdagangan lada, perkembangan ulama, dan perlawanan kolonial. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan konflik suksesi, perjanjian-intervensi Belanda, penghapusan 1860, dan Perang Banjar. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Banjar tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

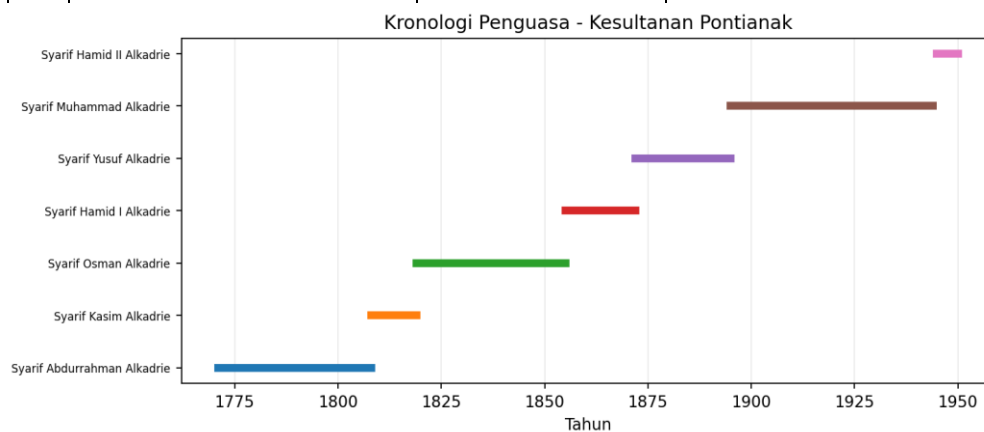
KESULTANAN PONTIANAK

Kesultanan Pontianak merupakan studi kasus utama Bab 6. Rentang yang digunakan adalah 1771-1950 dalam berbagai tingkat kedaulatan. Fokus

pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat.

Tabel 14. Daftar penguasa Kesultanan Pontianak

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Syarif Abdurrahman Alkadrie	1771-1808	pendiri
2	Syarif Kasim Alkadrie	1808-1819	suksesi
3	Syarif Osman Alkadrie	1819-1855	abad XIX
4	Syarif Hamid I Alkadrie	1855-1872	abad XIX
5	Syarif Yusuf Alkadrie	1872-1895	akhir XIX
6	Syarif Muhammad Alkadrie	1895-1944	wafat pada masa pendudukan Jepang
7	Syarif Hamid II Alkadrie	1945-1950	fase akhir kerajaan politik



Gambar 18. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Pontianak

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Pontianak berkembang di Kalimantan Barat, muara Kapuas dalam rentang 1771-1950 dalam berbagai tingkat kedaulatan. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Syarif Abdurrahman Alkadrie. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Pontianak dapat diringkas sebagai perdagangan sungai, hasil hutan, emas kawasan hulu, dan pelabuhan Kapuas. Sumber daya

tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Pontianak selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Pontianak ditandai oleh dinasti Al-Qadrie, jaringan sayyid, masjid, dan patronase Islam kota. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Pontianak, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan

Pontianak merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Pontianak adalah Syarif Abdurrahman Alkadrie. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Pontianak, catatan status kronologi adalah: kuat. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Pontianak berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Pontianak sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Pontianak ialah perdagangan sungai, hasil hutan, emas kawasan hulu, dan pelabuhan Kapuas. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Pontianak, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Pontianak berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan

masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Pontianak memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Pontianak dapat diringkas sebagai pendirian Pontianak dan pertumbuhan sebagai pusat dagang Kapuas. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Pontianak berhubungan dengan kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi ke Indonesia. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau

masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Pontianak, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Pontianak tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggung membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Pontianak karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Pontianak meliputi Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Pontianak menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Syarif Abdurrahman Alkadrie (1771-1808). pendiri. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Syarif Kasim Alkadrie. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Abdurrahman Alkadrie sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.
2. Syarif Kasim Alkadrie (1808-1819). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Abdurrahman Alkadrie dan Syarif Osman Alkadrie. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Kasim Alkadrie sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.
3. Syarif Osman Alkadrie (1819-1855). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Kasim Alkadrie dan Syarif Hamid I Alkadrie. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan

varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Osman Alkadrie sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Syarif Hamid I Alkadrie (1855-1872). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Osman Alkadrie dan Syarif Yusuf Alkadrie. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Hamid I Alkadrie sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Syarif Yusuf Alkadrie (1872-1895). akhir XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Hamid I Alkadrie dan Syarif Muhammad Alkadrie. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Yusuf Alkadrie sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Syarif Muhammad Alkadrie (1895-1944). wafat pada masa pendudukan Jepang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Yusuf Alkadrie dan Syarif Hamid II Alkadrie. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Muhammad Alkadrie sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan,

perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Syarif Hamid II Alkadrie (1945-1950). fase akhir kerajaan politik. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syarif Muhammad Alkadrie dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syarif Hamid II Alkadrie sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Pontianak berangkat dari Syarif Abdurrahman Alkadrie dan berkembang melalui basis perdagangan sungai, hasil hutan, emas kawasan hulu, dan pelabuhan Kapuas. Islamisasi politiknya ditandai oleh dinasti Al-Qadrie, jaringan sayyid, masjid, dan patronase Islam kota. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah pendirian Pontianak dan pertumbuhan sebagai pusat dagang Kapuas. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi ke Indonesia. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Pontianak tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu

terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN SAMBAS

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Sambas ditempatkan dalam konteks Kalimantan Barat. Muhammad Shafiuddin I 1671-1688 hingga Muhammad Ibrahim Shafiuddin 1931-1944; terdapat interregnum dalam beberapa daftar lokal.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi studi Sambas; arsip kolonial; sejarah Kalimantan Barat. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Sambas membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Sambas dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Sambas perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan,

memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kesultanan Sambas bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Kutai Kartanegara ditempatkan dalam konteks Kalimantan Timur. Islamisasi dinasti dikaitkan dengan Aji Raja Mahkota Mulia Alam abad XVI; tarikh awal salasilah berbeda. Penguasa penting kemudian termasuk Aji Muhammad Sulaiman dan Aji Muhammad Parikesit.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Salasilah Kutai secara kritis; studi Kalimantan Timur. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Kutai Kartanegara membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Kutai Kartanegara dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru

pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Kutai Kartanegara perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

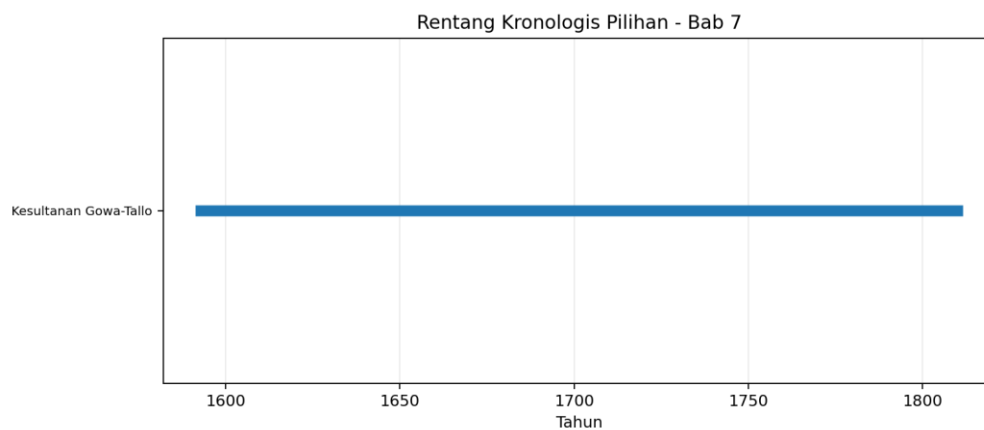
Warisan Kesultanan Kutai Kartanegara bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

BAB VII - SULAWESI: GOWA-TALLO, BONE, BUTON, DAN JARINGAN BUGIS-MAKASSAR

Sulawesi Selatan dan Tenggara mempunyai tradisi tulis lokal yang penting, termasuk lontara. Gowa-Tallo menerima Islam pada awal abad XVII dan mengembangkan Makassar sebagai pelabuhan bebas. Bone, Buton, dan kerajaan lain merespons perubahan itu melalui kombinasi perang, aliansi, konversi, dan diplomasi.

Perang Makassar dan Perjanjian Bungaya tidak dapat dipahami sebagai duel dua pihak. VOC bersekutu dengan Arung Palakka dan kekuatan Bugis; Gowa memiliki jaringan sekutu sendiri. Politik koalisi lokal menjadi unsur penting keberhasilan VOC membatasi Makassar.

Setelah perang, diaspora Bugis-Makassar justru memperluas jaringan politik dan ekonomi ke berbagai wilayah Nusantara. Mobilitas ini berpengaruh pada Riau, Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan pulau-pulau lain. Kekalahan satu pusat tidak berarti hilangnya kapasitas masyarakatnya.



Gambar 19. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 7

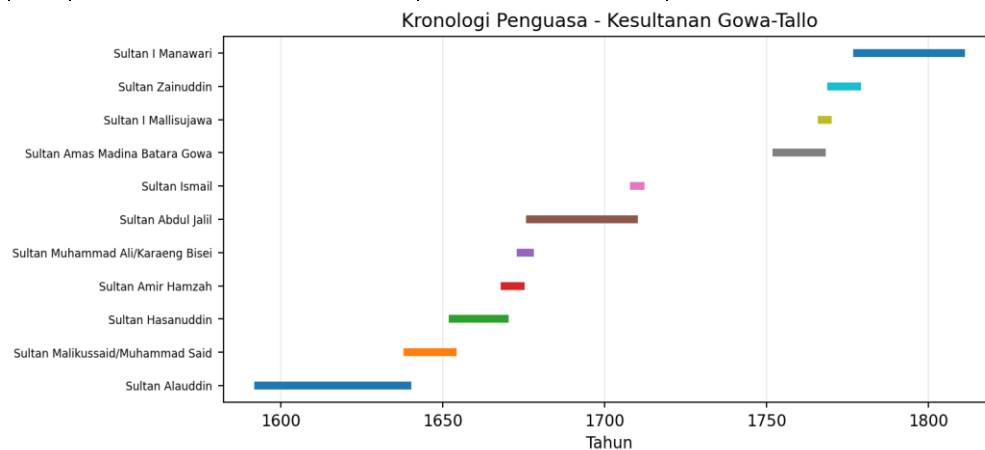
KESULTANAN GOWA-TALLO

Kesultanan Gowa-Tallo merupakan studi kasus utama Bab 7. Rentang yang digunakan adalah Islam resmi 1605; kerajaan berlanjut sesudahnya. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat untuk abad XVII; kronologi kemudian lebih variatif.

Tabel 15. Daftar penguasa Kesultanan Gowa-Tallo

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
-----	----------	-----------------	-------------------

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Sultan Alauddin	1593-1639; Islam resmi 1605	penguasa Gowa yang menerima Islam
2	Sultan Malikussaid/Muhammad Said	1639-1653	pelabuhan bebas Makassar
3	Sultan Hasanuddin	1653-1669	perang VOC dan Bongaya
4	Sultan Amir Hamzah	1669-1674	pasca-Perang Makassar
5	Sultan Muhammad Ali/Karaeng Bisei	1674-1677	suksesi
6	Sultan Abdul Jalil	1677-1709	masa panjang pasca-Bongaya
7	Sultan Ismail	1709-1711	awal XVIII
8	Sultan Sirajuddin	awal abad XVIII	tarikh lokal bervariasi
9	Sultan Amas Madina Batara Gowa	1753-1767	abad XVIII
10	Sultan I Mallisujawa	1767-1769	masa singkat
11	Sultan Zainuddin	1770-1778	abad XVIII
12	Sultan I Manawari	1778-1810	akhir XVIII-awal XIX



Gambar 20. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Gowa-Tallo

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Gowa-Tallo berkembang di Sulawesi Selatan dalam rentang Islam resmi 1605; kerajaan berlanjut sesudahnya. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah kerajaan lebih tua; Islam diterima Sultan

Alauddin dan Karaeng Matoaya pada awal XVII. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Gowa-Tallo dapat diringkas sebagai pelabuhan Makassar, beras, perdagangan transit rempah, tekstil, dan pelayaran. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Gowa-Tallo selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008 menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Gowa-Tallo ditandai oleh konversi istana 1605 dan ekspansi Islam ke kerajaan Bugis. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Gowa-Tallo, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Gowa-Tallo merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Gowa-Tallo adalah kerajaan lebih tua; Islam diterima Sultan Alauddin dan Karaeng Matoaya pada awal XVII. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Gowa-Tallo, catatan status kronologi adalah: kuat untuk abad XVII; kronologi kemudian lebih variatif. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Gowa-Tallo berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting;

dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Gowa-Tallo sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Gowa-Tallo ialah pelabuhan Makassar, beras, perdagangan transit rempah, tekstil, dan pelayaran. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Gowa-Tallo, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Gowa-Tallo berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Gowa-Tallo memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Gowa-Tallo dapat diringkas sebagai Makassar sebagai pelabuhan bebas dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada

masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Gowa-Tallo berhubungan dengan Perang Makassar, aliansi VOC-Bone, Bongaya, dan hilangnya hegemoni dagang. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Gowa-Tallo, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Gowa-Tallo tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan

negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Gowa-Tallo karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Gowa-Tallo meliputi Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat untuk abad XVII; kronologi kemudian lebih variatif. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Gowa-Tallo menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Sultan Alauddin (1593-1639; Islam resmi 1605). penguasa Gowa yang menerima Islam. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Sultan Malikussaid/Muhammad Said. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Alauddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Sultan Malikussaid/Muhammad Said (1639-1653). pelabuhan bebas Makassar. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Malikussaid/Muhammad Said sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Sultan Hasanuddin (1653-1669). perang VOC dan Bongaya. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Malikussaid/Muhammad Said dan Sultan Amir Hamzah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Hasanuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Sultan Amir Hamzah (1669-1674). pasca-Perang Makassar. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Hasanuddin dan Sultan Muhammad Ali/Karaeng Bisei. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Amir Hamzah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Sultan Muhammad Ali/Karaeng Bisei (1674-1677). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Amir Hamzah dan Sultan Abdul Jalil. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap

pemerintahan Sultan Muhammad Ali/Karaeng Bisei sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Sultan Abdul Jalil (1677-1709). masa panjang pasca-Bongaya. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Muhammad Ali/Karaeng Bisei dan Sultan Ismail. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Abdul Jalil sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Sultan Ismail (1709-1711). awal XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Abdul Jalil dan Sultan Sirajuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Ismail sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Sultan Sirajuddin (awal abad XVIII). tarikh lokal bervariasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Ismail dan Sultan Amas Madina Batara Gowa. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Sirajuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs

2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Sultan Amas Madina Batara Gowa (1753-1767). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Sirajuddin dan Sultan I Mallisujawa. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Amas Madina Batara Gowa sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Sultan I Mallisujawa (1767-1769). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Amas Madina Batara Gowa dan Sultan Zainuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan I Mallisujawa sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Sultan Zainuddin (1770-1778). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan I Mallisujawa dan Sultan I Manawari. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan Zainuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Sultan I Manawari (1778-1810). akhir XVIII-awal XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sultan Zainuddin dan fase akhir kronologi yang dibahas.

Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sultan I Manawari sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Gowa-Tallo berangkat dari kerajaan lebih tua; Islam diterima Sultan Alauddin dan Karaeng Matoaya pada awal XVII dan berkembang melalui basis pelabuhan Makassar, beras, perdagangan transit rempah, tekstil, dan pelayaran. Islamisasi politiknya ditandai oleh konversi istana 1605 dan ekspansi Islam ke kerajaan Bugis. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah Makassar sebagai pelabuhan bebas dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan Perang Makassar, aliansi VOC-Bone, Bongaya, dan hilangnya hegemoni dagang. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Gowa-Tallo tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN BONE

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Bone ditempatkan dalam konteks Sulawesi Selatan. Kerajaan pra-Islam; Islam awal XVII. Arung Palakka 1672-1696 dan La Patau 1696-1714 sangat penting; seri lengkap berbeda transliterasi dalam lontara.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Andaya 1981; Pelras 1996; lontara Bone. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Bone membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Bone dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Bone perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber

yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kesultanan Bone bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

KESULTANAN BUTON

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Buton ditempatkan dalam konteks Sulawesi Tenggara. Sultan Murhum/Lakilaponto sebagai sultan pertama sekitar pertengahan XVI; Dayanu Ikhsanuddin penting bagi ketatanegaraan. Tarikh awal berbeda tajam antartradisi.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Susanto Zuhdi; Schoorl; tradisi/naskah Wolio. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Buton membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Buton dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Buton perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

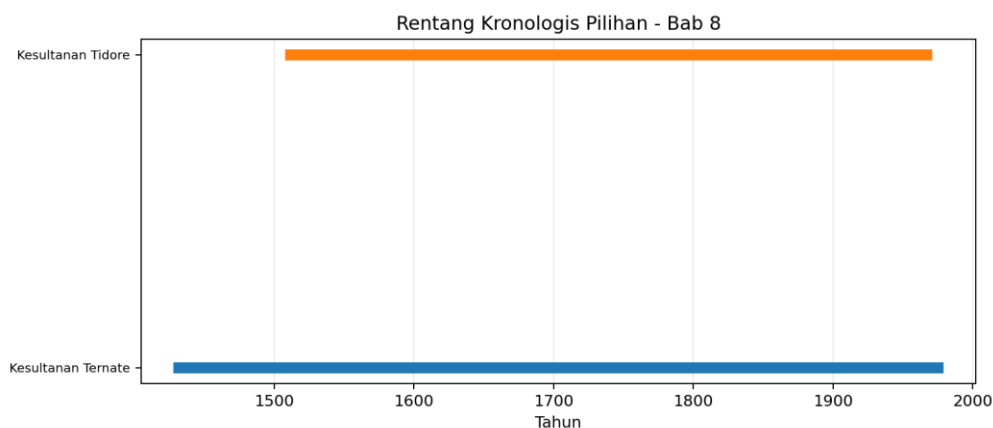
Warisan Kesultanan Buton bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

BAB VIII - MALUKU: TERNATE, TIDORE, DAN POLITIK REMPAH

Maluku merupakan contoh klasik bagaimana komoditas berukuran kecil dapat mengubah politik global. Cengkih Ternate dan Tidore menarik jaringan Asia jauh sebelum kedatangan Eropa. Portugis dan Spanyol kemudian membangun benteng serta aliansi, disusul VOC yang mengembangkan sistem monopoli lebih ketat.

Ternate dan Tidore bukan sekadar pihak yang bereaksi terhadap Eropa. Keduanya memiliki persaingan dan jaringan wilayah sendiri. Sultan Khairun dan Baabullah di Ternate, serta Nuku di Tidore, menunjukkan kapasitas politik lokal membangun koalisi dan memanfaatkan konflik antar-kekuatan.

Kronologi Maluku menuntut perhatian pada nama dan gelar yang berubah dalam sumber Portugis, Spanyol, Belanda, dan lokal. Beberapa daftar populer menyederhanakan masa pemerintahan; karena itu tabel dalam buku memberi catatan pada titik yang memerlukan verifikasi lintas sumber.



Gambar 21. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 8

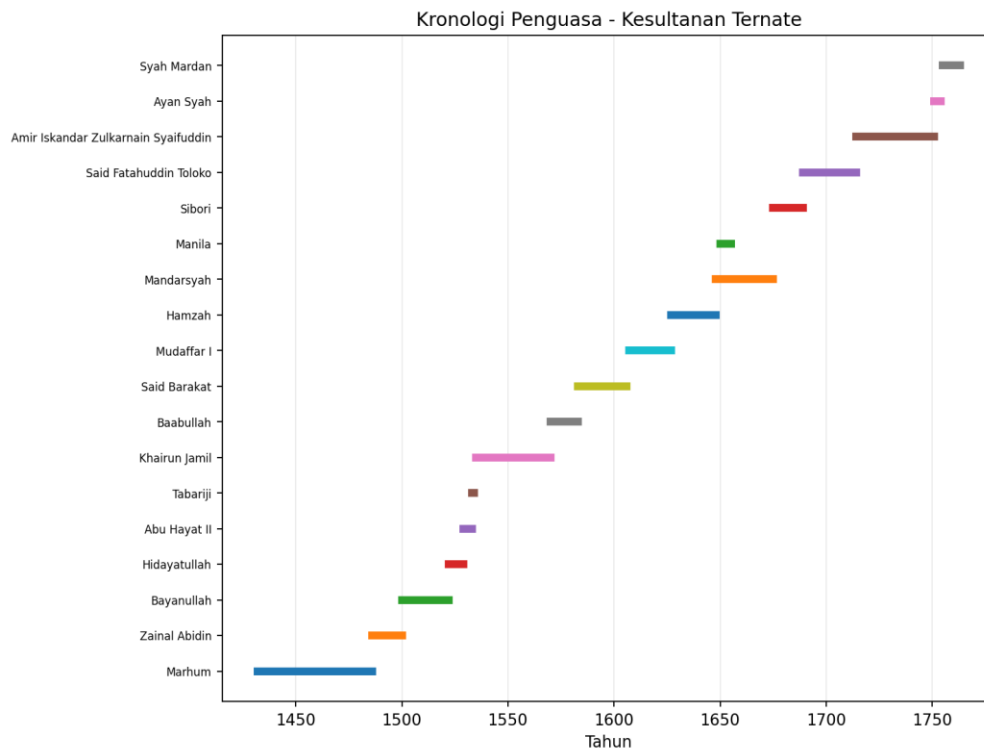
KESULTANAN TERNATE

Kesultanan Ternate merupakan studi kasus utama Bab 8. Rentang yang digunakan adalah kesultanan sejak akhir abad XV hingga integrasi Indonesia. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat untuk urutan utama; transliterasi nama bervariasi.

Tabel 16. Daftar penguasa Kesultanan Ternate

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Marhum	1432-1486	fase awal
2	Zainal Abidin	1486-1500	memperkuat Islamisasi

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
3	Bayanullah	1500-1522	awal kontak Portugis
4	Hidayatullah	1522-1529	suksesi
5	Abu Hayat II	1529-1533	konflik Portugis
6	Tabariji	1533-1534	diasingkan Portugis
7	Khairun Jamil	1535-1570	dibunuh Portugis
8	Baabullah	1570-1583	mengusir Portugis 1575
9	Said Barakat	1583-1606	konflik Spanyol
10	Mudaffar I	1607-1627	awal dominasi VOC
11	Hamzah	1627-1648	abad XVII
12	Mandarsyah	1648-1650; 1655-1675	dua masa pemerintahan
13	Manila	1650-1655	interupsi
14	Sibori	1675-1689	kontrol VOC menguat
15	Said Fatahuddin Toloko	1689-1714	akhir XVII-awal XVIII
16	Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin	1714-1751	abad XVIII
17	Ayan Syah	1751-1754	suksesi
18	Syah Mardan	1755-1763	abad XVIII
19	Jalaluddin Kaicili Zadekron	1763-1774	abad XVIII
20	Harunsyah	1774-1781	abad XVIII
21	Aharal	1781-1796	akhir XVIII
22	Sarkan	1796-1801	transisi
23	Muhammad Yasin	1801-1807	awal XIX
24	Muhammad Ali	1807-1821	abad XIX
25	Sarmoli van der Parra	1821-1823	fase singkat
26	Muhammad Zain	1823-1859	masa panjang
27	Muhammad Arsyad	1859-1876	abad XIX
28	Ayanhar	1879-1900	akhir XIX
29	Muhammad Ilham	1900-1902	masa singkat
30	Haji Muhammad Usman Syah	1902-1915	awal XX
31	Iskandar Muhammad Djabir Sjah	1929-1975	fokus politik buku sampai integrasi Indonesia



Gambar 22. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Ternate

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Ternate berkembang di Maluku Utara dalam rentang kesultanan sejak akhir abad XV hingga integrasi Indonesia. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah kerajaan lebih tua; Zainal Abidin 1486-1500 memperkuat Islamisasi dinasti. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Ternate dapat diringkas sebagai cengkih, kora-kora, upeti, pelayaran, dan jaringan antarpulau. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Ternate selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Ternate ditandai oleh gelar sultan dan hubungan dengan pusat Islam Nusantara. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Ternate, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Ternate merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Ternate adalah kerajaan lebih tua; Zainal Abidin 1486-1500 memperkuat Islamisasi dinasti. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga

dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Ternate, catatan status kronologi adalah: kuat untuk urutan utama; transliterasi nama bervariasi. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Ternate berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanian, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Ternate sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Ternate ialah cengkih, kora-kora, upeti, pelayaran, dan jaringan antarpulau. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Ternate, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Ternate berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah

Kesultanan Ternate memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Ternate dapat diringkas sebagai Baabullah, pengusiran Portugis 1575, dan jaringan politik luas. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Ternate berhubungan dengan kompetisi Tidore, Portugis-Spanyol, monopoli VOC, ekstirpasi, dan kontrak kolonial. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Ternate, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan

administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Ternate tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Ternate karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Ternate meliputi Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat untuk urutan utama; transliterasi nama bervariasi. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Ternate menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Marhum (1432-1486). fase awal. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Zainal Abidin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Marhum sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Zainal Abidin (1486-1500). memperkuat Islamisasi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Marhum dan Bayanullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Bayanullah (1500-1522). awal kontak Portugis. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zainal Abidin dan Hidayatullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Bayanullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Hidayatullah (1522-1529). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Bayanullah dan Abu Hayat II. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hidayatullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Abu Hayat II (1529-1533). konflik Portugis. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hidayatullah dan Tabariji. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu Hayat II sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Tabariji (1533-1534). diasingkan Portugis. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu Hayat II dan Khairun Jamil. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Tabariji sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Khairun Jamil (1535-1570). dibunuh Portugis. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Tabariji dan Baabullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Khairun Jamil sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang

yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Baabullah (1570-1583). mengusir Portugis 1575. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Khairun Jamil dan Said Barakat. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Baabullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Said Barakat (1583-1606). konflik Spanyol. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Baabullah dan Mudaffar I. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Said Barakat sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Mudaffar I (1607-1627). awal dominasi VOC. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Said Barakat dan Hamzah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mudaffar I sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Hamzah (1627-1648). abad XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mudaffar I dan Mandarsyah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber.

Penilaian terhadap pemerintahan Hamzah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Mandarsyah (1648-1650; 1655-1675). dua masa pemerintahan. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamzah dan Manila. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mandarsyah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

13. Manila (1650-1655). interupsi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mandarsyah dan Sibori. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Manila sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

14. Sibori (1675-1689). kontrol VOC menguat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Manila dan Said Fatahuddin Toloko. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sibori sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

15. Said Fatahuddin Toloko (1689-1714). akhir XVII-awal XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sibori dan Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Said Fatahuddin Toloko sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

16. Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin (1714-1751). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Said Fatahuddin Toloko dan Ayan Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

17. Ayan Syah (1751-1754). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin dan Syah Mardan. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ayan Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

18. Syah Mardan (1755-1763). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ayan Syah dan Jalaluddin Kaicili Zadekron. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Syah Mardan

sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

19. Jalaluddin Kaicili Zadekron (1763-1774). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Syah Mardan dan Harunsyah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Jalaluddin Kaicili Zadekron sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

20. Harunsyah (1774-1781). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Jalaluddin Kaicili Zadekron dan Aharal. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Harunsyah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

21. Aharal (1781-1796). akhir XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Harunsyah dan Sarkan. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Aharal sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

22. Sarkan (1796-1801). transisi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Aharal dan Muhammad Yasin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sarkan sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

23. Muhammad Yasin (1801-1807). awal XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sarkan dan Muhammad Ali. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Yasin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

24. Muhammad Ali (1807-1821). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Yasin dan Sarmoli van der Parra. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Ali sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

25. Sarmoli van der Parra (1821-1823). fase singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Ali dan Muhammad Zain. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Sarmoli van der Parra sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama

karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

26. Muhammad Zain (1823-1859). masa panjang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Sarmoli van der Parra dan Muhammad Arsyad. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Zain sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

27. Muhammad Arsyad (1859-1876). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Zain dan Ayanhar. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Arsyad sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

28. Ayanhar (1879-1900). akhir XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Arsyad dan Muhammad Ilham. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ayanhar sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

29. Muhammad Ilham (1900-1902). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ayanhar dan Haji Muhammad Usman Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Ilham sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

30. Haji Muhammad Usman Syah (1902-1915). awal XX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Ilham dan Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Haji Muhammad Usman Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

31. Iskandar Muhammad Djabir Sjah (1929-1975). fokus politik buku sampai integrasi Indonesia. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Haji Muhammad Usman Syah dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Iskandar Muhammad Djabir Sjah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Ternate berangkat dari kerajaan lebih tua; Zainal Abidin 1486-1500 memperkuat Islamisasi dinasti dan berkembang melalui basis cengkik,

kora-kora, upeti, pelayaran, dan jaringan antarpulau. Islamisasi politiknya ditandai oleh gelar sultan dan hubungan dengan pusat Islam Nusantara. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah Baabullah, pengusiran Portugis 1575, dan jaringan politik luas. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan kompetisi Tidore, Portugis-Spanyol, monopoli VOC, ekstirpasi, dan kontrak kolonial. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Ternate tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

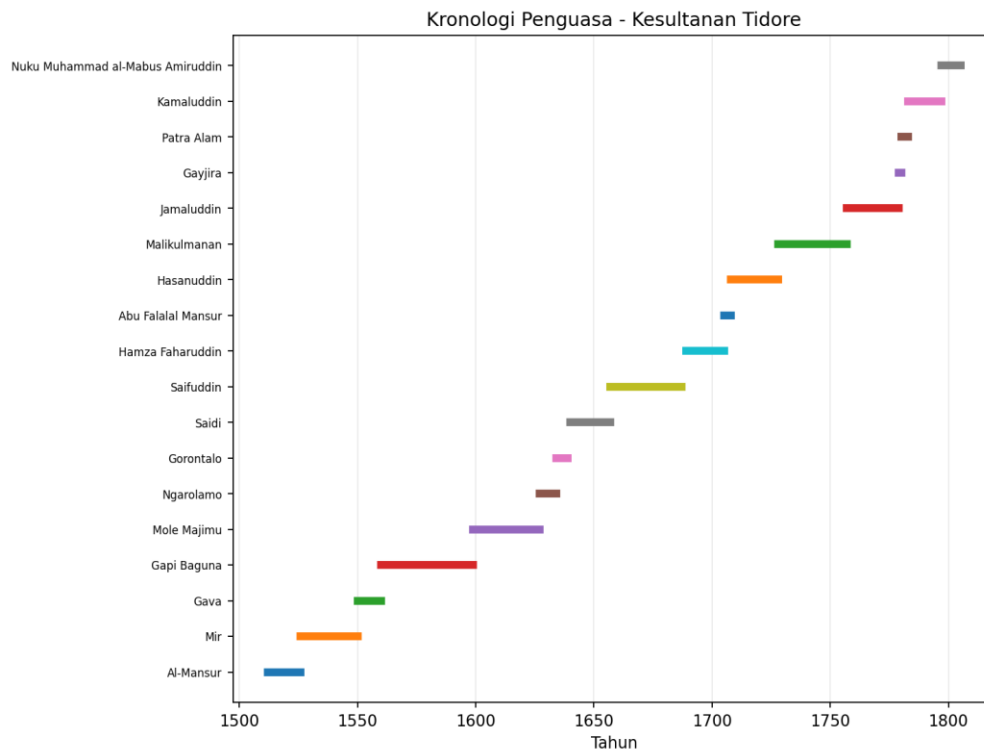
KESULTANAN TIDORE

Kesultanan Tidore merupakan studi kasus utama Bab 8. Rentang yang digunakan adalah Islam resmi akhir XV hingga integrasi Indonesia. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: cukup kuat; fase awal dan beberapa tahun mempunyai varian.

Tabel 17. Daftar penguasa Kesultanan Tidore

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Ciri Leliatu/Jamaluddin	akhir abad XV-awal XVI	tokoh Islamisasi awal dalam sebagian tradisi
2	Al-Mansur	sebelum 1512-1526	masa awal kontak Eropa
3	Mir	1526-1550-an	suksesi
4	Gava	1550-an-1560	abad XVI
5	Gapi Baguna	1560-1599	hubungan Spanyol-Portugis
6	Mole Majimu	1599-1627	awal XVII
7	Ngarolamo	1627-1634	suksesi

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
8	Gorontalo	1634-1639	masa singkat
9	Saidi	1640-1657	abad XVII
10	Saifuddin	1657-1687	abad XVII
11	Hamza Faharuddin	1689-1705	transisi
12	Abu Falalal Mansur	1705-1708	masa singkat
13	Hasanuddin	1708-1728	abad XVIII
14	Malikulmanan	1728-1757	abad XVIII
15	Jamaluddin	1757-1779	akhir XVIII
16	Gayjira	1779-1780	regensi
17	Patra Alam	1780-1783	masa singkat
18	Kamaluddin	1783-1797	menjelang Nuku
19	Nuku Muhammad al-Mabus Amiruddin	1797-1805	perlawanan anti-VOC-Belanda
20	Zainal Abidin	1805-1810	pasca-Nuku
21	Muhammad Tahir	1811-1821	awal XIX
22	Ahmad al-Mansur Sirajuddin	1822-1856	abad XIX
23	Ahmad Saifuddin Alting	1856-1865	abad XIX
24	Ahmad Fathuddin	1867-1892	akhir XIX
25	Iskandar Sahajuhan	1893-1905	akhir XIX-awal XX
26	Zainal Abidin Alting	1947-1967	fase integrasi Indonesia



Gambar 23. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Tidore

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Tidore berkembang di Maluku Utara dan jaringan Papua dalam rentang Islam resmi akhir XV hingga integrasi Indonesia. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang, pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah kerajaan lebih tua; Islamisasi dinasti menguat akhir XV-awal XVI. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Tidore dapat diringkas sebagai cengkih, pelayaran, upeti, dan jaringan Maluku-Papua. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Tidore selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Tidore ditandai oleh gelar sultan, jaringan Muslim regional, dan institusi kesultanan. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Tidore, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Tidore merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Tidore adalah kerajaan lebih tua; Islamisasi dinasti menguat akhir XV-awal XVI. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis.

Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Tidore, catatan status kronologi adalah: cukup kuat; fase awal dan beberapa tahun mempunyai varian. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Tidore berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Tidore sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Tidore ialah cengkih, pelayaran, upeti, dan jaringan Maluku-Papua. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Tidore, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Tidore berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah

Kesultanan Tidore memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Tidore dapat diringkas sebagai jaringan Papua-Maluku dan perlawanan Sultan Nuku. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Tidore berhubungan dengan kompetisi regional, Spanyol/VOC/Belanda, monopoli rempah, dan kolonialisme. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Tidore, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan

administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Tidore tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Tidore karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Tidore meliputi Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: cukup kuat; fase awal dan beberapa tahun mempunyai varian. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Tidore menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Ciri Leliatu/Jamaluddin (akhir abad XV-awal XVI). tokoh Islamisasi awal dalam sebagian tradisi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Al-Mansur. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ciri Leliatu/Jamaluddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Al-Mansur (sebelum 1512-1526). masa awal kontak Eropa. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ciri Leliatu/Jamaluddin dan Mir. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Al-Mansur sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Mir (1526-1550-an). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Al-Mansur dan Gava. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mir sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan

cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Gava (1550-an-1560). abad XVI. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mir dan Gapi Baguna. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Gava sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Gapi Baguna (1560-1599). hubungan Spanyol-Portugis. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Gava dan Mole Majimu. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Gapi Baguna sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Mole Majimu (1599-1627). awal XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Gapi Baguna dan Ngarolamo. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Mole Majimu sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Ngarolamo (1627-1634). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Mole Majimu dan Gorontalo. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ngarolamo sebaiknya memeriksa apakah

perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Gorontalo (1634-1639). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ngarolamo dan Saidi. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Gorontalo sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Saidi (1640-1657). abad XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Gorontalo dan Saifuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Saidi sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Saifuddin (1657-1687). abad XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Saidi dan Hamza Faharuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Saifuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Hamza Fahuaddin (1689-1705). transisi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Saifuddin dan Abu Fahuaddin Mansur. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hamza Fahuaddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Abu Fahuaddin Mansur (1705-1708). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hamza Fahuaddin dan Hasanuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu Fahuaddin Mansur sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

13. Hasanuddin (1708-1728). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu Fahuaddin Mansur dan Malikulmanan. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Hasanuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

14. Malikulmanan (1728-1757). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hasanuddin dan Jamaluddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Malikulmanan sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang,

perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

15. Jamaluddin (1757-1779). akhir XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Malikulmanan dan Gayjira. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Jamaluddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

16. Gayjira (1779-1780). regensi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Jamaluddin dan Patra Alam. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Gayjira sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

17. Patra Alam (1780-1783). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Gayjira dan Kamaluddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Patra Alam sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

18. Kamaluddin (1783-1797). menjelang Nuku. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Patra Alam dan Nuku Muhammad al-Mabus Amiruddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan

varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Kamaluddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

19. Nuku Muhammad al-Mabus Amiruddin (1797-1805). perlawanan anti-VOC-Belanda. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Kamaluddin dan Zainal Abidin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Nuku Muhammad al-Mabus Amiruddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

20. Zainal Abidin (1805-1810). pasca-Nuku. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Nuku Muhammad al-Mabus Amiruddin dan Muhammad Tahir. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

21. Muhammad Tahir (1811-1821). awal XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Zainal Abidin dan Ahmad al-Mansur Sirajuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Tahir sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian

lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

22. Ahmad al-Mansur Sirajuddin (1822-1856). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Muhammad Tahir dan Ahmad Saifuddin Alting. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad al-Mansur Sirajuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

23. Ahmad Saifuddin Alting (1856-1865). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad al-Mansur Sirajuddin dan Ahmad Fathuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad Saifuddin Alting sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

24. Ahmad Fathuddin (1867-1892). akhir XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad Saifuddin Alting dan Iskandar Sahajuhan. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ahmad Fathuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

25. Iskandar Sahajuan (1893-1905). akhir XIX-awal XX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ahmad Fathuddin dan Zainal Abidin Alting. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Iskandar Sahajuan sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

26. Zainal Abidin Alting (1947-1967). fase integrasi Indonesia. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Iskandar Sahajuan dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Zainal Abidin Alting sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Tidore berangkat dari kerajaan lebih tua; Islamisasi dinasti menguat akhir XV-awal XVI dan berkembang melalui basis cengkih, pelayaran, upeti, dan jaringan Maluku-Papua. Islamisasi politiknya ditandai oleh gelar sultan, jaringan Muslim regional, dan institusi kesultanan. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah jaringan Papua-Maluku dan perlawanan Sultan Nuku. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan kompetisi regional, Spanyol/VOC/Belanda, monopoli rempah, dan kolonialisme. Analisis multikausal

mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Tidore tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN BACAN DAN JAILOLO

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Bacan dan Jailolo ditempatkan dalam konteks Maluku Utara. Dua unsur Moloku Kie Raha yang penting tetapi daftar penguasa tidak sestabil Ternate-Tidore dalam sintesis umum; buku tidak mengarang seri yang tidak terverifikasi.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi Andaya 1993; sumber Portugis-VOC. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Bacan dan Jailolo membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Bacan dan Jailolo dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Bacan dan Jailolo perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

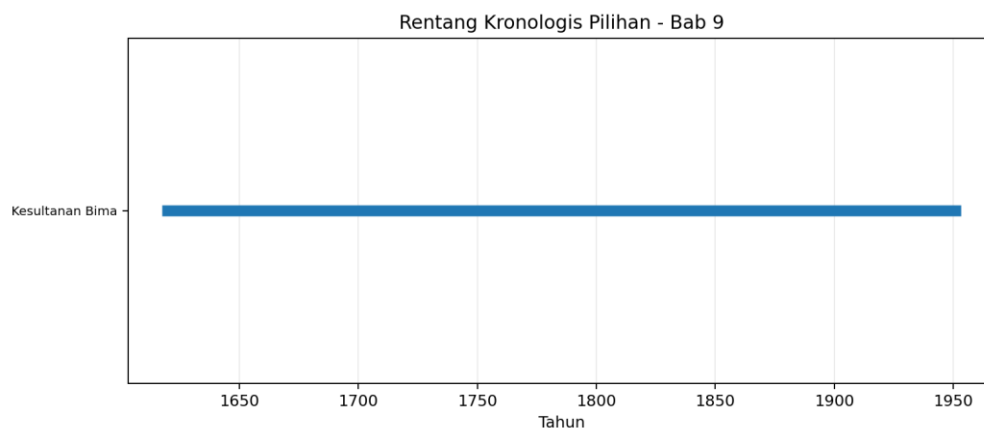
Warisan Kesultanan Bacan dan Jailolo bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

BAB IX - NUSA TENGGARA: BIMA, SUMBAWA, DOMPU, DAN LOMBOK

Nusa Tenggara menghubungkan jalur Jawa, Sulawesi, Maluku, Timor, dan kawasan timur Samudra Hindia. Bima memiliki tradisi kronik istana yang penting, sedangkan Sumbawa dan Dompu memperlihatkan islamisasi dinasti serta keterlibatan dalam jaringan Makassar dan VOC. Lombok mempunyai konfigurasi politik yang lebih majemuk.

Komoditas kawasan tidak hanya rempah. Kuda, beras, hasil ternak, kayu, dan perdagangan antar-pulau turut membentuk kekuasaan. Hubungan dengan Gowa dan kerajaan Sulawesi membantu penyebaran Islam di sebagian Nusa Tenggara, tetapi proses lokal tidak dapat direduksi menjadi ekspansi tunggal.

Sumber Bo Sangaji Kai sangat penting untuk Bima, tetapi kerajaan lain memerlukan penyelarasan tradisi lokal dengan arsip VOC dan penelitian regional. Buku karena itu memberi studi mendalam pada Bima dan survei kritis pada Sumbawa, Dompu, serta Lombok.



Gambar 24. Rentang kronologis kerajaan utama Bab 9

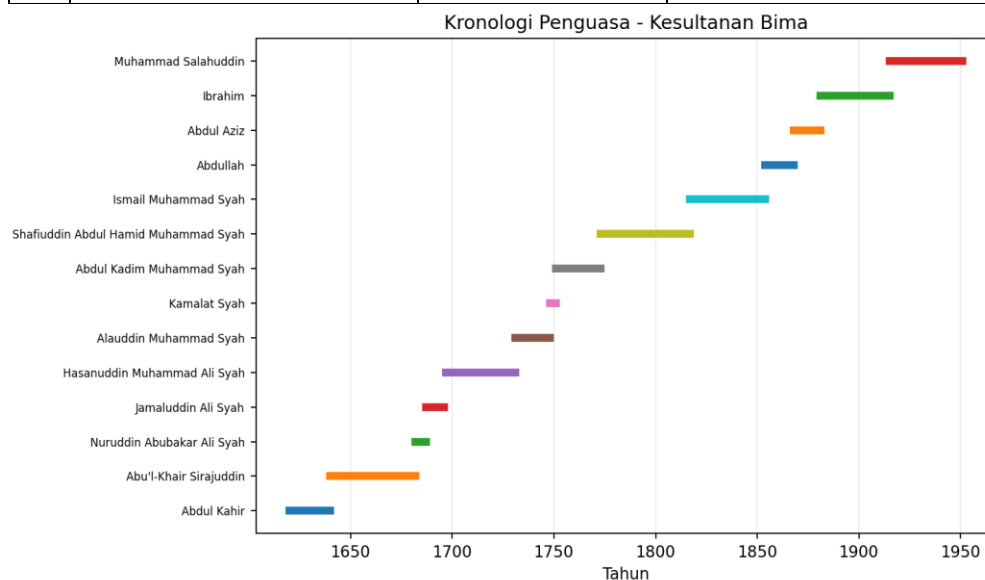
KESULTANAN BIMA

Kesultanan Bima merupakan studi kasus utama Bab 9. Rentang yang digunakan adalah Islamisasi dinasti 1620/1640-1951. Fokus pembahasan ialah pembentukan negara, urutan penguasa, mekanisme legitimasi, ekonomi politik, pencapaian, krisis, serta warisan. Status kronologi: kuat untuk urutan sultan; 1620/1640 menunjuk fase berbeda.

Tabel 18. Daftar penguasa Kesultanan Bima

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
-----	----------	-----------------	-------------------

No.	Penguasa	Tahun Kekuasaan	Catatan Kronologi
1	Abdul Kahir	c.1620-1640; penobatan sultan 1640	sultan pertama
2	Abu'l-Khair Sirajuddin	1640-1682	masa panjang
3	Nuruddin Abubakar Ali Syah	1682-1687	suksesi
4	Jamaluddin Ali Syah	1687-1696	akhir XVII
5	Hasanuddin Muhammad Ali Syah	1697-1731	awal XVIII
6	Alauddin Muhammad Syah	1731-1748	abad XVIII
7	Kamalat Syah	1748-1751	masa singkat
8	Abdul Kadim Muhammad Syah	1751-1773	abad XVIII
9	Shafiuddin Abdul Hamid Muhammad Syah	1773-1817	akhir XVIII-awal XIX
10	Ismail Muhammad Syah	1817-1854	abad XIX
11	Abdullah	1854-1868	abad XIX
12	Abdul Aziz	1868-1881	abad XIX
13	Ibrahim	1881-1915	akhir XIX-awal XX
14	Muhammad Salahuddin	1915-1951	sultan terakhir dalam fase kerajaan politik



Gambar 25. Diagram kronologi penguasa Kesultanan Bima

Latar Belakang, Geografi, dan Jaringan

Kesultanan Bima berkembang di Sumbawa timur, Nusa Tenggara Barat dalam rentang Islamisasi dinasti 1620/1640-1951. Letak ini menentukan pilihan ekonomi, strategi pertahanan, dan arah diplomasi. Sebelum jaringan jalan modern, laut, selat, muara, dan sungai adalah koridor utama untuk memindahkan barang,

pasukan, orang, dan informasi. Karena itu pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan elite menghubungkan daerah produksi dengan pasar, mengamankan jalur, dan menarik pedagang atau petani ke dalam jaringan fiskal. Titik mula yang dipakai di sini adalah Abdul Kahir; penobatan resmi sultan diperingati 5 Juli 1640. Penetapan itu tidak selalu identik dengan tahun berdirinya permukiman atau awal Islamisasi; ia adalah titik politik yang paling berguna untuk menyusun kronologi berdasarkan literatur yang tersedia.

Basis sumber daya Kesultanan Bima dapat diringkas sebagai pertanian, peternakan, kuda, beras, hasil hutan, dan pelayaran. Sumber daya tersebut tidak otomatis menghasilkan negara kuat. Penguasa memerlukan mekanisme pemungutan bea atau hasil, pejabat, pasukan, gudang, pelabuhan atau pasar, serta jaringan loyalitas. Ketika satu mata rantai terganggu—misalnya daerah produksi melepaskan diri atau pelabuhan saingan menawarkan harga lebih baik—pendapatan politik ikut berubah. Perspektif ini membantu memahami mengapa geografi bukan sekadar latar peta, melainkan unsur aktif dalam sejarah kerajaan.

Dalam jaringan antarkawasan, Kesultanan Bima selalu dipengaruhi perubahan yang terjadi di luar wilayah inti. Harga komoditas, migrasi pedagang, perang di kerajaan tetangga, teknologi kapal dan senjata, serta munculnya Portugis, Spanyol, VOC, Inggris, dan negara kolonial Belanda memberi konsekuensi yang berbeda menurut masa. Rujukan utama seperti Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima menempatkan kerajaan Nusantara dalam sistem regional yang saling terhubung. Dengan demikian, penjelasan kemunculan dan kemunduran tidak direduksi menjadi watak pribadi raja, tetapi dibaca sebagai interaksi antara lingkungan, jaringan, institusi, dan keputusan manusia.

Islamisasi, Ulama, dan Legitimasi

Islamisasi Kesultanan Bima ditandai oleh hubungan Gowa-Tallo dan ulama mendorong konversi dinasti. Proses ini perlu dibedakan antara kehadiran Muslim, konversi penguasa, penggunaan gelar Islam, pembentukan jabatan keagamaan, dan perubahan praktik masyarakat. Kelima hal itu dapat terjadi pada waktu berbeda. Karena itu narasi yang menempatkan Islamisasi pada satu hari atau satu tokoh hanya dapat diterima bila didukung bukti khusus; dalam banyak kasus, proses berlangsung bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kompetisi politik.

Gelar sultan dan bahasa Islam menyediakan kosakata legitimasi yang terhubung ke dunia Melayu dan Samudra Hindia, tetapi tidak menghapus kategori lokal. Raja, panembahan, susuhunan, karaeng, arung, datu, pangeran, dan gelar daerah terus hidup. Pada Kesultanan Bima, tradisi lokal dan identitas Islam saling menerjemahkan. Masjid, makam, naskah, ulama, serta ritual istana dapat

memperlihatkan cara legitimasi baru diterima, dinegosiasikan, atau disesuaikan dengan adat.

Peran ulama harus dibaca secara dinamis. Ulama dapat menjadi guru istana, mufti, kadi, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan di luar keraton. Hubungan itu tidak selalu harmonis dan tidak selalu berarti negara mengontrol agama. Di banyak wilayah Nusantara, pesantren, surau, tarekat, dan jaringan haji menciptakan ruang otoritas lain. Karena itu sejarah politik Islam Kesultanan Bima merupakan sejarah perjumpaan beberapa sumber otoritas, bukan sekadar keputusan sultan dari pusat.

Pendiri, Dinasti, dan Mekanisme Suksesi

Tokoh pendiri atau titik pembentuk Kesultanan Bima adalah Abdul Kahir; penobatan resmi sultan diperingati 5 Juli 1640. Narasi pendirian berfungsi menjelaskan asal kekuasaan sekaligus memberi hak memerintah kepada garis keturunan tertentu. Silsilah karena itu sangat berharga tetapi juga bersifat politis. Sebuah silsilah dapat menyimpan memori nyata, menghubungkan keluarga dengan tokoh suci atau kerajaan lama, dan sekaligus disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada masa yang lebih kemudian.

Urutan penguasa harus dibaca sebagai rangkaian transisi, bukan daftar hafalan. Pergantian takhta membuka negosiasi di antara keluarga istana, bangsawan daerah, pejabat agama, panglima, pedagang, dan sekutu luar. Pemerintahan singkat dapat menandai krisis, sedangkan pemerintahan panjang belum tentu tanpa konflik. Pada Kesultanan Bima, catatan status kronologi adalah: kuat untuk urutan sultan; 1620/1640 menunjuk fase berbeda. Tanda c., rentang ganda, atau masa pemerintahan berulang sengaja dipertahankan agar ketidakpastian tidak tersembunyi di balik tabel yang tampak rapi.

Krisis suksesi menjadi semakin menentukan ketika perusahaan atau negara kolonial mempunyai sumber daya untuk mendukung salah satu calon. Bantuan militer atau pengakuan sering dibayar dengan konsesi dagang, wilayah, monopoli, atau hak campur tangan. Pola ini tampak berulang di Nusantara. Karena itu sebab kemunduran kerajaan tidak cukup dijelaskan dengan kata 'perpecahan internal'; yang perlu dianalisis adalah bagaimana aturan suksesi lokal berinteraksi dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional.

Administrasi, Hukum, dan Struktur Sosial

Administrasi Kesultanan Bima berbeda dari birokrasi negara modern. Rumah tangga istana, bangsawan, pejabat pelabuhan, kepala daerah, pejabat agama, dan komunitas lokal membentuk jaringan pemerintahan. Pajak dapat berupa hasil bumi, uang, tenaga, kapal, atau kewajiban menyediakan pasukan. Dalam negara

maritim, syahbandar dan pengelola pelabuhan sangat penting; dalam negara agraris, penguasaan desa, sawah, dan tenaga kerja lebih menentukan.

Hukum bersifat majemuk. Adat, titah raja, perjanjian, kebiasaan niaga, dan norma Islam dapat berjalan bersamaan. Di satu daerah terdapat qanun atau sara yang terdokumentasi, di daerah lain perangkatnya memakai istilah berbeda. Buku ini menghindari asumsi bahwa semua kesultanan memiliki lembaga yang identik. Yang dibandingkan adalah fungsinya: suksesi, perdagangan, pertanahan, perkawinan, pidana, upeti, dan hubungan pusat-daerah.

Masyarakat juga tidak hanya terdiri atas 'raja dan rakyat'. Kota pelabuhan dapat memiliki pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Arab, Tionghoa, Bugis, Makassar, dan kelompok lain; pedalaman memiliki komunitas dengan hubungan politik beragam terhadap pusat. Budak, orang berutang, petani, pelaut, pengrajin, dan ulama menempati posisi berbeda. Membaca struktur sosial membantu menjelaskan kapasitas mobilisasi Kesultanan Bima sekaligus batas kekuasaan istana.

Ekonomi Politik, Komoditas, dan Fiskal

Fondasi ekonomi Kesultanan Bima ialah pertanian, peternakan, kuda, beras, hasil hutan, dan pelayaran. Komoditas baru menjadi kekuatan politik bila negara mampu mengatur akses, melindungi pasar, memungut bea, atau memperoleh bagian produksi. Pelabuhan Asia Tenggara aktif bersaing menarik kapal dengan keamanan, gudang, jaringan kredit, dan akses ke hinterland. Karena itu perdagangan bukan aktivitas di luar negara; ia sering menjadi salah satu sumber terbentuknya negara.

Ketergantungan pada komoditas tertentu menciptakan risiko. Lada, cengkih, timah, beras, kuda, dan hasil hutan mengalami fluktuasi harga dan dapat menjadi sasaran monopoli. Ketika VOC memperoleh hak pembelian eksklusif atau menentukan harga, ruang fiskal penguasa menyempit. Perjanjian dagang dengan demikian dapat mempunyai dampak setara dengan kekalahan perang karena mengubah sumber pendapatan yang menopang pasukan dan patronase.

Ekonomi politik juga memengaruhi relasi pusat dan daerah. Daerah penghasil dapat menegosiasikan pajak, berpindah kesetiaan, atau berhubungan langsung dengan pedagang. Pusat harus menjaga keseimbangan antara menarik pendapatan dan mempertahankan loyalitas. Krisis muncul ketika tuntutan terlalu besar, pasar berubah, atau kekuatan luar menawarkan jalur alternatif. Dalam membaca Kesultanan Bima, mekanisme ini memberi penjelasan struktural bagi masa pertumbuhan maupun kemunduran.

Militer, Diplomasi, dan Hubungan Luar Negeri

Diplomasi Kesultanan Bima berlangsung melalui utusan, surat, hadiah, perkawinan, sumpah, perdagangan, dan perjanjian. Hubungan tidak selalu berada di antara negara yang batasnya tegas seperti masa kini. Kesetiaan dapat berlapis, dan satu daerah mungkin mengakui pengaruh beberapa pusat dalam konteks berbeda. Karena itu istilah vasal atau protektorat harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai masa.

Struktur militer mengikuti geografi. Kerajaan kepulauan memerlukan kapal, pelabuhan, dan pengetahuan navigasi; kerajaan sungai memerlukan kontrol muara; kerajaan agraris harus memobilisasi pasukan darat dan logistik pangan. Senjata api dan meriam meningkatkan kemampuan tempur, tetapi kemenangan masih bergantung pada suplai, koalisi, moral, dan legitimasi. Armada yang kuat tanpa logistik dapat gagal sebagaimana pasukan besar tanpa jaringan sekutu.

Kedatangan kekuatan Eropa menambah satu aktor baru, bukan langsung menciptakan dominasi mutlak. Portugis, Spanyol, VOC, dan Inggris sering harus masuk ke konflik yang sudah ada. Keberhasilan mereka meningkat ketika mampu membangun benteng, jaringan informasi, monopoli, dan sekutu lokal. Sejarah Kesultanan Bima memperlihatkan perlunya membaca peperangan sebagai politik koalisi, bukan pertentangan sederhana antara 'Indonesia' dan 'Eropa'.

Prestasi, Masa Puncak, dan Keterbatasannya

Prestasi utama Kesultanan Bima dapat diringkas sebagai administrasi Bo Sangaji Kai, jaringan Makassar-Nusa Tenggara, dan kesinambungan dinasti. Namun ukuran kejayaan perlu diperluas dari luas wilayah. Sebuah kerajaan dapat penting karena pelabuhan, mata uang, sastra, naskah hukum, ulama, arsitektur, armada, atau kemampuannya menghubungkan kawasan. Dengan ukuran majemuk ini, kesultanan yang tidak membangun imperium luas tetap dapat mempunyai pengaruh sejarah yang besar.

Istilah 'puncak' juga mempunyai keterbatasan. Ekspansi wilayah membutuhkan biaya; monopoli kerajaan mungkin menguntungkan istana tetapi membebani produsen; pelabuhan kosmopolitan dapat mengalami ketimpangan. Karena itu pembahasan prestasi tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi. Yang dicari adalah kapasitas pemerintahan dan dampak historis yang dapat ditunjukkan melalui sumber.

Evaluasi prestasi perlu menghubungkan penguasa dengan bukti kebijakan. Tidak setiap keberhasilan yang terjadi pada masa seorang sultan otomatis merupakan hasil tindakan pribadinya. Buku ini hanya mengatributkan kebijakan tertentu bila literatur mendukungnya. Di tempat bukti lemah, uraian memakai istilah 'pada

masa pemerintahan' alih-alih menyatakan sang penguasa secara langsung menciptakan semua perubahan.

Krisis, Sebab Kemunduran, dan Akhir Kedaulatan

Kemunduran Kesultanan Bima berhubungan dengan kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi Republik. Faktor tersebut biasanya bekerja bersama. Krisis suksesi membuka intervensi; perang merusak produksi; monopoli menekan fiskal; pusat dagang baru mengalihkan kapal; dan kontrak kolonial dapat membatasi diplomasi atau hak memungut pendapatan. Urutan sebab harus ditelusuri, karena satu faktor yang tampak dominan sering hanya efektif setelah faktor lain melemahkan struktur negara.

Penting membedakan 'runtuh', 'dihapus', dan 'berintegrasi'. Sebuah kerajaan dapat kehilangan pusat karena perang, dicabut secara administratif oleh kolonial, atau masuk ke Republik Indonesia sambil mempertahankan dinasti sebagai institusi budaya. Pada Kesultanan Bima, akhir politik harus dibaca sesuai konteks tersebut. Cara ini mencegah penggunaan satu istilah kemunduran bagi proses yang sebenarnya sangat berbeda.

Kolonialisme abad XIX menandai perubahan dari perusahaan dagang menuju kontrol teritorial negara. Kapasitas pajak, tentara, kapal uap, telegraf, dan administrasi memberi Belanda kemampuan lebih besar dibanding VOC abad XVII. Namun respons kerajaan tetap beragam: perlawanan, negosiasi, modernisasi, pemanfaatan persaingan antar-kekuatan, atau integrasi. Keputusan elite lokal tetap menjadi bagian penting dari proses sejarah.

Warisan, Situs, dan Memori Publik

Warisan Kesultanan Bima tersimpan dalam keraton, makam, masjid, benteng, tata kota, naskah, gelar, ritual, dan cerita keluarga. Unsur material dapat menjadi sumber independen. Batu nisan bertanggal membantu menguji silsilah; keramik memberi petunjuk jaringan dagang; pola benteng menunjukkan orientasi pertahanan; naskah hukum memperlihatkan bahasa administrasi dan konsep kewenangan.

Memori modern memilih tokoh tertentu sebagai ikon daerah. Pemerintah, museum, komunitas keturunan, sekolah, dan industri pariwisata mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan pertanyaan akademik. Penghormatan terhadap warisan tidak harus berarti menerima seluruh tradisi sebagai fakta literal. Justru kritik sumber membuat warisan lebih kuat karena membedakan apa yang dapat dibuktikan, apa yang mungkin, dan apa yang merupakan memori simbolik.

Dalam Republik Indonesia, banyak dinasti kehilangan fungsi pemerintahan tetapi tetap menjadi penjaga budaya. Status ini penting dibedakan dari kedaulatan

negara. Kesenambungan budaya dapat mencakup pemeliharaan arsip, upacara, bangunan, dan pengetahuan genealogis. Studi Kesultanan Bima karena itu tidak berakhir pada tahun hilangnya kekuasaan politik; ia berlanjut dalam sejarah pelestarian dan pembentukan identitas daerah.

Historiografi, Kritik Sumber, dan Agenda Penelitian

Rujukan silang pokok untuk Kesultanan Bima meliputi Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Setiap sumber mempunyai bias. Kronik istana menekankan legitimasi; arsip VOC menekankan transaksi dan kepentingan perusahaan; laporan perang menonjolkan konflik; arkeologi memberi data material tetapi tidak selalu menyebut pelaku; sejarah lisan menjaga memori sekaligus berubah dalam transmisi. Rekonstruksi terbaik lahir dari perbandingan beberapa jenis bukti.

Status kronologi bagian ini adalah: kuat untuk urutan sultan; 1620/1640 menunjuk fase berbeda. Pernyataan seperti itu merupakan bagian dari ketelitian ilmiah. Tabel tanggal yang pasti tetapi tidak memiliki dasar justru lebih menyesatkan daripada rentang yang jujur. Bila sumber berbeda, penelitian perlu membuat konkordansi nama, gelar, ejaan, hubungan keluarga, dan peristiwa jangkar sebelum menetapkan urutan.

Agenda penelitian lanjutan meliputi digitalisasi naskah, pembacaan ulang arsip lokal dan kolonial, pemetaan arkeologi, studi koin, analisis jaringan surat, serta perbandingan kronologi antarkerajaan. Teknologi digital dapat membantu menemukan pola, tetapi keputusan tentang identitas tokoh dan makna sumber tetap memerlukan kritik sejarah. Kesultanan Bima menunjukkan bahwa sejarah Nusantara masih terbuka bagi koreksi bila bukti baru tersedia.

Catatan Per Penguasa dan Transisi Kekuasaan

1. Abdul Kahir (c.1620-1640; penobatan sultan 1640). sultan pertama. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara fase pembentukan dinasti dan Abu'l-Khair Sirajuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdul Kahir sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

2. Abu'l-Khair Sirajuddin (1640-1682). masa panjang. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdul Kahir dan Nuruddin Abubakar Ali Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abu'l-Khair Sirajuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

3. Nuruddin Abubakar Ali Syah (1682-1687). suksesi. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abu'l-Khair Sirajuddin dan Jamaluddin Ali Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Nuruddin Abubakar Ali Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

4. Jamaluddin Ali Syah (1687-1696). akhir XVII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Nuruddin Abubakar Ali Syah dan Hasanuddin Muhammad Ali Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Jamaluddin Ali Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

5. Hasanuddin Muhammad Ali Syah (1697-1731). awal XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Jamaluddin Ali Syah dan Alauddin Muhammad Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap

pemerintahan Hasanuddin Muhammad Ali Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

6. Alauddin Muhammad Syah (1731-1748). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Hasanuddin Muhammad Ali Syah dan Kamalat Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Alauddin Muhammad Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

7. Kamalat Syah (1748-1751). masa singkat. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Alauddin Muhammad Syah dan Abdul Kadim Muhammad Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Kamalat Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

8. Abdul Kadim Muhammad Syah (1751-1773). abad XVIII. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Kamalat Syah dan Shafiuddin Abdul Hamid Muhammad Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdul Kadim Muhammad Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs

2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

9. Shafiuddin Abdul Hamid Muhammad Syah (1773-1817). akhir XVIII-awal XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdul Kadim Muhammad Syah dan Ismail Muhammad Syah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Shafiuddin Abdul Hamid Muhammad Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

10. Ismail Muhammad Syah (1817-1854). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Shafiuddin Abdul Hamid Muhammad Syah dan Abdullah. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ismail Muhammad Syah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

11. Abdullah (1854-1868). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ismail Muhammad Syah dan Abdul Aziz. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdullah sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

12. Abdul Aziz (1868-1881). abad XIX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdullah dan Ibrahim. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan

pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Abdul Aziz sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

13. Ibrahim (1881-1915). akhir XIX-awal XX. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Abdul Aziz dan Muhammad Salahuddin. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Ibrahim sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

14. Muhammad Salahuddin (1915-1951). sultan terakhir dalam fase kerajaan politik. Posisi pemerintahan ini dibaca di antara Ibrahim dan fase akhir kronologi yang dibahas. Tahun pada tabel berfungsi sebagai kerangka, bukan pengganti analisis. Bila catatan menunjukkan varian, rival, atau pemerintahan terputus, perbedaan itu harus dipertahankan ketika membandingkan sumber. Penilaian terhadap pemerintahan Muhammad Salahuddin sebaiknya memeriksa apakah perubahan politik benar-benar dapat diatribusikan kepada kebijakan penguasa, atau hanya terjadi pada masa yang sama karena perdagangan, perang, perubahan elite, dan intervensi luar. Untuk penelitian lanjutan, rujukan silang yang digunakan pada bagian ini adalah Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima. Dengan cara ini, daftar dinasti menjadi alat untuk memahami transisi kekuasaan, bukan daftar nama yang berdiri sendiri.

Ringkasan Kronologis dan Evaluasi Dinasti

Pembentukan Kesultanan Bima berangkat dari Abdul Kahir; penobatan resmi sultan diperingati 5 Juli 1640 dan berkembang melalui basis pertanian, peternakan, kuda, beras, hasil hutan, dan pelayaran. Islamisasi politiknya ditandai oleh hubungan Gowa-Tallo dan ulama mendorong konversi dinasti. Kedua proses tersebut saling menguatkan tetapi tidak identik: pembentukan dinasti dapat terjadi

sebelum institusi agama lengkap, dan jaringan Muslim dapat hadir sebelum berdirinya kesultanan.

Prestasi yang paling menonjol adalah administrasi Bo Sangaji Kai, jaringan Makassar-Nusa Tenggara, dan kesinambungan dinasti. Pencapaian ini perlu ditempatkan dalam kemampuan menghimpun pendapatan, mengelola jaringan regional, dan membangun legitimasi. Indikator kejayaan yang digunakan di sini meliputi kapasitas politik, ekonomi, diplomasi, budaya, dan pengetahuan, sehingga tidak hanya mengukur luas wilayah.

Kemunduran atau perubahan kedaulatan berkaitan dengan kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi Republik. Analisis multikausal mencegah kesimpulan bahwa kerajaan jatuh hanya karena satu raja lemah. Faktor internal dan eksternal sering menguatkan satu sama lain, terutama melalui suksesi, fiskal, perang, monopoli dagang, dan kontrak politik.

Warisan Kesultanan Bima tetap relevan melalui situs, naskah, gelar, memori dinasti, tradisi keagamaan, dan identitas regional. Namun warisan publik perlu terus dibedakan antara fakta terverifikasi dan tradisi simbolik. Kritik sumber tidak mengurangi nilai warisan; ia memberi dasar lebih kokoh untuk pelestarian.

KESULTANAN SUMBAWA

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Sumbawa ditempatkan dalam konteks Nusa Tenggara Barat. Kesultanan Islam sejak abad XVII; kronologi lengkap memerlukan penyelarasan kronik lokal dan arsip VOC. Sultan Muhammad Kaharuddin III memimpin fase akhir politik abad XX.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi studi Sumbawa; catatan VOC; sejarah Nusa Tenggara. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Sumbawa membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Sumbawa dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat

besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Sumbawa perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kesultanan Sumbawa bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

KESULTANAN DOMPU

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kesultanan Dompu ditempatkan dalam konteks Nusa Tenggara Barat. Islamisasi dinasti awal XVII; daftar lengkap abad XVII-XIX bervariasi. Sultan Syamsuddin dan penguasa abad XX dicatat dalam tradisi lokal.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi studi Dompu; catatan VOC. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kesultanan Dompu membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar.

Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kesultanan Dompu dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kesultanan Dompu perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kesultanan Dompu bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

KERAJAAN ISLAM LOMBOK DAN SELAPARANG

Latar Belakang dan Status Rekonstruksi

Kerajaan Islam Lombok dan Selaparang ditempatkan dalam konteks Lombok. Konstelasi politik majemuk: Selaparang, Pejanggik, Bayan, Sokong dan pusat lain; tidak tepat dipaksakan menjadi satu daftar sultan linear.

Bahan yang perlu dipertemukan untuk merekonstruksi kasus ini meliputi studi Sasak-Lombok; literatur Nusa Tenggara. Buku tidak memaksakan seri penguasa lengkap apabila nama, gelar, atau tahun belum dapat diselaraskan dengan aman. Prinsip ini penting karena tabel yang tampak lengkap dapat memberi kesan kepastian palsu.

Secara komparatif, Kerajaan Islam Lombok dan Selaparang membantu melihat bahwa proses islamisasi dan pembentukan kerajaan tidak selalu mengikuti pola pusat besar. Hubungan perdagangan, perkawinan dinasti, pengaruh tetangga, dan struktur lokal dapat menghasilkan bentuk pemerintahan yang berbeda. Karena itu kasus ini tetap penting meskipun dokumentasi kronologinya tidak sepadat kerajaan utama.

Ekonomi, Politik, dan Hubungan Regional

Posisi Kerajaan Islam Lombok dan Selaparang dalam jaringan regional ditentukan oleh akses terhadap pelabuhan, sungai, hasil bumi, atau lintasan antarpulau. Pengaruh pusat besar tidak selalu berarti kontrol administratif langsung. Upeti, aliansi, hubungan dagang, dan perkawinan dapat menjadi bentuk keterikatan yang lebih realistis untuk masa pra-modern.

Perubahan perdagangan Asia dan masuknya kekuatan Eropa kemudian mengubah nilai titik-titik strategis. Benteng, kontrak, dan monopoli memberi tekanan baru pada elite lokal, tetapi tanggapan mereka beragam: ada yang bersekutu, berpindah pihak, melawan, atau memakai hubungan tersebut untuk mengatasi rival lokal.

Bagi penelitian, prioritasnya adalah membuat konkordansi sumber sebelum menyusun daftar dinasti. Nama yang sama dapat ditulis berbeda, gelar dapat dianggap sebagai nama diri, dan tradisi kemudian dapat menggabungkan dua tokoh. Karena itu verifikasi prosopografi menjadi langkah utama.

Prestasi, Kemunduran, dan Warisan

Prestasi Kerajaan Islam Lombok dan Selaparang perlu dinilai sesuai skala dan bukti. Keberhasilan menjaga jaringan dagang, membangun masjid atau pusat pendidikan, memproduksi naskah, atau mempertahankan otonomi regional merupakan capaian penting meskipun tidak menghasilkan imperium luas.

Kemunduran dapat melibatkan perubahan jalur perdagangan, konflik suksesi, ekspansi tetangga, epidemi, tekanan fiskal, atau intervensi kolonial. Tanpa sumber yang cukup, buku tidak menentukan urutan sebab secara spekulatif. Pernyataan kausal hanya diberikan pada tingkat yang didukung sintesis penelitian.

Warisan Kerajaan Islam Lombok dan Selaparang bertahan dalam toponimi, tradisi keluarga, situs, naskah, dan identitas daerah. Dokumentasi lokal modern sangat berguna sebagai pintu masuk, tetapi tetap perlu dibandingkan dengan edisi sumber

dan penelitian akademik agar memori publik dan rekonstruksi sejarah dapat saling memperkaya.

BAB X - SINTESIS KRONOLOGIS, POLA KEJAYAAN, KEMUNDURAN, DAN WARISAN

Bab sintesis tidak mencari satu model tunggal untuk semua kerajaan. Ia membandingkan variabel yang berulang: geografi, komoditas, legitimasi, mekanisme suksesi, jaringan ulama, teknologi militer, perjanjian, dan perubahan kapasitas negara kolonial. Pola yang sama dapat menghasilkan akibat berbeda karena konteks lokal berbeda.

Timeline gabungan memperlihatkan bahwa pusat kejayaan bergeser. Pasai menonjol pada abad XIII-XV, Demak dan Aceh pada abad XVI, Mataram-Gowa-Ternate-Banten pada abad XVII, Riau-Lingga dan kerajaan regional lain pada abad XVIII-XIX, sementara bentuk kedaulatan tradisional terus berubah hingga masa Republik.

Kesimpulan utamanya adalah bahwa kemunduran hampir selalu multikausal. Konflik suksesi menjadi berbahaya ketika pendapatan menyusut atau kekuatan luar dapat memberi dukungan bersenjata; monopoli menjadi efektif ketika benteng dan kontrak menopangnya; integrasi kolonial menguat ketika kapasitas administrasi serta transportasi meningkat. Sebaliknya, warisan budaya dapat bertahan jauh sesudah kedaulatan politik berubah.



Gambar 26. Rentang kronologis kerajaan utama dalam buku

10.1 Pergeseran Pusat Politik dari Abad XIII hingga XX

Pada abad XIII-XV, Samudra Pasai menjadi salah satu simpul Muslim penting di Selat Malaka. Abad XVI memperlihatkan kebangkitan Aceh, Demak, Banten, serta penguatan kerajaan rempah Maluku. Abad XVII menjadi masa kompetisi besar: Aceh pada awal abad, Mataram dan Gowa di Jawa-Sulawesi, Banten di Selat Sunda, serta Ternate-Tidore di Maluku.

Abad XVIII-XIX tidak identik dengan hilangnya kerajaan. Pusat baru dan konfigurasi baru muncul: Siak, Pontianak, Riau-Lingga, serta negara penerus Mataram. Yang berubah adalah skala intervensi VOC dan kemudian negara kolonial. Kontrak, utang, penetapan suksesi, serta kontrol teritorial mengurangi ruang kedaulatan dengan cara bertahap.

Abad XX membawa transformasi lain. Pendudukan Jepang merusak struktur kolonial dan banyak istana. Proklamasi kemerdekaan mengharuskan kerajaan menentukan posisi terhadap Republik. Sebagian elite mendukung integrasi, sebagian menghadapi revolusi sosial atau perubahan administratif, dan beberapa institusi keraton bertahan sebagai pusat budaya.

10.2 Pola Pendiri dan Legitimasi

Pendiri kerajaan dapat memperoleh legitimasi dari silsilah, penaklukan, perkawinan, dukungan ulama, penguasaan pelabuhan, atau pengakuan jaringan bangsawan. Dalam beberapa kasus, kisah pendiri menggabungkan unsur sejarah dan simbolik. Karena itu sumber genealogis harus dibaca sebagai dokumen politik sekaligus kemungkinan penyimpanan memori.

Islam memberi sumber legitimasi transregional melalui gelar sultan, hubungan dengan ulama, dan simbol keagamaan. Namun gelar lokal tidak hilang. Sultan Agung tetap berada dalam kosmologi keraton Jawa; Gowa memakai gelar lokal dan Islam; Ternate-Tidore menggabungkan struktur Maluku dengan kesultanan. Hibriditas adalah keadaan normal, bukan penyimpangan.

Legitimasi juga memerlukan performa. Kemampuan memberi perlindungan, menjaga harga atau pelabuhan, membagi jabatan, menegakkan keadilan, dan memenangkan perang menentukan apakah silsilah diterima. Ketika performa melemah, rival dapat mengajukan silsilah alternatif dan mencari dukungan luar.

10.3 Ekonomi Politik dan Komoditas

Komoditas strategis membentuk negara tetapi juga menciptakan ketergantungan. Lada mendukung Aceh, Banten, dan Banjar; cengkih menopang politik Maluku; timah menjadi sumber Palembang dan Bangka; beras mendukung Mataram dan Makassar; jaringan sungai menopang Siak serta Pontianak. Diversifikasi ekonomi cenderung memberi ketahanan lebih besar daripada ketergantungan satu komoditas.

Pelabuhan bebas dan monopoli adalah dua strategi berbeda. Gowa terkenal mempertahankan Makassar sebagai pelabuhan terbuka, sedangkan VOC berusaha mengendalikan jalur rempah. Banten dan Aceh juga bernegosiasi terhadap berbagai pedagang. Ketika monopoli kolonial memperoleh dukungan armada, benteng, kontrak, dan koalisi lokal, struktur pendapatan kerajaan dapat berubah drastis.

Pada abad XIX, ekonomi perkebunan dan negara kolonial mengubah skala fiskal. Deli menjadi contoh bagaimana elite kesultanan dapat memperoleh pendapatan besar dari konsesi, tetapi hubungan tersebut juga menempatkan kedaulatan dalam kerangka kolonial. Kekayaan ekonomi tidak identik dengan kemerdekaan politik.

10.4 Ulama, Naskah, dan Produksi Pengetahuan

Aceh abad XVII memperlihatkan perdebatan intelektual melalui Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf al-Singkili. Banjar terkait dengan Muhammad Arsyad al-Banjari; Riau-Lingga dengan Raja Ali Haji; keraton Jawa dengan produksi serat dan suluk. Jaringan ulama melintasi batas kerajaan dan menghubungkan Nusantara dengan Haramain serta pusat lain.

Naskah bukan sekadar sumber informasi, tetapi bagian dari politik pengetahuan. Penyalinan, pemberian patronase, penggunaan bahasa Melayu-Jawi, Jawa, Bugis-Makassar, Wolio, dan bahasa lain menentukan siapa yang dapat mengakses tradisi. Pusat yang tidak luas secara militer dapat mempunyai pengaruh besar melalui produksi teks.

Penelitian modern perlu menghubungkan filologi dengan sejarah sosial. Siapa penulis, penyalin, patron, pembaca, dan pemilik naskah? Kapan teks disalin ulang? Perubahan kecil dalam silsilah atau gelar dapat menunjukkan kepentingan politik yang berubah.

10.5 Tipologi Kemunduran dan Transformasi

Kemunduran dinasti umumnya bergerak melalui kombinasi lima mekanisme: krisis suksesi, penyusutan basis pendapatan, perang berkepanjangan, perubahan jaringan perdagangan, dan intervensi luar. Tidak semua mekanisme hadir dalam setiap kasus, dan urutannya penting. Krisis suksesi di kerajaan kaya dapat diatasi; tetapi menjadi fatal bila bersamaan dengan utang dan dukungan kolonial kepada salah satu faksi.

VOC pada abad XVII-XVIII terutama mengejar kepentingan perusahaan. Dominasi teritorialnya berkembang tidak merata. Negara kolonial Belanda abad XIX memiliki kemampuan yang berbeda karena pajak, tentara, birokrasi, kapal uap, dan komunikasi. Membandingkan kedua fase mencegah anggapan bahwa 'Belanda' mempunyai kekuatan yang sama selama tiga abad.

Integrasi ke Republik adalah kategori berbeda dari kemunduran. Sultan Syarif Kasim II Siak dan Hamengkubuwono IX Yogyakarta misalnya mendukung Republik. Di tempat lain, revolusi sosial menghancurkan atau melemahkan elite tradisional. Perubahan 1945-1950 harus dibaca dalam konteks revolusi, bukan sebagai kelanjutan sederhana kolonialisme.

10.6 Warisan dan Agenda Historiografi

Warisan kerajaan hidup dalam situs, gelar, hukum adat, tradisi keagamaan, sastra, musik, pakaian, tata kota, dan memori publik. Pelestarian terbaik menggabungkan konservasi fisik dengan dokumentasi naskah, sejarah lisan, katalog arsip, dan pendidikan kritis.

Digitalisasi membuka peluang membangun basis data penguasa lintas sumber. Namun penyatuan data harus menyimpan provenance: setiap nama dan tanggal perlu terkait dengan sumbernya, termasuk varian ejaan. Basis data yang menghapus perbedaan justru menghilangkan informasi historiografis penting.

Agenda masa depan mencakup penerbitan edisi kritis kronik lokal, pemetaan jaringan surat dan perkawinan, studi koin serta segel, arkeologi pelabuhan, dan integrasi arsip Asia-Eropa. Sejarah kerajaan Islam Indonesia masih merupakan bidang terbuka, terutama pada pusat-pusat yang kurang terdokumentasi dalam sintesis nasional.

Tabel 19. Perbandingan pola kerajaan utama

Kerajaan	Rentang	Basis Ekonomi	Puncak/Prestasi	Faktor Kemunduran/Transformasi
Kesultanan Samudra Pasai	c.1267-awal abad XVI	lada, perdagangan transit Samudra Hindia, pelabuhan, dan mata uang emas	pelabuhan Muslim internasional, mata uang, dan jaringan keilmuan pada abad XIII-XV	persaingan regional, perubahan jalur dagang, tekanan luar, lalu penyerapan oleh Aceh
Kesultanan Aceh Darussalam	akhir abad XV/awal XVI-1903	lada, pelabuhan Aceh, perdagangan Samudra Hindia, dan jaringan fiskal-militer	ekspansi dan konsolidasi pada masa Iskandar Muda serta tradisi intelektual abad XVII	fragmentasi elite, perubahan perdagangan, tekanan Belanda, dan Perang Aceh
Kesultanan Deli	abad XVII-1945	perdagangan sungai; kemudian tembakau dan konsesi perkebunan abad XIX	pertumbuhan ekonomi perkebunan dan pembangunan institusi-istana pada akhir XIX-awal XX	ketergantungan kolonial, revolusi sosial Sumatra Timur, dan integrasi Republik
Kesultanan Siak Sri Indrapura	1723-1945	sungai Siak, perdagangan, hasil hutan, timah regional, dan pelabuhan	konsolidasi Riau daratan dan kesinambungan dinasti Sayyid hingga Sultan Syarif Kasim II	kontrak kolonial mengurangi kedaulatan; berakhir melalui integrasi ke Republik Indonesia
Kesultanan Palembang Darussalam	1659-1823	timah Bangka, lada, hasil hutan, pelabuhan dan perdagangan Musi	pengelolaan ekonomi sungai-timah dan perlawanan Mahmud Badaruddin II	intervensi Inggris-Belanda, konflik suksesi, perang, dan penghapusan 1823
Kesultanan Riau-Lingga	1812-1911, berakar pada Johor-Riau	pelabuhan kepulauan, perdagangan Selat Malaka, dan jaringan Melayu-Bugis	produksi intelektual Melayu-Islam dan jaringan politik Melayu-Bugis	pembelahan Inggris-Belanda, kontrak kolonial, dan penghapusan kesultanan 1911
Kesultanan Demak	akhir abad XV-pertengahan XVI	beras, bandar pesisir, pelayaran Laut Jawa-Malaka-Maluku	ekspansi masa Trenggana dan peran Demak sebagai kekuatan Islam pesisir	krisis suksesi setelah Trenggana dan peralihan pusat ke Pajang

Kerajaan	Rentang	Basis Ekonomi	Puncak/Prestasi	Faktor Kemunduran/Transformasi
Kesultanan Banten	1526/1552-1813/1816	lada Lampung-Banten, pelabuhan internasional, tekstil, dan perdagangan antarbenua	pelabuhan kosmopolitan dan kemandirian pada masa Sultan Ageng Tirtayasa	konflik Ageng-Haji, intervensi VOC, kontrak tidak seimbang, lalu pembubaran kolonial
Kesultanan Mataram Islam	c.1580-an-1755 sebagai kerajaan terpadu	surplus agraria, pajak desa, pasar, serta kontrol pelabuhan pesisir	ekspansi Sultan Agung, reformasi kalender 1633, dan hegemoni Jawa	Trunajaya, perang suksesi, intervensi VOC, utang-kontrak, dan Giyanti 1755
Kasunanan Surakarta Hadiningrat	1745/1755-1945 sebagai kekuasaan politik tradisional	agraria, tanah lungguh, pasar, dan ekonomi perkebunan Vorstenlanden	pengembangan kebudayaan, sastra, seni, dan modernisasi keraton	kedaulatan menyusut dalam kontrak kolonial; status politik khusus tidak bertahan sesudah revolusi
Kesultanan Yogyakarta	1755-sekarang; fokus politik sampai integrasi Republik	agraria, pajak, kerajinan, pasar, dan ekonomi Vorstenlanden	pembentukan negara baru, kebudayaan keraton, dan dukungan HB IX kepada Republik	bukan runtuh; kedaulatan tradisional berubah dan berintegrasi ke Republik Indonesia
Kesultanan Banjar	c.1526-1860 resmi; perlawanan dinasti hingga 1905	lada, hasil hutan, jalur Barito-Martapura, dan pasar Banjarmasin	integrasi sungai, perdagangan lada, perkembangan ulama, dan perlawanan kolonial	konflik suksesi, perjanjian-intervensi Belanda, penghapusan 1860, dan Perang Banjar
Kesultanan Pontianak	1771-1950 dalam berbagai tingkat kedaulatan	perdagangan sungai, hasil hutan, emas kawasan hulu, dan pelabuhan Kapuas	pendirian Pontianak dan pertumbuhan sebagai pusat dagang Kapuas	kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi ke Indonesia
Kesultanan Gowa-Tallo	Islam resmi 1605; kerajaan berlanjut sesudahnya	pelabuhan Makassar, beras, perdagangan transit rempah, tekstil, dan pelayaran	Makassar sebagai pelabuhan bebas dan perlawanan Sultan Hasanuddin	Perang Makassar, aliansi VOC-Bone, Bongaya, dan hilangnya hegemoni dagang
Kesultanan Ternate	kesultanan sejak akhir abad XV hingga integrasi Indonesia	cengkih, kora-kora, upeti, pelayaran, dan jaringan antarpulau	Baabullah, pengusiran Portugis 1575, dan jaringan politik luas	kompetisi Tidore, Portugis-Spanyol, monopoli VOC, ekstirpasi, dan kontrak kolonial
Kesultanan Tidore	Islam resmi akhir XV hingga integrasi Indonesia	cengkih, pelayaran, upeti, dan jaringan Maluku-Papua	jaringan Papua-Maluku dan perlawanan Sultan Nuku	kompetisi regional, Spanyol/VOC/Belanda, monopoli rempah, dan kolonialisme
Kesultanan Bima	Islamisasi dinasti 1620/1640-1951	pertanian, peternakan, kuda, beras, hasil hutan, dan pelayaran	administrasi Bo Sangaji Kai, jaringan Makassar-Nusa Tenggara, dan kesinambungan dinasti	kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi Republik

10.7 Timeline Kronologis Terpadu

Tabel 20. Timeline terpadu kerajaan Islam Indonesia

Tahun/Periode	Peristiwa dan Arti Historis
c.1267	Malik al-Salih menjadi jangkar kronologi Samudra Pasai.
1297	Wafat Malik al-Salih; nisan menjadi bukti penting kronologi Pasai.
1345-1346	Ibn Battuta mengunjungi Samudra Pasai.
1511	Portugis merebut Malaka dan mengubah keseimbangan Selat Malaka.
1518-1521	Pati Unus memimpin Demak; ekspedisi terhadap Malaka menjadi bagian memori politik pesisir.
c.1526	Fondasi politik Banten Islam dan Banjar Islam ditempatkan sekitar masa ini dalam kronologi umum.
1530-an	Aceh di bawah Ali Mughayat Syah dan penerus awal mengonsolidasikan kekuatan.
1552-1570	Maulana Hasanuddin memerintah Banten dalam fase kesultanan berdaulat.
1570	Sultan Khairun Ternate terbunuh; Baabullah naik dan memperkuat perlawanan.
1575	Portugis terusir dari benteng Ternate pada masa Baabullah.
c.1580-an	Panembahan Senapati membangun Mataram sebagai kekuatan baru.
1602	VOC didirikan; aktor perusahaan ini kemudian menjadi kekuatan militer-diplomatik utama.
1605	Islam diterima secara resmi di Gowa-Tallo.
1607	Iskandar Muda naik takhta Aceh.
1613	Sultan Agung naik takhta Mataram.
1629	Serangan kedua Mataram ke Batavia gagal mencapai tujuan strategis.
1633	Sultan Agung memperkenalkan kalender Jawa-Islam.
1636	Iskandar Muda wafat; Aceh memasuki fase Iskandar Tsani dan kemudian sultanah.
1641	Safiatuddin Tajul Alam naik takhta; awal periode empat sultanah Aceh.
1651	Sultan Ageng Tirtayasa memulai pemerintahan Banten.
1653	Sultan Hasanuddin memerintah Gowa.
1667	Perjanjian Bungaya/Bongaya membatasi Gowa setelah perang dengan koalisi VOC-Arung Palakka.
1677	Pemberontakan Trunajaya memaksa perubahan besar dalam Mataram.
1683	Sultan Ageng dikalahkan dalam konflik dinasti yang melibatkan VOC; Sultan Haji berkuasa.
1704-1708	Perang Suksesi Jawa I.
1719-1723	Perang Suksesi Jawa II dan konflik lanjutan.
1723	Raja Kecil mendirikan Siak Sri Indrapura.
1740-an	Krisis Jawa dan perang besar memperdalam ketergantungan Mataram pada VOC.

Tahun/Periode	Peristiwa dan Arti Historis
1745	Pakubuwono II memindahkan keraton ke Surakarta.
1755	Perjanjian Giyanti membagi Mataram dan melahirkan Yogyakarta sebagai negara baru.
1757	Perjanjian Salatiga membentuk Mangkunegaran.
1771	Syarif Abdurrahman mendirikan Pontianak.
1780-1790-an	Nuku Tidore membangun perlawanan dan jaringan aliansi di Maluku.
1811-1816	Interregnum Inggris di Jawa mengubah struktur politik dan kontrak keraton.
1812	Penyerbuan Keraton Yogyakarta oleh Inggris; perubahan besar dalam politik Jawa.
1817-1821	Mahmud Badaruddin II Palembang menjalani fase terakhir perlawanan besar.
1823	Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda.
1824	Traktat Inggris-Belanda membelah ruang politik Melayu ke dalam lingkungan kolonial yang berbeda.
1825-1830	Perang Jawa/Diponegoro mengguncang Jawa dan mengubah kapasitas negara kolonial.
1855	Hamengkubuwono VI naik takhta; fase baru Yogyakarta pasca-Perang Jawa.
1857-1860	Krisis suksesi Banjar berujung penghapusan kesultanan oleh Belanda pada 1860.
1859-1863	Perang Banjar meluas; Pangeran Antasari menjadi figur utama perlawanan.
1873	Perang Aceh dimulai.
1890-an	Ekonomi kolonial perkebunan dan administrasi teritorial semakin mengubah hubungan kerajaan dengan pemerintah kolonial.
1903	Sultan Muhammad Daud Syah menyerah kepada Belanda; perlawanan Aceh berlanjut dalam bentuk lain.
1905	Muhammad Seman gugur; fase perlawanan dinasti Banjar berakhir.
1908	Syarif Kasim II naik takhta Siak.
1911	Kesultanan Riau-Lingga dihapus oleh Belanda.
1920-an	Modernisasi lembaga dan ekonomi keraton berlangsung di sejumlah kesultanan dalam batas kolonial.
1942	Pendudukan Jepang mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda sementara dan mengguncang struktur tradisional.
1944	Sultan Syarif Muhammad Pontianak menjadi korban kekerasan pendudukan Jepang.
1945	Proklamasi Republik Indonesia; banyak kesultanan menentukan posisi terhadap negara baru.
1945	Sultan Syarif Kasim II Siak menyatakan dukungan terhadap Republik dan menyerahkan kontribusi besar.
1945	Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan dukungan kepada Republik; Yogyakarta memperoleh konfigurasi khusus.
1946	Revolusi sosial Sumatra Timur memukul banyak elite kesultanan Melayu.
1949	Pengakuan kedaulatan Indonesia mengubah kerangka politik kerajaan yang tersisa.

Tahun/Periode	Peristiwa dan Arti Historis
1950	Sultan Hamid II Pontianak kehilangan posisi politik; kesultanan beralih terutama ke fungsi budaya.
1950-an dan sesudahnya	Keraton dan kesultanan bertahan dengan status beragam sebagai institusi budaya, sosial, dan simbolik.

c.1267: Malik al-Salih menjadi jangkar kronologi Samudra Pasai. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1297: Wafat Malik al-Salih; nisan menjadi bukti penting kronologi Pasai. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1345-1346: Ibn Battuta mengunjungi Samudra Pasai. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1511: Portugis merebut Malaka dan mengubah keseimbangan Selat Malaka. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1518-1521: Pati Unus memimpin Demak; ekspedisi terhadap Malaka menjadi bagian memori politik pesisir. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

c.1526: Fondasi politik Banten Islam dan Banjar Islam ditempatkan sekitar masa ini dalam kronologi umum. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1530-an: Aceh di bawah Ali Mughayat Syah dan penerus awal mengonsolidasikan kekuatan. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1552-1570: Maulana Hasanuddin memerintah Banten dalam fase kesultanan berdaulat. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1570: Sultan Khairun Ternate terbunuh; Baabullah naik dan memperkuat perlawanan. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1575: Portugis terusir dari benteng Ternate pada masa Baabullah. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

c.1580-an: Panembahan Senapati membangun Mataram sebagai kekuatan baru. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik

semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1602: VOC didirikan; aktor perusahaan ini kemudian menjadi kekuatan militer-diplomatik utama. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1605: Islam diterima secara resmi di Gowa-Tallo. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1607: Iskandar Muda naik takhta Aceh. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1613: Sultan Agung naik takhta Mataram. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1629: Serangan kedua Mataram ke Batavia gagal mencapai tujuan strategis. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1633: Sultan Agung memperkenalkan kalender Jawa-Islam. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase

pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1636: Iskandar Muda wafat; Aceh memasuki fase Iskandar Tsani dan kemudian sultanah. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1641: Safiatuddin Tajul Alam naik takhta; awal periode empat sultanah Aceh. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1651: Sultan Ageng Tirtayasa memulai pemerintahan Banten. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1653: Sultan Hasanuddin memerintah Gowa. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1667: Perjanjian Bungaya/Bongaya membatasi Gowa setelah perang dengan koalisi VOC-Arung Palakka. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1677: Pemberontakan Trunajaya memaksa perubahan besar dalam Mataram. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa

sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1683: Sultan Ageng dikalahkan dalam konflik dinasti yang melibatkan VOC; Sultan Haji berkuasa. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1704-1708: Perang Suksesi Jawa I. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1719-1723: Perang Suksesi Jawa II dan konflik lanjutan. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1723: Raja Kecil mendirikan Siak Sri Indrapura. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1740-an: Krisis Jawa dan perang besar memperdalam ketergantungan Mataram pada VOC. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1745: Pakubuwono II memindahkan keraton ke Surakarta. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat

simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1755: Perjanjian Giyanti membagi Mataram dan melahirkan Yogyakarta sebagai negara baru. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1757: Perjanjian Salatiga membentuk Mangkunegaran. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1771: Syarif Abdurrahman mendirikan Pontianak. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1780-1790-an: Nuku Tidore membangun perlawanan dan jaringan aliansi di Maluku. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1811-1816: Interregnum Inggris di Jawa mengubah struktur politik dan kontrak keraton. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1812: Penyerbuan Keraton Yogyakarta oleh Inggris; perubahan besar dalam politik Jawa. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan

bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1817-1821: Mahmud Badaruddin II Palembang menjalani fase terakhir perlawanan besar. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1823: Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1824: Traktat Inggris-Belanda membelah ruang politik Melayu ke dalam lingkungan kolonial yang berbeda. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1825-1830: Perang Jawa/Diponegoro mengguncang Jawa dan mengubah kapasitas negara kolonial. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1855: Hamengkubuwono VI naik takhta; fase baru Yogyakarta pasca-Perang Jawa. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1857-1860: Krisis suksesi Banjar berujung penghapusan kesultanan oleh Belanda pada 1860. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1859-1863: Perang Banjar meluas; Pangeran Antasari menjadi figur utama perlawanan. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1873: Perang Aceh dimulai. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1890-an: Ekonomi kolonial perkebunan dan administrasi teritorial semakin mengubah hubungan kerajaan dengan pemerintah kolonial. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1903: Sultan Muhammad Daud Syah menyerah kepada Belanda; perlawanan Aceh berlanjut dalam bentuk lain. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1905: Muhammad Seman gugur; fase perlawanan dinasti Banjar berakhir. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini

mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1908: Syarif Kasim II naik takhta Siak. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1911: Kesultanan Riau-Lingga dihapus oleh Belanda. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1920-an: Modernisasi lembaga dan ekonomi keraton berlangsung di sejumlah kesultanan dalam batas kolonial. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1942: Pendudukan Jepang mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda sementara dan mengguncang struktur tradisional. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1944: Sultan Syarif Muhammad Pontianak menjadi korban kekerasan pendudukan Jepang. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1945: Proklamasi Republik Indonesia; banyak kesultanan menentukan posisi terhadap negara baru. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat

mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1945: Sultan Syarif Kasim II Siak menyatakan dukungan terhadap Republik dan menyerahkan kontribusi besar. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1945: Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan dukungan kepada Republik; Yogyakarta memperoleh konfigurasi khusus. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1946: Revolusi sosial Sumatra Timur memukul banyak elite kesultanan Melayu. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1949: Pengakuan kedaulatan Indonesia mengubah kerangka politik kerajaan yang tersisa. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1950: Sultan Hamid II Pontianak kehilangan posisi politik; kesultanan beralih terutama ke fungsi budaya. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

1950-an dan sesudahnya: Keraton dan kesultanan bertahan dengan status beragam sebagai institusi budaya, sosial, dan simbolik. Dalam membaca titik waktu ini, pembaca perlu menghubungkannya dengan kerajaan lain yang hidup pada masa sama. Timeline terpadu menegaskan bahwa sejarah Nusantara bersifat simultan: ketika satu pusat mengalami puncak, pusat lain dapat berada pada fase pembentukan atau krisis. Pendekatan sinkronik semacam ini mencegah sejarah ditulis sebagai rangkaian kerajaan yang seolah tidak pernah hidup bersamaan.

LATIHAN, PERTANYAAN, DAN PEMBAHASAN

Petunjuk Latihan

Dua puluh soal berikut dirancang untuk menguji pemahaman kronologi sekaligus kemampuan kritik sumber. Jawaban pembahasan merupakan model argumentasi, bukan satu-satunya formulasi yang dapat diterima. Soal pengembangan meminta pembaca menguji kembali jawaban menggunakan sumber primer atau penelitian tambahan.

1. Mengapa tanggal berdirinya sebuah kerajaan Islam dapat berbeda antar-sumber?

Pembahasan: Perbedaan muncul karena istilah “berdiri” dapat menunjuk peristiwa berbeda: konversi penguasa, penggunaan gelar sultan, pendirian ibu kota, penyatuan wilayah, atau pengakuan kedaulatan. Selain itu kalender, penyalinan kronik, dan transliterasi nama menyebabkan variasi. Jawaban yang baik harus menyebut jenis sumber dan tidak memilih angka hanya karena paling populer. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 1: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

2. Bandingkan fungsi historis Samudra Pasai dan Aceh Darussalam dalam jaringan Sumatra utara.

Pembahasan: Pasai menonjol lebih awal sebagai pelabuhan Muslim dan simpul Samudra Hindia, sedangkan Aceh berkembang kemudian menjadi negara yang mempunyai kapasitas militer, diplomasi, produksi intelektual, dan pengendalian lada lebih besar. Aceh juga menyerap ruang politik yang sebelumnya terkait Pasai. Perbandingan harus memperhatikan perbedaan abad dan lingkungan geopolitik. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh

digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 2: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

3. Apa nilai dan keterbatasan catatan Ibn Battuta bagi sejarah Pasai?

Pembahasan: Nilainya terletak pada kesaksian seorang pengunjung abad XIV yang memberi informasi kontemporer tentang istana Muslim, praktik keagamaan, dan jaringan perjalanan. Keterbatasannya ialah sudut pandang personal, masa kunjungan yang singkat, serta transliterasi nama. Catatan tersebut perlu dibandingkan dengan nisan, mata uang, dan kronik. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 3: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

4. Mengapa masa Iskandar Muda disebut puncak Aceh, dan mengapa istilah puncak perlu dikritisi?

Pembahasan: Pemerintahannya terkait ekspansi teritorial, kekuatan armada, pengelolaan ekonomi lada, dan administrasi. Namun puncak tidak berarti semua kelompok memperoleh manfaat setara atau struktur tidak memiliki kelemahan. Ekspansi membutuhkan biaya dan keberhasilan militer tertentu tidak berlanjut. Istilah puncak harus didefinisikan dengan indikator. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika

kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 4: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

5. Jelaskan hubungan Demak, Pajang, dan Mataram sebagai transisi politik, bukan tiga kotak terpisah.

Pembahasan: Ketiganya terhubung melalui elite, konflik suksesi, pemberian wilayah, dan pergeseran pusat dari pesisir menuju pedalaman. Pajang menjadi jembatan antara krisis pasca-Demak dan munculnya Mataram. Analisis transisi harus menilai tradisi babad bersama sumber eksternal dan tidak menganggap tanggal pergantian selalu tunggal. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 5: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

6. Apa arti Perjanjian Giyanti 1755 bagi sejarah politik Jawa?

Pembahasan: Giyanti membagi kekuasaan Mataram antara Surakarta dan Yogyakarta dan menandai hasil panjang konflik suksesi serta intervensi VOC. Perjanjian itu penting bukan hanya karena membentuk dua keraton, tetapi karena menunjukkan perubahan struktur kedaulatan, kontrak, dan keseimbangan elite Jawa. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 6: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan

faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

7. Bandingkan peran lada dalam Banten dan Banjar.

Pembahasan: Di Banten, lada menghubungkan pelabuhan Selat Sunda dengan pasar global dan Lampung sebagai daerah produksi. Di Banjar, lada terhubung dengan jalur sungai Kalimantan Selatan dan jaringan Banjarmasin. Keduanya memperlihatkan bahwa kontrol daerah produksi dan jalur distribusi menentukan kapasitas fiskal serta diplomasi. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 7: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

8. Mengapa konflik Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji menjadi titik penting Banten?

Pembahasan: Konflik dinasti memberi VOC peluang mendukung salah satu pihak. Dukungan tersebut berhubungan dengan konsesi politik dan dagang yang mengurangi kemandirian Banten. Kasus ini memperlihatkan interaksi faktor internal dan eksternal: rivalitas suksesi sendiri tidak otomatis menghasilkan ketergantungan tanpa kapasitas intervensi VOC. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 8: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

9. Bagaimana persaingan Ternate-Tidore membentuk hubungan dengan Portugis, Spanyol, dan VOC?

Pembahasan: Kedua kesultanan telah memiliki rivalitas regional sebelum Eropa. Portugis dan Spanyol memasuki konfigurasi aliansi yang ada, sementara VOC kemudian memanfaatkan dan membentuk ulang jaringan tersebut. Karena itu sejarah Maluku tidak dapat ditulis sebagai Eropa melawan satu kesatuan lokal. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 9: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

10. Apa arti pemerintahan Sultan Baabullah bagi sejarah Ternate?

Pembahasan: Baabullah naik setelah pembunuhan Sultan Khairun dan memimpin fase ketika Portugis terusir dari Ternate pada 1575. Pemerintahannya melambangkan kapasitas koalisi dan ekspansi Ternate. Namun keberhasilan tersebut harus ditempatkan dalam geopolitik Maluku yang tetap melibatkan Tidore, Spanyol, dan kekuatan lokal lain. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 10: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

11. Mengapa Perang Makassar harus dianalisis sebagai perang koalisi?

Pembahasan: VOC tidak bertempur sendirian; Arung Palakka dan kekuatan Bugis merupakan sekutu penting. Gowa juga memiliki sekutu dan kepentingan regional. Menyebut perang hanya sebagai Gowa versus Belanda menghapus agensi lokal

dan alasan politik pihak-pihak Sulawesi yang mempunyai konflik lebih lama. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 11: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

12. Mengapa Riau-Lingga penting meskipun tidak dikenal terutama karena ekspansi militer?

Pembahasan: Riau-Lingga dan Penyengat menjadi pusat produksi intelektual Melayu-Islam, bahasa, sastra, dan historiografi. Raja Ali Haji merupakan contoh penting. Kasus ini menegaskan bahwa pengaruh sejarah dapat diukur melalui pengetahuan dan budaya, bukan hanya wilayah atau kemenangan perang. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 12: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

13. Apa karakter utama Siak Sri Indrapura sebagai kerajaan sungai-pesisir?

Pembahasan: Siak menghubungkan sungai dan pesisir timur Sumatra dengan jaringan Selat Malaka. Kontrol jalur perdagangan, hubungan Melayu-Bugis, perubahan dinasti Sayyid, dan kontrak kolonial membentuk politiknya. Masa Sultan Syarif Kasim II juga penting karena transisi menuju Republik. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat

kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 13: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

14. Bagaimana seharusnya tradisi tentang Kesultanan Perlak diperlakukan?

Pembahasan: Tradisi Perlak penting dalam memori sejarah Aceh, tetapi daftar pendiri dan tarikh sangat awal harus dinilai berdasarkan bukti kontemporer. Sikap ilmiah bukan menolak tradisi secara otomatis dan bukan menerima seluruhnya secara literal. Yang tepat adalah memisahkan klaim, sumber klaim, dan tingkat verifikasi. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 14: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

15. Jelaskan hubungan ulama dan negara dalam kerajaan Islam Nusantara.

Pembahasan: Ulama dapat menjadi kadi, mufti, guru istana, penulis, diplomat, atau pemimpin jaringan mandiri. Hubungan dengan raja dapat berupa patronase, kerja sama, negosiasi, atau kritik. Karena institusi seperti surau dan pesantren tidak selalu dikontrol istana, otoritas agama bersifat majemuk. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 15: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

16. Mengapa konflik suksesi sering membuka jalan intervensi kolonial?

Pembahasan: Faksi yang bersaing membutuhkan sumber daya dan pengakuan. VOC atau pemerintah kolonial dapat menawarkan pasukan dan legitimasi dengan imbalan monopoli, wilayah, utang, atau hak campur tangan. Setelah perjanjian dibuat, ruang keputusan kerajaan menyempit. Ini adalah mekanisme, bukan hukum yang selalu terjadi. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 16: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

17. Bedakan kerajaan yang runtuh, dihapus, dan berintegrasi.

Pembahasan: Runtuh merujuk kehilangan kapasitas politik akibat proses seperti perang atau fragmentasi; dihapus berarti institusi dicabut oleh otoritas lain; berintegrasi berarti status kedaulatan berubah dalam negara baru. Palembang 1823, Banjar 1860, dan Yogyakarta pasca-1945 menunjukkan proses yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 17: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

18. Bagaimana sumber material dapat mengoreksi kronik?

Pembahasan: Nisan bertarikh, koin, keramik, benteng, segel, dan lapisan arkeologi dapat menyediakan tanggal atau konteks yang tidak bergantung pada cerita kronik. Bila narasi menyebut penguasa pada masa tertentu tetapi bukti material menunjukkan urutan lain, peneliti harus menyelidiki kemungkinan salah salin, gelar ganda, atau kronologi alternatif. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 18: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

19. Susun prosedur untuk memverifikasi dua daftar penguasa yang berbeda.

Pembahasan: Mulailah dengan normalisasi nama dan gelar, identifikasi sumber tertua, konversi kalender, cari peristiwa jangkar yang bertanggal, bedakan penguasa penuh dari rival atau wali, dan buat tabel konkordansi. Jangan menggabungkan dua tokoh hanya karena namanya mirip. Hasil akhir harus mempertahankan ketidakpastian yang belum terselesaikan. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 19: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

20. Apa pelajaran utama keragaman kerajaan Islam bagi sejarah Indonesia?

Pembahasan: Keragaman menunjukkan bahwa Islamisasi tidak menghasilkan satu model negara. Geografi, ekonomi, bahasa, adat, dan jaringan lokal membentuk institusi yang berbeda. Namun pusat-pusat tersebut terhubung melalui perdagangan, ulama, diplomasi, dan konflik. Sejarah Indonesia lebih tepat

dipahami sebagai jaringan banyak pusat daripada satu garis dinasti nasional. Untuk memperoleh jawaban penuh, pembaca perlu menghubungkan konsep tersebut dengan sekurang-kurangnya dua contoh kerajaan, menyebut jenis sumber yang relevan, dan menjelaskan apakah hubungan yang dikemukakan bersifat kronologis, kausal, atau hanya korelasi. Ketelitian istilah menjadi bagian penilaian: “pendiri”, “sultan”, “runtuh”, “monopoli”, dan “kolonial” tidak boleh digunakan di luar konteks masa. Model jawaban yang baik juga menyatakan keterbatasan ketika kronologi diperdebatkan, karena pengakuan terhadap batas bukti merupakan bagian dari metode sejarah.

Soal pengembangan 20: Pilih satu kerajaan yang relevan dengan pertanyaan di atas. Buat tabel minimal tiga sumber yang berbeda, catat persamaan dan perbedaan faktanya, kemudian tulis kesimpulan 500-750 kata yang membedakan data terverifikasi, interpretasi, dan tradisi historiografis.

LAMPIRAN - MATRIKS PENELITIAN DAN KONKORDANSI KRONOLOGI

Lampiran ini berfungsi sebagai panduan kerja bagi pembaca yang hendak mengembangkan penelitian. Ia tidak menambahkan kerajaan baru secara spekulatif, tetapi menunjukkan bagaimana data dalam bab-bab sebelumnya dapat diuji dan diperluas.

A. Matriks Kerajaan dan Jenis Sumber Prioritas

Tabel 21. Matriks prioritas sumber per kerajaan

Kerajaan	Wilayah	Sumber Prioritas	Status Kronologi	Rujukan Awal
Kesultanan Samudra Pasai	pesisir utara Aceh, Sumatra	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	relatif kuat; fase akhir mempunyai varian	Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasmita 2009
Kesultanan Aceh Darussalam	Aceh dan Sumatra utara	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat; sejumlah tarikh awal dan masa krisis bervariasi	Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin
Kesultanan Deli	Sumatra Timur	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	cukup kuat untuk fase XIX-XX; kronologi awal perlu kehati-hatian	Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya
Kesultanan Siak Sri Indrapura	Riau, pesisir timur Sumatra	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat untuk urutan kesultanan	Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak
Kesultanan Palembang Darussalam	Sumatra Selatan dan DAS Musi	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat; masa krisis memiliki pemerintahan paralel	Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang
Kesultanan Riau-Lingga	Kepulauan Riau dan Lingga	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat untuk fase abad XIX	Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008
Kesultanan Demak	pesisir utara Jawa Tengah	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	relatif kuat untuk urutan utama; tahun awal dan akhir bervariasi	de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis

Kerajaan	Wilayah	Sumber Prioritas	Status Kronologi	Rujukan Awal
Kesultanan Banten	ujung barat Jawa	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat; 1526 dan 1552 menunjuk fase pendirian yang berbeda	Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976
Kesultanan Mataram Islam	pedalaman Jawa Tengah dan sebagian besar Jawa	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat dengan selisih kecil pada awal Senapati	Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008
Kasunanan Surakarta Hadiningrat	Surakarta, Jawa Tengah	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat	Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta
Kesultanan Yogyakarta	Yogyakarta dan Mataram bagian selatan	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat	Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta
Kesultanan Banjar	Kalimantan Selatan	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	cukup kuat; abad XVII-XVIII memiliki varian/tumpang tindih	Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar
Kesultanan Pontianak	Kalimantan Barat, muara Kapuas	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat	Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat
Kesultanan Gowa-Tallo	Sulawesi Selatan	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat untuk abad XVII; kronologi kemudian lebih variatif	Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008
Kesultanan Ternate	Maluku Utara	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat untuk urutan utama; transliterasi nama bervariasi	Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC
Kesultanan Tidore	Maluku Utara dan jaringan Papua	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	cukup kuat; fase awal dan beberapa tahun mempunyai varian	Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku
Kesultanan Bima	Sumbawa timur, Nusa Tenggara Barat	Kronik/naskah lokal; arsip eksternal; sumber material	kuat untuk urutan sultan; 1620/1640 menunjuk fase berbeda	Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima

B. Protokol Verifikasi Daftar Penguasa

1. Inventaris semua versi daftar penguasa tanpa terlebih dahulu memilih yang dianggap benar.
2. Pisahkan nama diri, gelar, nama anumerta, dan variasi transliterasi. Satu tokoh dapat muncul dengan beberapa bentuk nama.
3. Konversikan tarikh Hijriah, Jawa, Saka, atau kalender lokal secara eksplisit dan catat asumsi konversinya.
4. Cari jangkar kronologi dari nisan, surat bertanggal, kontrak, laporan perjalanan, atau peristiwa regional yang dapat diverifikasi.
5. Identifikasi pemerintahan paralel, rival, wali, dan pemulihan takhta; jangan memaksa semuanya menjadi urutan tunggal.
6. Bandingkan sumber yang dekat waktu dengan sumber yang disusun kemudian, tanpa menganggap salah satu jenis selalu benar.
7. Tulis tingkat kepastian: kuat, cukup kuat, diperdebatkan, atau belum terverifikasi.
8. Simpan provenance setiap data sehingga perubahan akibat penelitian baru dapat dilacak.

C. Lembar Kerja Analisis 17 Kerajaan Utama

Kesultanan Samudra Pasai

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase c.1267-awal abad XVI dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Ricklefs 2008; Reid 1988; Ibn Battuta; Hikayat Raja-Raja Pasai; Tjandrasasmita 2009.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Malik al-Salih (Meurah Silu dalam tradisi) memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana lada, perdagangan transit Samudra Hindia, pelabuhan, dan mata uang emas dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa pelabuhan Muslim internasional, mata uang, dan jaringan keilmuan pada abad XIII-XV merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor persaingan regional, perubahan jalur dagang, tekanan luar, lalu penyerapan oleh Aceh; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Aceh Darussalam

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase akhir abad XV/awal XVI-1903 dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Lombard 2006; Hadi 2004; Reid 2005; Ricklefs 2008; Hikayat Aceh; Bustan al-Salatin.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Ali Mughayat Syah memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana lada, pelabuhan Aceh, perdagangan Samudra Hindia, dan jaringan fiskal-militer dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa ekspansi dan konsolidasi pada masa Iskandar Muda serta tradisi intelektual abad XVII merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor fragmentasi elite, perubahan perdagangan, tekanan Belanda, dan Perang Aceh; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Deli

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase abad XVII-1945 dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Anthony Reid; sejarah Sumatra Timur; arsip kolonial; Andaya & Andaya.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Gocah Pahlawan dalam tradisi politik Deli memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana perdagangan sungai; kemudian tembakau dan konsesi perkebunan abad XIX dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa pertumbuhan ekonomi perkebunan dan pembangunan institusi-istana pada akhir XIX-awal XX merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor ketergantungan kolonial, revolusi sosial Sumatra Timur, dan integrasi Republik; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Siak Sri Indrapura

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase 1723-1945 dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Barnard 2003; Ricklefs 2008; sumber resmi Riau/Siak.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Raja Kecil/Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana sungai Siak, perdagangan, hasil hutan, timah regional, dan pelabuhan dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa konsolidasi Riau daratan dan kesinambungan dinasti Sayyid hingga Sultan Syarif Kasim II merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor kontrak kolonial mengurangi kedaulatan; berakhir melalui integrasi ke Republik Indonesia; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Palembang Darussalam

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase 1659-1823 dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Barbara Watson Andaya; Ricklefs 2008; arsip kolonial dan studi Palembang.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Susuhunan Abdurrahman/Ki Mas Hindi memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana timah Bangka, lada, hasil hutan, pelabuhan dan perdagangan Musi dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa pengelolaan ekonomi sungai-timah dan perlawanan Mahmud Badaruddin II merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor intervensi Inggris-Belanda, konflik suksesi, perang, dan penghapusan 1823; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Riau-Lingga

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase 1812-1911, berakar pada Johor-Riau dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Tuhfat al-Nafis; Matheson Hooker; Andaya & Andaya; Ricklefs 2008.

Pertanyaan institusi: Bagaimana terbentuk sebagai konfigurasi tersendiri sesudah krisis Johor-Riau; pemisahan kolonial ditegaskan 1824 memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana pelabuhan kepulauan, perdagangan Selat Malaka, dan jaringan Melayu-Bugis dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa produksi intelektual Melayu-Islam dan jaringan politik Melayu-Bugis merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor pembelahan Inggris-Belanda, kontrak kolonial, dan penghapusan kesultanan 1911; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Demak

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase akhir abad XV-pertengahan XVI dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: de Graaf & Pigeaud 1976; Ricklefs 2008; Tome Pires; Babad Tanah Jawi secara kritis.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Raden Patah dalam tradisi Jawa memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana beras, bandar pesisir, pelayaran Laut Jawa-Malaka-Maluku dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa ekspansi masa Trenggana dan peran Demak sebagai kekuatan Islam pesisir merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor krisis suksesi setelah Trenggana dan peralihan pusat ke Pajang; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Banten

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase 1526/1552-1813/1816 dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Djajadiningrat 1913; Sajarah Banten; Ricklefs 2008; de Graaf & Pigeaud 1976.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Maulana Hasanuddin; fondasi politik terkait Sunan Gunung Jati dan Demak memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana lada Lampung-Banten, pelabuhan internasional, tekstil, dan perdagangan antarbenua dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa pelabuhan kosmopolitan dan kemandirian pada masa Sultan Ageng Tirtayasa merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor konflik Ageng-Haji, intervensi VOC, kontrak tidak seimbang, lalu pembubaran kolonial; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Mataram Islam

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase c.1580-an-1755 sebagai kerajaan terpadu dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Ricklefs 1974, 1998, 2008; de Graaf & Pigeaud 1976; Carey 2008.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Panembahan Senapati, berakar pada tanah Ki Ageng Pemanahan memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana surplus agraria, pajak desa, pasar, serta kontrol pelabuhan pesisir dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa ekspansi Sultan Agung, reformasi kalender 1633, dan hegemoni Jawa merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor Trunajaya, perang suksesi, intervensi VOC, utang-kontrak, dan Giyanti 1755; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase 1745/1755-1945 sebagai kekuasaan politik tradisional dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Ricklefs 1998, 2007, 2008; Carey 2008; arsip Surakarta.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Pakubuwono II memindahkan keraton 1745; garis pasca-Giyanti melalui Pakubuwono III memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana agraria, tanah lungguh, pasar, dan ekonomi perkebunan Vorstenlanden dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa pengembangan kebudayaan, sastra, seni, dan modernisasi keraton merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor kedaulatan menyusut dalam kontrak kolonial; status politik khusus tidak bertahan sesudah revolusi; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Yogyakarta

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase 1755-sekarang; fokus politik sampai integrasi Republik dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Ricklefs 1974, 2008; Carey 2008; arsip Yogyakarta.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Hamengkubuwono I/Pangeran Mangkubumi melalui Giyanti 1755 memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana agraria, pajak, kerajinan, pasar, dan ekonomi Vorstenlanden dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa pembentukan negara baru, kebudayaan keraton, dan dukungan HB IX kepada Republik merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor bukan runtuh; kedaulatan tradisional berubah dan berintegrasi ke Republik Indonesia; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Banjar

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase c.1526-1860 resmi; perlawanan dinasti hingga 1905 dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Ras 1968; Ricklefs 2008; ANRI; studi sejarah Banjar.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Sultan Suriansyah dalam tradisi Banjar memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana lada, hasil hutan, jalur Barito-Martapura, dan pasar Banjarmasin dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa integrasi sungai, perdagangan lada, perkembangan ulama, dan perlawanan kolonial merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor konflik suksesi, perjanjian-intervensi Belanda, penghapusan 1860, dan Perang Banjar; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Pontianak

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase 1771-1950 dalam berbagai tingkat kedaulatan dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Mary Somers Heidhues; Henri Chambert-Loir; Ricklefs 2008; studi Kalimantan Barat.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Syarif Abdurrahman Alkadrie memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana perdagangan sungai, hasil hutan, emas kawasan hulu, dan pelabuhan Kapuas dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa pendirian Pontianak dan pertumbuhan sebagai pusat dagang Kapuas merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi ke Indonesia; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Gowa-Tallo

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase Islam resmi 1605; kerajaan berlanjut sesudahnya dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Andaya 1981; Cummings 2002; Pelras 1996; Lontara Bilang; Ricklefs 2008.

Pertanyaan institusi: Bagaimana kerajaan lebih tua; Islam diterima Sultan Alauddin dan Karaeng Matoaya pada awal XVII memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana pelabuhan Makassar, beras, perdagangan transit rempah, tekstil, dan pelayaran dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa Makassar sebagai pelabuhan bebas dan perlawanan Sultan Hasanuddin merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor Perang Makassar, aliansi VOC-Bone, Bongaya, dan hilangnya hegemoni dagang; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Ternate

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase kesultanan sejak akhir abad XV hingga integrasi Indonesia dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Andaya 1993; Reid 1993; Ricklefs 2008; sumber Portugis dan VOC.

Pertanyaan institusi: Bagaimana kerajaan lebih tua; Zainal Abidin 1486-1500 memperkuat Islamisasi dinasti memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana cengkih, kora-kora, upeti, pelayaran, dan jaringan antarpulau dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa Baabullah, pengusiran Portugis 1575, dan jaringan politik luas merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor kompetisi Tidore, Portugis-Spanyol, monopoli VOC, ekstirpasi, dan kontrak kolonial; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Tidore

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase Islam resmi akhir XV hingga integrasi Indonesia dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Andaya 1993; Ricklefs 2008; sumber VOC-Spanyol; studi Sultan Nuku.

Pertanyaan institusi: Bagaimana kerajaan lebih tua; Islamisasi dinasti menguat akhir XV-awal XVI memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana cengkih, pelayaran, upeti, dan jaringan Maluku-Papua dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa jaringan Papua-Maluku dan perlawanan Sultan Nuku merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor kompetisi regional, Spanyol/VOC/Belanda, monopoli rempah, dan kolonialisme; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

Kesultanan Bima

Pertanyaan sumber: Sumber apa yang paling dekat dengan fase Islamisasi dinasti 1620/1640-1951 dan bagaimana biasanya? Rujukan awal: Chambert-Loir & Salahuddin 1999; Ricklefs 2008; arsip dan sumber resmi Bima.

Pertanyaan institusi: Bagaimana Abdul Kahir; penobatan resmi sultan diperingati 5 Juli 1640 memperoleh legitimasi, dan apakah mekanisme suksesi berubah pada generasi berikutnya?

Pertanyaan ekonomi: Bagaimana pertanian, peternakan, kuda, beras, hasil hutan, dan pelayaran dikonversi menjadi pendapatan, pasukan, atau patronase?

Pertanyaan puncak: Bukti apa yang mendukung penilaian bahwa administrasi Bo Sangaji Kai, jaringan Makassar-Nusa Tenggara, dan kesinambungan dinasti merupakan prestasi penting?

Pertanyaan kemunduran: Susun urutan kausal dari faktor kontrak kolonial, pendudukan Jepang, dan integrasi Republik; bedakan pemicu, kondisi struktural, dan akibat.

Pertanyaan warisan: Identifikasi satu situs, satu naskah, dan satu tradisi memori yang dapat diteliti untuk menghubungkan masa kerajaan dengan masyarakat sekarang.

GLOSARIUM

Glosarium ini mencakup istilah sejarah politik, ekonomi, sumber, dan kebudayaan yang digunakan dalam buku. Huruf A-Z menggunakan style khusus non-heading sehingga tidak masuk ke Daftar Isi; hanya judul GLOSARIUM yang menjadi entri Heading 1.

A

Aceh Darussalam: Kesultanan besar di ujung utara Sumatra yang mencapai puncak ekspansi pada abad XVII.

Adat: Norma dan kebiasaan lokal yang mengatur hubungan sosial-politik.

Agraria: Berkaitan dengan tanah, pertanian, dan produksi pedesaan.

Aliansi: Kesepakatan kerja sama politik atau militer antar-pihak.

ANRI: Arsip Nasional Republik Indonesia, penyimpan berbagai koleksi sejarah termasuk arsip kolonial.

Arkeologi Islam: Kajian bukti material masyarakat Islam masa lampau.

Armada: Kumpulan kapal yang digunakan untuk perdagangan atau perang.

Autonomi: Derajat kemampuan suatu wilayah mengatur urusannya sendiri.

B

Babad: Jenis kronik/tradisi historiografi Jawa.

Bandar: Kota atau pelabuhan perdagangan.

Banten: Kesultanan dan pelabuhan penting di ujung barat Jawa.

Barito: Sistem sungai penting bagi sejarah Banjar.

Bengawan: Sungai besar; jalur air penting dalam ekonomi pedalaman.

Benteng: Struktur pertahanan yang juga dapat menjadi pusat kontrol dagang.

Bongaya/Bungaya: Perjanjian 1667 setelah Perang Makassar.

Bugis: Kelompok etnolinguistik Sulawesi Selatan dengan jaringan diaspora luas.

C

Cengkih: Rempah utama Maluku yang menjadi komoditas global.

Cirebon: Pusat politik Islam di pesisir utara Jawa Barat.

Circa (c.): Penanda bahwa tahun bersifat perkiraan.

Cukai: Pungutan atas barang atau aktivitas perdagangan.

Catatan perjalanan: Kesaksian pengelana yang dapat menjadi sumber sejarah.

Campur tangan: Intervensi pihak luar dalam urusan internal kerajaan.

Cabang dinasti: Garis keluarga turunan yang dapat mengajukan klaim takhta.

Cartaz: Sistem izin pelayaran Portugis di Samudra Hindia.

D

Daerah produksi: Wilayah penghasil komoditas yang menopang pelabuhan atau fiskal kerajaan.

Datu: Gelar lokal bagi pemimpin atau bangsawan di sejumlah wilayah.

Demak: Kesultanan Islam pesisir Jawa yang penting pada abad XVI.

Deli: Kesultanan Melayu di Sumatra Timur.

Diaspora: Penyebaran kelompok penduduk ke berbagai wilayah sambil mempertahankan jaringan.

Dinasti: Rangkaian penguasa yang dikaitkan oleh keluarga atau garis legitimasi.

Diplomasi: Pengelolaan hubungan antar-kekuasaan melalui utusan, surat, hadiah, dan perjanjian.

Dompu: Kesultanan di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

E

Ekspansi: Perluasan pengaruh politik, militer, atau ekonomi.

Ekspedisi: Operasi perjalanan militer atau politik terorganisasi.

Elite: Kelompok yang memiliki akses besar terhadap kekuasaan atau sumber daya.

Epigrafi: Kajian tulisan pada media keras seperti batu atau logam.

Eropa: Dalam buku merujuk pada aktor Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan lainnya sesuai konteks.

Ekonomi politik: Kajian hubungan kekuasaan dengan produksi, distribusi, dan pendapatan.

Etnolinguistik: Berkaitan dengan kelompok yang dibentuk oleh bahasa dan identitas etnis.

Era kolonial: Masa meningkatnya kontrol politik dan administratif kekuatan kolonial.

F

Faksi: Kelompok politik yang bersaing dalam elite.

Fiskal: Berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintahan.

Feodalisme: Istilah yang harus digunakan hati-hati; tidak otomatis cocok untuk semua struktur kerajaan Nusantara.

Filologi: Kajian kritis teks dan manuskrip.

Fortifikasi: Sistem pertahanan benteng dan struktur terkait.

Formula nisan: Ungkapan baku pada batu nisan yang dapat membantu identifikasi masa dan jaringan budaya.

Fusi budaya: Perpaduan unsur lokal dan luar dalam praktik politik atau keagamaan.

Fungsi ritual: Peran upacara dalam membangun legitimasi dan keteraturan sosial.

G

Gelar: Sebutan resmi yang menunjukkan kedudukan atau legitimasi.

Genealogi: Silsilah hubungan keluarga.

Giyanti: Perjanjian 1755 yang membagi Mataram dan membentuk Yogyakarta.

Globalisasi awal modern: Peningkatan koneksi perdagangan lintas kawasan pada kira-kira abad XVI-XVIII.

Gowa: Kerajaan utama Sulawesi Selatan yang bersama Tallo menjadi pusat Makassar.

Gowa-Tallo: Konfigurasi politik kembar yang mengislam pada awal abad XVII.

Gudang: Fasilitas penyimpanan barang dalam ekonomi pelabuhan.

Gubernemen: Istilah kolonial untuk pemerintahan/administrasi pemerintah Hindia Belanda.

H

Haji: Ibadah ke Makkah yang juga membentuk jaringan pengetahuan dan sosial.

Hegemoni: Dominasi atau pengaruh kuat yang tidak selalu berarti administrasi langsung.

Hikayat: Genre narasi Melayu yang dapat mengandung sejarah, sastra, dan legitimasi.

Hikayat Aceh: Teks penting bagi sejarah dan legitimasi Aceh.

Hikayat Banjar: Kronik utama bagi tradisi sejarah Banjar.

Hikayat Raja-Raja Pasai: Kronik Melayu penting mengenai Pasai.

Hinterland: Daerah belakang pelabuhan yang memasok komoditas dan penduduk.

Historiografi: Kajian tentang penulisan dan interpretasi sejarah.

I

Ibu kota: Pusat kediaman penguasa dan administrasi.

Ibn Battuta: Pengelana abad XIV yang mengunjungi Samudra Pasai.

Integrasi: Proses masuk atau menyesuaikan status suatu wilayah ke dalam struktur politik yang lebih luas.

Intervensi: Campur tangan eksternal dalam politik suatu kerajaan.

Islamisasi: Proses bertahap penerimaan Islam dalam masyarakat dan institusi.

Istana: Pusat kediaman penguasa sekaligus arena politik dan budaya.

Istilah kronologi: Konvensi seperti c., rentang, dan pemerintahan terputus.

Inskripsi: Tulisan pada benda atau bangunan yang menjadi sumber sejarah.

J

Jaringan ulama: Hubungan guru-murid dan pertukaran pengetahuan lintas wilayah.

Jalur rempah: Rute perdagangan komoditas rempah dari kawasan produksi ke pasar.

Jawi: Istilah yang dapat merujuk pada aksara Arab-Melayu atau identitas regional menurut konteks.

Jawa-Islam: Istilah analitis untuk interaksi tradisi Jawa dan Islam.

Johor-Riau: Konfigurasi politik Melayu yang menjadi latar Riau-Lingga.

Jong: Kapal besar Asia Tenggara dalam perdagangan maritim.

Juru tulis: Pejabat atau tenaga literasi yang menyiapkan dokumen.

Jangkar kronologi: Peristiwa atau bukti bertanggal kuat yang digunakan menata urutan peristiwa lain.

K

Kadi: Pejabat atau ahli hukum Islam dalam konteks tertentu.

Karaeng: Gelar bangsawan/penguasa di Makassar.

Kasunanan: Bentuk kerajaan yang dipimpin susuhunan, seperti Surakarta.

Kesultanan: Kerajaan yang penguasanya memakai gelar sultan atau struktur legitimasi Islam terkait.

Kedaulatan: Kapasitas membuat keputusan politik tertinggi; bentuknya berubah menurut masa.

Komoditas: Barang bernilai ekonomi seperti lada, cengkih, timah, dan beras.

Konkordansi: Tabel penyelarasan nama, tarikh, atau istilah antar-sumber.

Kronik: Teks yang menyusun peristiwa atau silsilah dalam kerangka sejarah.

L

Lada: Komoditas penting Aceh, Banten, Banjar, dan kawasan lain.

Legitimasi: Dasar penerimaan dan pembenaran kekuasaan.

Lingga: Pulau dan pusat Kesultanan Riau-Lingga.

Literasi istana: Praktik penulisan, penyalinan, dan pembacaan teks di lingkungan keraton.

Lontara: Tradisi aksara dan manuskrip Bugis-Makassar.

Logistik: Pengadaan makanan, transportasi, dan perbekalan bagi operasi negara/militer.

Lungguh: Hak atau tanah jabatan dalam konteks kerajaan Jawa.

Loyalitas: Hubungan kesetiaan politik yang dapat berlapis dan dinegosiasikan.

M

Makassar: Pelabuhan besar Sulawesi Selatan dan nama historis lingkungan Gowa-Tallo.

Maluku: Kawasan kepulauan rempah yang mencakup Ternate, Tidore, dan pusat lain.

Mataram Islam: Kerajaan pedalaman Jawa yang berkembang sejak akhir abad XVI.

Mata uang: Alat transaksi sekaligus sumber informasi ekonomi dan legitimasi.

Monopoli: Hak eksklusif atas perdagangan atau pembelian komoditas.

Muara: Pertemuan sungai dan laut yang sering menjadi lokasi strategis pelabuhan.

Manuskrip: Naskah tulisan tangan sebelum atau berdampingan dengan tradisi cetak.

Maritim: Berkaitan dengan laut, pelayaran, pelabuhan, dan jaringan kepulauan.

N

Naskah: Dokumen tulisan tangan atau teks yang menjadi sumber sejarah.

Negara kolonial: Pemerintahan teritorial kolonial dengan birokrasi dan militer.

Negosiasi: Proses tawar-menawar kepentingan antaraktor.

Nisan: Penanda makam yang sering memuat nama dan tarikh.

Numismatik: Kajian koin dan mata uang.

Nuku: Sultan Tidore akhir abad XVIII yang memimpin perlawanan luas.

Nusantara: Istilah geografis-historis untuk kepulauan Indonesia dan jaringan sekitarnya menurut konteks.

Narasi legitimasi: Cerita yang menjelaskan hak suatu dinasti untuk memerintah.

O

Otonomi: Kemampuan mengatur urusan internal dalam hubungan kekuasaan lebih besar.

Orang kaya: Istilah bagi elite pedagang atau bangsawan di beberapa kesultanan Melayu.

Orientasi maritim: Kecenderungan negara menempatkan laut dan pelabuhan sebagai basis utama.

Oral tradition: Tradisi lisan; istilah Inggris yang sering muncul dalam literatur sejarah.

Otoritas: Kewenangan yang diakui untuk memerintah atau memberi keputusan.

Otoritas agama: Kewenangan dalam pengetahuan dan praktik keagamaan.

Oligarki istana: Dominasi sekelompok elite dalam keputusan keraton.

Orde suksesi: Aturan atau pola pergantian penguasa.

P

Pajak: Pungutan yang menjadi sumber pendapatan negara.

Pajang: Kerajaan Jawa yang menjadi jembatan politik Demak-Mataram.

Palembang Darussalam: Kesultanan di DAS Musi yang penting dalam perdagangan timah dan sungai.

Panembahan: Gelar penguasa dalam tradisi Jawa/Kalimantan tertentu.

Pasai: Samudra Pasai, kesultanan Muslim awal di utara Sumatra.

Pelabuhan bebas: Pelabuhan yang membuka perdagangan bagi banyak pedagang dengan pembatasan monopoli yang relatif kecil.

Perjanjian: Dokumen atau kesepakatan antar-kekuatan politik.

Prosopografi: Metode mempelajari kelompok tokoh melalui data biografi dan relasi.

Q

Qadi/Kadi: Transliterasi lain untuk pejabat atau hakim dalam hukum Islam.

Qanun: Aturan atau kompilasi ketentuan pemerintahan/hukum dalam konteks tertentu.

Qiblat jaringan: Istilah kiasan untuk orientasi ke pusat keilmuan Islam; bukan kategori politik formal.

Qiraah sumber: Pembacaan kritis terhadap teks dengan memperhatikan varian.

Qiyas historiografis: Perbandingan analogis yang harus digunakan hati-hati agar tidak memaksakan kesamaan.

Qaul ulama: Pendapat ulama; dalam sumber dapat berfungsi sebagai otoritas normatif.

Quraisy genealogis: Klaim silsilah tertentu yang perlu diverifikasi sesuai sumber.

Qurani: Berkaitan dengan Al-Qur'an; dalam buku muncul terutama pada bahasa legitimasi dan pendidikan.

R

Raja Kecil: Pendiri Siak Sri Indrapura pada 1723.

Rakyat: Istilah umum bagi penduduk; komposisinya beragam menurut status sosial.

Reid, Anthony: Sejarawan penting Asia Tenggara zaman perdagangan.

Rempah: Komoditas bernilai tinggi seperti cengkih dan pala.

Riau-Lingga: Kesultanan Melayu abad XIX yang penting secara politik-intelektual.

Ricklefs, M.C.: Sejarawan penting Indonesia, khususnya Jawa dan sejarah modern awal.

Rival takhta: Tokoh yang menuntut kekuasaan bersamaan dengan penguasa lain.

Rute dagang: Jalur pelayaran atau darat untuk pergerakan komoditas dan orang.

S

Samudra Pasai: Kesultanan Muslim awal penting di pantai utara Sumatra.

Silsilah: Urutan hubungan genealogis yang juga dapat berfungsi sebagai legitimasi.

Siak: Kesultanan di Riau yang berdiri pada 1723.

Sultan: Gelar penguasa dalam tradisi politik Islam.

Sultan Agung: Penguasa Mataram 1613-1645.

Sultanah: Penguasa perempuan bergelar sultan/sultanah; Aceh memiliki empat penguasa perempuan berurutan abad XVII.

Suksesi: Pergantian pemegang takhta.

Syahbandar: Pejabat pelabuhan yang mengurus pedagang dan aktivitas niaga.

T

Tallo: Kerajaan sekutu kembar Gowa dalam konfigurasi Makassar.

Ternate: Kesultanan Maluku penghasil cengkih dan kekuatan regional.

Tidore: Kesultanan Maluku dan rival utama Ternate dalam banyak fase.

Timah: Komoditas utama Bangka-Palembang dan jaringan regional.

Tome Pires: Penulis Suma Oriental awal abad XVI.

Traktat: Perjanjian formal antar-kekuatan.

Trunajaya: Tokoh pemberontakan besar terhadap Mataram pada 1670-an.

Tuhfat al-Nafis: Karya historiografi Melayu penting bagi dunia Riau-Johor.

U

Ulama: Ahli agama yang dapat berperan sebagai guru, kadi, penulis, atau aktor politik.

Upeti: Penyerahan barang atau kewajiban sebagai tanda hubungan politik.

Urbanisasi pelabuhan: Pertumbuhan kota akibat konsentrasi perdagangan dan penduduk.

Utusan: Perwakilan diplomatik.

Uka Tjandrasmita: Arkeolog/sejarawan penting dalam kajian Islam Nusantara.

Unit politik: Istilah netral untuk kerajaan, kesultanan, atau pusat kekuasaan lain.

Uang emas: Mata uang bernilai tinggi; Pasai dikenal memiliki tradisi koin emas.

Uji silang: Proses membandingkan informasi dari beberapa sumber.

V

Vasal: Istilah untuk pihak yang berada dalam hubungan ketergantungan; harus digunakan sesuai konteks dan tidak otomatis berarti administrasi langsung.

VOC: Vereenigde Oostindische Compagnie, perusahaan dagang Belanda 1602-1799.

Vorstenlanden: Wilayah kerajaan Jawa Surakarta-Yogyakarta dalam tata kolonial.

Valentijn, François: Penulis awal abad XVIII yang mencatat banyak informasi tentang Hindia Timur.

Verifikasi: Pemeriksaan kebenaran suatu klaim dengan bukti.

Varian kronologi: Perbedaan tahun atau urutan antar-sumber.

Vernakular: Bahasa lokal yang digunakan dalam teks atau komunikasi masyarakat.

Verenigde Compagnie: Bagian dari nama lengkap VOC; menandai perusahaan gabungan.

W

Wali Songo: Tradisi sembilan wali yang sangat penting dalam memori Islamisasi Jawa.

Warisan: Peninggalan material dan nonmaterial masa lalu.

Wilayah inti: Daerah yang paling langsung berada di bawah pusat kekuasaan.

Wolio: Bahasa dan tradisi tulis penting Kesultanan Buton.

World-system maritim: Kerangka analitis untuk melihat hubungan pusat perdagangan antarkawasan.

Wafat: Kematian; tarikh wafat pada nisan sering menjadi jangkar kronologi.

Wangsa: Istilah bagi garis dinasti atau keluarga penguasa.

Warkah: Surat atau dokumen tertulis, termasuk surat diplomatik Melayu.

X

Xenodochy pelabuhan: Keterbukaan menerima pendatang; istilah analitis untuk keramahan institusional pusat dagang.

Xerografi naskah: Teknik reproduksi modern yang membantu penyebaran salinan penelitian.

Xilografi: Teknik cetak blok kayu; berguna dalam sejarah teknologi teks meski bukan medium dominan semua kerajaan.

XRF: X-ray fluorescence, metode analisis unsur yang dapat diterapkan pada artefak secara ilmiah.

XML arsip digital: Format data yang dapat dipakai dalam edisi digital dan basis data sejarah.

X-axis kronologi: Sumbu tahun pada diagram kronologi dalam buku.

Xenonym: Nama yang diberikan pihak luar; relevan ketika sumber asing menulis nama lokal secara berbeda.

Xenografi: Penggambaran masyarakat asing oleh penulis luar; berguna sebagai konsep kritik sumber.

Y

Yang Dipertuan: Gelar penguasa dalam tradisi Melayu tertentu.

Yang Dipertuan Besar: Gelar yang digunakan pada sejumlah konfigurasi politik Melayu.

Yang Dipertuan Muda: Jabatan penting Bugis dalam dunia Johor-Riau.

Yogyakarta: Kesultanan yang dibentuk melalui Giyanti 1755.

Yuridiksi: Ruang berlakunya suatu kewenangan atau hukum.

Yayasan keraton: Bentuk modern pengelolaan aset budaya tertentu; status berbeda tiap keraton.

Yupa: Prasasti tiang batu Kutai kuno; bukan sumber kerajaan Islam, tetapi penting membedakan fase sejarah Kutai.

Year range: Rentang tahun; digunakan ketika kronologi tidak dapat dipastikan hingga satu tahun.

Z

Zaman Perdagangan: Istilah populer dari karya Anthony Reid untuk periode intensifikasi perdagangan Asia Tenggara awal modern.

Ziarah: Kunjungan ke makam atau tempat suci yang membentuk praktik memori.

Zillullah: Konsep bayang-bayang Tuhan yang muncul dalam bahasa legitimasi kerajaan Islam tertentu.

Zonasi pelabuhan: Pembagian ruang kota pelabuhan menurut fungsi atau komunitas.

Zending arsip: Istilah Belanda terkait pengiriman berkas; relevan dalam sejarah arsip kolonial.

Zaman kolonial: Periode kontrol kekuasaan kolonial dengan intensitas berbeda menurut wilayah.

Zuriat: Keturunan atau garis keluarga.

Zeitgeist: Istilah analitis tentang semangat zaman; perlu digunakan hati-hati agar tidak menggantikan bukti konkret.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berikut memadukan sumber primer/edisi sumber, monograf akademik, dan rujukan arsip. Edisi berbeda dapat mempunyai variasi tahun terbit atau penerjemah; pembaca penelitian disarankan memeriksa katalog perpustakaan untuk edisi yang digunakan secara spesifik.

1. Andaya, Barbara Watson. 1993. *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
2. Andaya, Leonard Y. 1981. *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. The Hague: Martinus Nijhoff.
3. Andaya, Leonard Y. 1993. *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
4. Andaya, Leonard Y. 2008. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
5. Andaya, Barbara Watson, dan Leonard Y. Andaya. *A History of Malaysia*. Edisi yang relevan. Honolulu/London: University of Hawai'i Press/Palgrave.
6. ANRI. *Arsip VOC, arsip kerajaan, kontrak politik, dan koleksi pemerintahan kolonial yang relevan*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
8. Barnard, Timothy P. 2003. *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827*. Leiden: KITLV Press.
9. Barbosa, Duarte. *The Book of Duarte Barbosa*. Diterjemahkan/diterbitkan dalam edisi Hakluyt Society oleh Mansel Longworth Dames, 1918-1921.
10. Bustan al-Salatin. Edisi-edisi filologis yang relevan untuk sejarah Aceh abad XVII.
11. Carey, Peter. 2007/2008. *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press.
12. Chambert-Loir, Henri, dan Siti Maryam R. Salahuddin. 1999. *Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: EFEO/Yayasan Obor Indonesia.
13. Cortesão, Armando, ed. 1944. *The Suma Oriental of Tomé Pires*. London: Hakluyt Society.
14. Cummings, William. 2002. *Making Blood White: Historical Transformations in Early Modern Makassar*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
15. de Graaf, H.J., dan Th.G.Th. Pigeaud. 1976. *Islamic States in Java 1500-1700: A Summary, Bibliography and Index*. The Hague: Martinus Nijhoff.
16. Djajadiningrat, Hoesein. 1913. *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*. Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen.

17. Gibb, H.A.R., trans. *The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354*. Edisi Hakluyt Society yang relevan.
18. Hadi, Amirul. 2004. *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh*. Leiden: Brill.
19. Hall, D.G.E. *A History of South-East Asia*. Edisi yang relevan. London: Macmillan.
20. Hall, Kenneth R. 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
21. Heidhues, Mary Somers. *Berbagai studi tentang Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa, dan lingkungan politik Pontianak-Sambas*.
22. *Hikayat Aceh*. Edisi kritis/filologis yang relevan, termasuk kajian Teuku Iskandar.
23. *Hikayat Banjar*. Lihat Ras, J.J. 1968 untuk edisi dan kajian tekstual.
24. *Hikayat Raja-Raja Pasai*. Edisi-edisi filologis yang relevan, termasuk kajian Russell Jones dan sarjana Melayu klasik.
25. Iskandar, Teuku. 1958. *De Hikajat Atjeh*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
26. Jones, Russell, ed. *Hikayat Raja-Raja Pasai*. Edisi kritis yang relevan.
27. Kumar, Ann. 1976. *Surapati: Man and Legend*. Leiden: Brill.
28. Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Tiga jilid. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
29. Lombard, Denys. 2006. *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, edisi terjemahan.
30. Matheson Hooker, Virginia. *Kajian dan edisi mengenai Tuhfat al-Nafis serta historiografi Melayu-Bugis*.
31. Milner, A.C. 1982. *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*. Tucson: University of Arizona Press.
32. Pelras, Christian. 1996. *The Bugis*. Oxford: Blackwell.
33. Pires, Tomé. *Suma Oriental*. Lihat Cortesão 1944 untuk edisi bahasa Inggris.
34. Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto, eds. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III dan jilid terkait*. Edisi revisi yang relevan. Jakarta: Balai Pustaka.
35. Ras, J.J. 1968. *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography*. The Hague: Martinus Nijhoff.
36. Reid, Anthony. 1988. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Volume One: The Lands Below the Winds*. New Haven: Yale University Press.
37. Reid, Anthony. 1993. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Volume Two: Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press.
38. Reid, Anthony. 2005. *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*. Singapore: NUS Press.
39. Ricklefs, M.C. 1974. *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792: A History of the Division of Java*. London: Oxford University Press.

40. Ricklefs, M.C. 1998. *The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
41. Ricklefs, M.C. 2006. *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. Norwalk, CT: EastBridge.
42. Ricklefs, M.C. 2007. *Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions, c.1830-1930*. Singapore: NUS Press.
43. Ricklefs, M.C. 2008. *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Fourth Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
44. *Sajarah Banten*. Edisi kritis dan kajian terkait, dibaca bersama Djajadiningrat 1913.
45. Salahuddin, Siti Maryam R. dan kajian-kajian sejarah Bima berbasis Bo' Sangaji Kai.
46. Schoorl, J.W. dan penelitian terkait Kesultanan Buton/Wolio.
47. Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
48. *Tuhfat al-Nafis*. Edisi kritis yang relevan, khususnya untuk sejarah Riau-Johor dan jaringan Melayu-Bugis.
49. Valentijn, François. 1724-1726. *Oud en Nieuw Oost-Indiën*. Dordrecht/Amsterdam: Joannes van Braam/Gerard onder de Linden.
50. Wellen, Kathryn Anderson. 2014. *The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
51. Zuhdi, Susanto. Berbagai kajian mengenai Buton dan sejarah maritim Sulawesi Tenggara.
52. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Publikasi sejarah dan kebudayaan daerah mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara; digunakan sebagai pelengkap dan dibandingkan dengan monograf akademik.
53. Pemerintah Aceh/Dinas Kebudayaan. Publikasi sejarah Kesultanan Aceh dan situs terkait; digunakan sebagai sumber institusional pelengkap.
54. Pemerintah Provinsi Riau/Kabupaten Siak. Publikasi sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura; dibandingkan dengan Barnard dan sumber akademik lain.
55. Pemerintah daerah Banten/Serang. Publikasi sejarah Kesultanan Banten dan situs Banten Lama; dibandingkan dengan *Sajarah Banten* dan kajian akademik.
56. Pemerintah daerah Bima/Museum Asi Mbojo. Publikasi sejarah Bima; dibandingkan dengan Bo' Sangaji Kai dan penelitian filologis.

- KASMUI -
Dosen Kimia, Komputasi, IT, AI UNNES

<https://hisabmu.com/>
<https://kasmui.cloud/>

Ketua PCM Gunungpati 2

Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang & PWM Jawa Tengah

Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah

Praktisi Ilmu Falak